

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Volume 13, Nomor 1, April 2015 ISSN 1410-2293



FAKULTAS EKONOMI UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

BULETIN EKONOMI	VOLUME 13	Nomor 1	Halaman 1-138	Yogyakarta April 2015	ISSN 1410-2293
-----------------	-----------	---------	------------------	--------------------------	-------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya BULETIN EKONOMI Vol. 13, No. 1, April 2015 telah dapat diterbitkan. Artikel yang masuk ke Redaksi cukup banyak, baik kuantitas, kualitas (substansi, aktualisasi, originalitas), maupun variasi topiknya. Oleh karenanya, Redaksi harus benar-benar menyeleksinya sesuai komitmen untuk menjadikan BULETIN EKONOMI sebagai jurnal ilmiah yang populer.

Pada edisi kali ini, terdiri atas delapan hasil studi empiris dan dua artikel telaah pengabdian. Hasil studi empiris yang dimuat pada edisi kali ini adalah : “Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia” oleh Sri Suryaningsum, Moch. Irhas Effendi, R. Hendry Gusaptono dan Sultan, ”Hubungan Penurunan Suku Bunga SBI dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah ini Terhadap Perubahan Harga Saham dan Perubahan Volume Perdagangan Saham dari Saham-Saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta” oleh Dwi Soegiarto, ”Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Penjelasan Teori *Slippery Slope*” oleh Dwi Ratmono, ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara)” oleh Nita Andriyani Budiman dan Zuliyati, ”Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)” oleh Amin Kuncoro, ”Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja yang Dimediasi oleh Kompetensi Organisasi” oleh Winarno dan Sri Wahyuni Widiastuti, ”Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Padi pada Lahan Rawan Kekeringan di Kabupaten Purworejo” oleh Anik Safitri dan Suryanto dan ”Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta)” oleh Hari Kusuma Satria Negara.

Sedangkan artikel telaah pengabdian dalam terbitan ini adalah ”IbM Kelompok Usaha Bersama “Mekar Sari” oleh Wahyu Dwi Artaningtyas dan Sri Rahayu Budi Hastuti dan ”Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberarum Kec. Moyudan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui *Integrated Rural Tourism* (IRT)” oleh Eny Endah Pujiastuti, Isbandi Sutrisno, Didik Indarwanta dan Muh. Edy Susilo.

Akhirnya, semoga BULETIN EKONOMI edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini sangat bermanfaat dan ditunggu Redaksi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat kami

Redaksi

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Volume 13, Nomor 1, April 2015 ISSN 1410-2293

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Sri Suryaningsum, Moch. Irhas Effendi, R. Hendry Gusaptono dan Sultan	1-14
Hubungan Penurunan Suku Bunga SBI dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah ini Terhadap Perubahan Harga Saham dan Perubahan Volume Perdagangan Saham dari Saham-Saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Dwi Soegiarto	15-38
IbM Kelompok Usaha Bersama “Mekar Sari” Wahyu Dwi Artaningtyas dan Sri Rahayu Budi Hastuti	39-48
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberarum Kec. Moyudan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui <i>Integrated Rural Tourism</i> (IRT) Eny Endah Pujiastuti, Isbandi Sutrisno, Didik Indarwanta dan Muh. Edy Susilo	49-58
Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Penjelasan Teori <i>Slippery Slope</i> Dwi Ratmono	59-76
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara) Nita Andriyani Budiman dan Zuliyati	77-86
Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati) Amin Kuncoro	87-96
Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja yang Dimediasi oleh Kompetensi Organisasi Winarno dan Sri Wahyuni Widiastuti	97-108
Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Padi pada Lahan Rawan Kekeringan di Kabupaten Purworejo Anik Safitri dan Suryanto	109-126
Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta) Hari Kusuma Satria Negara	127-138

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA¹

Sri Suryaningsum²
Moch. Irhas Effendi³
R. Hendry Gusaptono⁴
Sultan⁵

Abstract: Government Financial Management and Human Development Index. *This study relating to the financial management of the district government of Sleman to calculate the level of economic achievement of the economic performance of the activities undertaken units Sleman district government performance. The data used is the budget data from Sleman Bappeda office with fiscal year 2007 through fiscal year 2011. The Human Development Index is one indicator of the success of development and the mirror of accountability of government financial management is high. Results of this study, by using the method of measuring the ESF for the financial management of the district of Sleman economically obtain a score of 4, and the results of economic calculations more than 100%. Which means that the budget has accounted for a reasonable price to pay for the realization of the desired activity. It also means that public facilities provided by the district government of Sleman accessible to the public good. If it is associated with HDI is appropriate that education and health facilities received a very high value, while the component is still very low incomes. IPM achieved by local governments Slemanpun much higher than the average national HDI. Nevertheless the results of this study indicate that the components of the HDI value achieved uneven. In this case the income component has a low value indicates that the living standard is still great poverty / high. In the living standard conditions of poverty is still high, Sleman society remains resilient and education and health care for the well-facilitated accordance economy value calculated in this study. Things that need to be addressed is to improve competitiveness in order for the revenue to be balanced with other components (education and health).*

Abstrak: Pengelolaan Keuangan Pemerintahan dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan kabupaten Sleman dengan menghitung tingkat ekonomisnya pencapaian kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan unit-unit kinerja pemerintahan kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah data APBD dari kantor Bappeda Sleman dengan tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011. Indeks

1 Artikel ini merupakan bagian dari hasil Hibah PUPT DIKTI RI 2014; peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada DIKTI RI, LPPM UPNVY, Tri Lestari sebagai asisten peneliti yang berkontribusi menyediakan data penelitian, dan rekan-rekan sekerja UPNVY sebagai partner diskusi.

2 Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: suryaningsumsri@yahoo.com

3 Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: m_irhaseffendi@upnyk.ac.id

4 Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: tono_hendri@yahoo.com

5 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: sultantririan@yahoo.co.id

Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan cermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan yang akuntabilitasnya tinggi. Hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode pengukuran FEE untuk pengelolaan keuangan kabupaten Sleman secara ekonomi mendapatkan skor 4 dan hasil perhitungan ekonomis lebih dari 100%. Yang berarti anggaran tersebut telah memperhitungkan harga wajar untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang diinginkan. Hal ini juga berarti fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat diakses oleh publik dengan baik. Jika dikaitkan dengan IPM memang sesuai yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan mendapat nilai yang sangat tinggi, sementara komponen pendapatan masih sangat rendah. IPM yang berhasil diraih pemerintah kabupaten Slemanpun jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional. Walaupun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen-komponen nilai IPM yang diraih tidak merata. Dalam hal ini komponen pendapatan memiliki nilai yang rendah menunjukkan taraf hidup kemiskinan yang masih besar/tinggi. Dalam kondisi taraf hidup kemiskinan yang masih tinggi, masyarakat Sleman tetap ulet dan peduli terhadap pendidikan dan kesehatan yang difasilitasi dengan baik sesuai nilai keekonomisan yang dihitung dalam penelitian ini. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan daya saing agar komponen pendapatan menjadi seimbang dengan komponen-komponen yang lainnya (pendidikan dan kesehatan).

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia, ekonomi, anggaran, Sleman.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengenai APBD tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011 dalam mengelola anggaran terhadap keuangan daerah secara ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik akan menciptakan suasana yang kondusif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat pengelolaan keuangan pemerintahan yang relative lebih bagus dibandingkan tingkat pengelolaan keuangan rata-rata secara nasional.

Pengelolaan anggaran daerah harus sinkron dengan kebijakan nasional. Salah satu kebijakan nasional mempunyai tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia, nomor 27 tahun 2013, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Dalam pedoman tersebut diatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen; penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen; penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan laju inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen. Ada sebelas sasaran utama Prioritas Nasional dan 3 tiga Prioritas sasaran lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu: Reformasi birokrasi dan tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan pangan; Infrastruktur; Iklim investasi dan iklim usaha; Energi; Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Perpu Nomor 27 Tahun 2013 adanya kegiatan pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang optimal akan meningkatkan kualitas penduduknya. Salah satu ukuran kualitas penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia. Kegiatan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan batas keuangan yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah daerah dan bertujuan sebesar-besarnya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pelayanan masyarakat umum. Masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kepentingannya termasuk dalam hal meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayahnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (dalam Wikipedia). IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah berkaitan pula dengan keberhasilan daerah dalam mengelola operasional anggaran belanja daerahnya. Dalam hal tingkat kinerja ekonomi suatu daerah dikatakan bagus jika kinerja keuangannya adalah ekonomis. Menurut Mahmudi (2010), *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Artikel ini memfokuskan pada pengukuran nilai ekonomis, sedangkan dua pengukuran yang lainnya dipublikasikan sebagai bagian seri lanjutan penulisan ini.

Keekonomisan yaitu pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber dayanya terhadap belanja daerah secara ekonomis? Bagaimanakah pengelolaan keuangan dan Indeks Pembangunan Masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011?

Organisasi artikel ini adalah sebagaiberikut yaitu a) teori yang melandasi yaitu pengukuran kinerja ekonomi, value for money, dan Indeks Pembangunan Manusia; b) rancangan penelitian dan penghitungan kinerja ekonomi; d)pembahasan penelitian yang terdiri dari skor kinerja ekonomi dan indeks pembangunan masyarakat; e)simpulan dan saran

Pengukuran Kinerja. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atas kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis bahwa kinerja merupakan prestasi oleh organisasi dalam periode tertentu. Hal ini sesuai dengan Bastian, 2001: 329.

Safar (2003), mendefinisikan kinerja instansi pemerintahan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilita dalam rangka memiliki keberhasilan atau kegagalan pelaksanaankegiatan (program) sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Safar (2003), menyatakan bahwa pengukuran kinerja menghubungkan input (biaya atau waktu) dengan hasil atau output yang dapat diidentifikasi dan dapat diukur. Namun, demikian pada akhirnya definisi-definisi tersebut dapat bermuara kepada suatu kesepakatan bahwa dengan mengukur kinerja makna proses pertanggungjawaban pengelola atas segala kegiatannya kepada *stakeholder* dapat menjadi lebih objektif. Pengukuran kinerja juga sebagai pengukuran hasil (*outcome*). Pengukuran kemajuan secara teratur menuju *outcomes* tertentu merupakan kemampuan vital dalam setiap usaha pengelolaan yang berorientasi pada konsumen yang memfokuskan pada maksimisasi manfaat dan minimisasi konsekuensi negatif bagi konsumen jasa atau program. Konsumen mungkin berupa warga masyarakat yang menerima jasa secara langsung bisa juga warga masyarakat atau perusahaan yang terkena dampak secara tidak langsung. Aspek pokok dalam pengukuran kinerja adalah:

1. Aspek keuangan merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama suatu periode tertentu.
2. Kepuasan pengguna berhubungan dengan pelayanan dari instansi pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.
3. Operasi bisnis internal, informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas operasi secara berkesinambungan serta prosedur pelayanan pada instansi pemerintah.
4. Kepuasan pegawai, sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan program kinerja pemerintah sehingga penting sekali untuk mengelola kepuasan pegawai karena apabila pegawai pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemerintah akan dengan mudah melakukan inovasi-inovasi. Kepuasan komunitas dan *stakeholders* yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan instansi pemerintah.
5. Waktu untuk mengukur kinerja. Waktu menjadi salah satu aspek yang perlu di perhatikan karena sering kali informasi yang penting lambat diterima sehingga pengambilan keputusan kadang tidak relevan dan kadaluarsa. Hal ini dapat menghambat kinerja pemerintah.

Model value for money. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dalam pengawasan atas kinerja. Pendekatan ini juga mengutamakan penentuan dan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Karakteristik anggaran berbasis kinerja:

1. Komprehensif/ komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional
4. Berjangka panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. Analisis total *cost* dan benefit
7. Berorientasi input, *output* dan *outcome*, bukan sekedar input
8. Adanya pengawasan kinerja.

Menurut Mahmudi (2010), *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen, yaitu:

- a. Ekonomi yaitu pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan

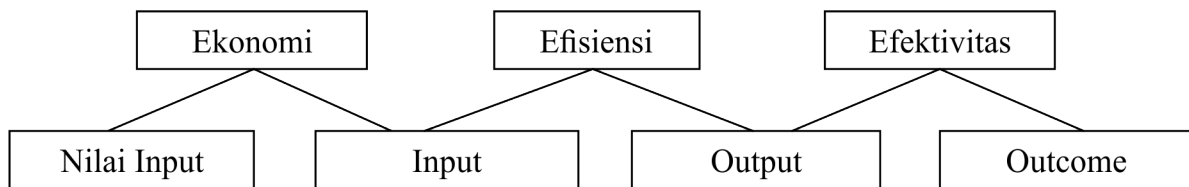
dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

- b. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

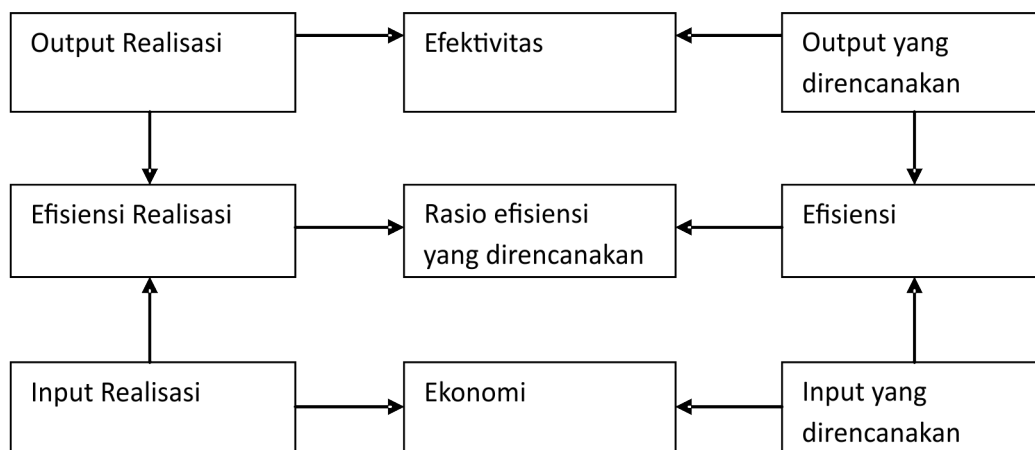
Secara skematis, *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.



Model FEE (*the Federation des Experts comptables Europeens*). Model FEE merupakan model pengukuran kinerja yang mendasarkan pada analisis varian sebagai tergambar melalui diagram berikut:

Model FEE



Sumber: Lapsley dan Mitchell, 1996.

Menurut Mahmudi (2010), Model pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan analisis varian yaitu dengan membandingkan antara *input* dan *output* yang direncanakan dengan *input* dan *output* realisasi. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan rencana dengan masukan realisasi. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi yang

direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana.

Input dalam anggaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukkan batas maksimum jumlah uang yang diperkenankan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Output dinyatakan dalam bentuk penerimaan atau pendapatan yang menunjukkan jumlah uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat dicapai, hal ini sesuai dengan Mardiasmo (2004).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (dalam Wikipedia). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritas daya beli.

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian di atas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun anggaran yakni tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, yaitu membuat deskriptif sistematis faktual dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Saifuddin, 2007). Penelitian ini merupakan penelitian yang secara rinci tentang unit kerja Kabupaten Sleman.

Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menelaah tingkat nilai keekonomisan penerapan anggaran dan sistem anggaran kinerja kabupaten Sleman.

Ekonomi. Menurut Mahmudi (2010), Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang di konsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ukuran ekonomi mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya input (*cost of input*).

Ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Penilaian pencapaian kinerja ekonomi dapat diukur melalui rasio antara masukan rencana (input rencana) dengan masukan realisasi (input realisasi).

$$\text{Rasio Ekonomi} : \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011.

Jenis dan Sumber Data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diambil langsung pada kantor Bappeda Kabupaten Sleman bagian keuangan dan data dari laman pemerintahan kabupaten Sleman.

Alat Analisis. Penelitian ini menggunakan alat analisis model FEE (*The Federation des Experts Comptable Europeens*). Proses manifestasi dalam teknik perhitungan *value for money* dalam hal ekonomi yakni skor *value for money* dihitung berdasarkan ada tidaknya perbaikan kinerja aktual dibandingkan dengan rencananya. Menurut Mahmudi (2010), Pada model pengukuran ekonomi yaitu dengan membandingkan antara *input* dan *output* yang direncanakan dengan *input* dan *output* realisasi. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan rencana dengan masukan realisasi.

Langkah-langkah dalam pengukuran kinerja unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama mengukur pencapaian kinerja ekonomi dengan pendekatan FEE.

Menurut model FEE (model mengukur *value for money* berdasarkan analisis varian). Dalam pengukuran ekonomi, diukur dengan cara membandingkan *input* rencana dengan *input* realisasi. *Input* pada model ini berupa jumlah dana moneter (rupiah) yang dikeluarkan untuk membiayai suatu aktivitas. *Input* yang direncanakan tercermin dalam anggaran yang jika disusun dengan pendekatan kinerja maka jumlah dana yang direncanakan tersebut telah dinilai kewajarannya dengan standard analisis belanja. Dengan demikian, anggaran tersebut telah memperhitungkan harga wajar untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang diinginkan.

- 2) Menghitung rasio ekonomi

Angka ini di peroleh dengan membandingkan *input* rencana (anggaran belanja) dengan *input* realisasi (realisasi belanja). Sehingga rasionya makin baik tingkat keekonomisan pada tingkat kualitas input tertentu dengan standard biaya yang wajar (Mahmudi,2010).

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100 \%$$

- 3) Membuat simpulan tentang berapa jauh pencapaian kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan unit kinerja, yakni dengan cara mentransformasikan ke dalam peningkatan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Ekonomi		
Rasio Ekonomi	Makna	Skor Ekonomi
> 100%	Ekonomis	4
85% - 100%	Cukup Ekonomis	3
65% - 84%	Kurang Ekonomis	2
< 65%	Tidak Ekonomis	1

Sumber : Mahmudi (2010).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan di capai. Untuk mendukung kebijakan ini, perlu di bangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*).

Kajian yang dilakukan adalah pada APBD tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011. Pembahasan dilakukan berdasarkan struktur anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai penyempurna Anggaran Berbasis Kinerja atas dasar pengelolaan anggaran sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002.

Berikut adalah hasil APBD untuk lima tahun anggaran. Struktur APBD tahun 2007 sampai tahun 2011 telah dikomparasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Hasil APBD untuk 5 tahun anggaran Kabupaten Sleman

STRUKTUR APBD	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan	94.896.446.720,00	106.758.631.343,00	128.918.153.263,00	158.530.209.690,15	203.416.683.768,00
Dana					
Perimbangan Lain-lain	615.295.000.000,00	676.230.225.359,00	724.463.105.588,00	737.807.079.540,00	737.072.791.549,00
Pendapatan Yang Sah	65.524.981.600,00	101.347.325.690,00	101.651.966.200,00	195.561.932.827,84	332.094.177.360,00
Jumlah	775.716.428.320,00	884.336.182.392,00	955.033.225.051,99	1.096.899.222.057,99	1.272.583.652.677,00
Belanja					
Belanja Tidak Langsung	554.831.040.343,22	665.822.250.989,00	738.515.507.832,57	826.537.243.022,65	1.000.432.049.436,05
Belanja Langsung	342.007.564.666,60	385.046.179.566,00	400.486.975.131,01	417.749.114.575,00	376.426.981.364,00
Jumlah	896.838.605.009,82	1.050.868.430.555,06	1.139.002.482.963,58	1.244.286.348.597,65	1.376.859.030.800,05
Surplus/Defisit	121.122.176.689,82	166.532.248.163,06	183.969.257.911,59	147.387.126.539,66	104.275.378.123,05
Pembiayaan					
Pengeluaran Daerah	14.395.557.465,00	29.231.216.995,00	29.938.500.000,00	16.738.244.928,40	7.138.000.000,00
Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	166.532.248.163,06	183.969.257.911,59	147.387.126.539,66	104.275.378.123,05
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari gambar struktur APBD Kabupaten Sleman selama lima tahun anggaran pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2007 sampai 2011 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktivitas program-program pembangunan di daerah.

Dari data yang diperoleh langsung dari laman pemerintah kabupaten Sleman dan dilengkapi dengan data dari Bappeda Sleman menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman adalah menyajikan secara transparan kinerja Kabupaten Sleman tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011. Data-data tersebut berisi perencanaan strategis, rencana kinerja, dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sampai seberapa jauh kualitas dan pencapaian kinerja tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011.

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mengukur ekonomi kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari pendekatan FEE. Pada artikel lanjutan yang berkaitan dengan seri artikel penelitian ini akan diuraikan teknik yang dipakai dalam mengukur *value for money* yang lainnya yaitu efisiensi dan efektivitas.

Menghitung Indikator Ekonomi. Dalam hal menghitung Skor Indikator Ekonomi tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011 dilakujan penghitungan mean nilai pencapaian kinerja ekonomi dari pencapaian kinerja ekonomi untuk masing-masing program kegiatan dan maknanya. Berikut ini adalah tabel penghitungan rasio dan makna keekonomisan nilai pencapaian kinerja ekonomi APBD tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011.

Tabel 2
Nilai Pencapaian Kinerja Ekonomi APBD 2007-2011 Kabupaten Sleman.

Tahun	Input Rencana (Rp)	Input Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Skor dan Keterangan
2007	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	119,24	4 dan Ekonomis
2008	1.050.868.430.555,06	906.618.990.410,50	115,91	4 dan Ekonomis
2009	1.139.002.482.963,58	1.016.026.601.135,37	112,10	4 dan Ekonomis
2010	1.244.286.348.597,65	1.131.602.398.904,14	109,95	4 dan Ekonomis
2011	1.376.859.030.800,05	1.278.055.164.511,30	107,73	4 dan Ekonomis
Rata-rata	1.141.570.979.585,23	1.016.883.426.170,73	112,98	4 dan Ekonomis

Data diolah (2014)

Mean nilai pencapaian kinerja ekonomi adalah sebesar 112,98% dapat dikatakan bahwa rata-rata kinerja ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah Ekonomis. Dari hasil perhitungan dan tabel alat ukur kinerja di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2007 sampai 2011 pada tingkat ekonomi dari masukan rencana dengan masukan aktual daerah memiliki kecenderungan Ekonomis dengan tingkat ekonomis lebih dari 100% karena ekonomi masukan rencana dengan masukan aktual daerah tahun anggaran 2007 sampai 2011 diperoleh rata-rata sebesar 112,98%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lestari (2013) di Sleman menunjukkan indikator kinerja keuangan bahwa tingkat ekonomi pengelolaan APBD ekonomis. Penelitian yang sama dilakukan oleh Susanto (2010) dan Woro (2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Menurut Mahsun (2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, hal ini sesuai dengan Sugianto.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan

untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat, DPRD, pemerintah daerah maupun satuan kerja vertikal. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 telah dievaluasi oleh pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil nilai cukup baik. Oleh karena itu Pemkab Sleman berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden RI sebagai juara II tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman tahun 2008 – 2010 nampak dalam angka-angka yang disajikan oleh BPS sebagaiberikut.

Tabel 3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman 2008 – 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
Komponen IPM				
1.	Angka Harapan hidup (tahun)	74,43	74,74	75,06
2.	Angka Melek huruf (%)	91,49	92,19	92,61
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,10	10,18	10,30
4.	Konsumsi riil per kapita (000 Rp)	645,15	646,08	647,84
Indeks IPM				
1.	Kesehatan	82,38	82,90	83,43
2.	Pendidikan	83,44	84,08	84,63
3.	Pendapatan	65,90	66,11	66,52
	IPM	77,24	77,70	78,20
	<i>Reduksi shortfall</i>	2,29	2,05	2,21

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Perbandingan nilai IPM Kabupaten Sleman dengan daerah lainnya di Provinsi DIY dan Nasional tahun 2010 sebagaiberikut.

Tabel 4

Indeks Pembangunan Masyarakat Wilayah/Daerah dan Peringkat		
Wilayah/Daerah	Nilai IPM	Peringkat
Indonesia	61,7	124 (dunia)
Provinsi DI. Yogyakarta	75,77	4 (dari 33 provinsi)
Kulon Progo	74,49	95 (nasional)
Bantul	74,53	94 (nasional)
Gunung Kidul	70,45	297 (nasional)
Sleman	78,20	13 (nasional)
Yogyakarta	79,52	1 (nasional)

Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Masyarakat yang berhasil diraih oleh kabupaten Sleman sampai dengan tahun terakhir yaitu 2010 mencapai 78.20 point, dengan nilai komponen kesehatan 83,43, komponen pendidikan sebesar 84,63 serta komponen pendapatan sebesar 66,52. Komponen pendapatan memiliki nilai yang rendah menunjukkan taraf hidup kemiskinan yang boleh jadi masih besar/tinggi. Dalam kondisi taraf hidup kemiskinan yang tinggi, masyarakat Sleman tetap memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran memperoleh dan mengakses pendidikan yang tinggi.

Nilai IPM tersebut meningkat dibandingkan perhitungan tahun sebelumnya sebesar 77,70. IPM tersebut menempatkan Kabupaten Sleman pada peringkat 13 dari 497 kabupaten dan kota secara nasional. Penggunaan IPM tahun 2010 karena penghitungan IPM yang diperoleh dalam penelitian ini adalah IPM tahun 2010 sebagaimana yang disajikan dalam laman pemerintah kota Sleman (data diakses bulan Februari 2014).

Ada lima misi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yaitu 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat; 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3) meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4) memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta 5) meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Untuk menguatkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, diupayakan melalui promosi peningkatan minat investasi, peningkatan kualitas sarana prasarana pasar tradisional, peningkatan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran, promosi peningkatan daya tarik dan daya saing pariwisata. Berbagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, telah berhasil mencapai sasaran pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan sebesar 3,44%, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tercapai 6,75%, pertumbuhan sektor jasa-jasa tercapai 5,38%, serta meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 18,60%.

Hal yang sangat penting dalam hal meningkatkan ekonomi kabupaten Sleman adalah berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Sujatmika & Suryaningsum (2011) berkaitan dengan tata kelola negara. Tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, disarankan untuk mewujudkan hasil evaluasi

sistem pengendalian intern pemerintah kategori baik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang profesional, mampu mengatasi permasalahan daerah, meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau. Sesuai dengan laporan bupati Sleman (2012) dinyatakan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga dilakukan peningkatan kualitas SDM aparat melalui peningkatan kompetensi pegawai, pembinaan pegawai dengan pemberian penghargaan dan hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011 memperoleh skor empat untuk tingkat ekonomi yang artinya menghasilkan nilai lebih dari 100% dan dikategorikan ekonomis. Yang berarti anggaran tersebut telah memperhitungkan harga wajar untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang diinginkan. Hal ini juga berarti fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat diakses oleh publik dengan baik. Jika dikaitkan dengan IPM memang sesuai yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan mendapat nilai yang sangat tinggi, sementara komponen pendapatan masih sangat rendah.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman memiliki nilai Indeks Pembangunan Masyarakat di atas rata-rata IPM nasional. Namun demikian komponen-komponen nilai IPM yang diraih tidak merata. Gap yang terlalu besar untuk komponen pendapatan disbanding komponen-komponen lainnya. Dalam hal ini komponen pendapatan memiliki nilai yang paling rendah. Dalam kondisi pendapatan reendah, masyarakat Sleman tetap ulet dan peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan daya saing agar komponen pendapatan menjadi seimbang dengan komponen-komponen yang lainnya (pendidikan dan kesehatan).

Seri artikel lanjutan adalah berkaitan dengan penghitungan konsep *value for money* yang lainnya dan mengkaitkan dengan berbagai indeks yang lainnya, misalnya indeks kemiskinan, indeks umur harapan hidup, indeks pembangunan gender, dsb-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2003*, BPS, Jakarta, Juni 2004.

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*, BPS, Jakarta, Januari 2002.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Peta Kemiskinan di Indonesia*, BAPPENAS, Mei 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kebijakan dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Sosial Bagi Masyarakat Miskin*, BAPPENAS, Jakarta, 2004.

-----, Sustainable Social Protection Technical Assistance. Inception Report, Bappenas, ADB and UK Department for Internastional Development, Jakarta, 2004.

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bupati Sleman. Pidato Bupati Sleman Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Akhir Tahun Anggaran 2011 Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). *Pelaksana Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Departemen dalam negeri (2000). *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD*.
- Departemen dalam negeri (2003). *Keputusan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2002 tentang” pedoman penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah”*.
- Karundeng, Valdhe. (2012). *Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Publik dan Perpajakan*. Manado: Universitas Negeri Manado.
- Lapsley .I., Llewellyn,S. And Mitchell,F. (1996). *Cost Management in the Public Sector*, Longman, London.
- Lestari, Tri. Suryaningsum, Sri. Negara, Hari Kusuma. (2013). *Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sleman*. (proses submit).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Moh. (2007). *Akuntansi Sektor Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta: Grava media.

Republik Indonesia, (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Safar, M. Nasir, Dkk.. (2003). *Prosinding Seminar Nasional*. Yogyakarta: Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta UAD Press.

Saifuddin, Azwar. (2007). *Metode Penelitian, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surhayadi, Asep & Sudarno Sumarto, *The Chronic Poor, The Transient Poor and the Vulnerable in Indonesia Before and After the Crisis*, SMERU, Jakarta, Mei 2001.

Susanto, Hery. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 3003 sampai dengan TA 2007*. Mataram: Staf Pengajar Fakultas Ekonomi IKIP Mataram.

www. Pemkab sleman.go.id. diakses 1 Maret 2014 sd 15 Maret 2014

HUBUNGAN PENURUNAN SUKU BUNGA SBI DAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM DAN PERUBAHAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DARI SAHAM-SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BUSRA EFEK JAKARTA

Dwi Soegiarto¹

***Abstract:** Interest Rates Decrease relationship and changes to the Exchange Rate and Stock Price Change Volume Change of Share Trading Company Shares Listed on the Stock Exchange Jakartas. The study focused on companies listed on the JSE due to a decrease in SBI policy issued by Bank Indonesia mainly affects the companies that use the rupiah to fund the company. Given that the factors that can cause changes in stock prices pretty much, in contrast to studies that replicated, this study was developed by inserting the exchange rate as an independent variable, and the volume of shares traded as the dependent variable. Interest rate and exchange rate relationships to stock price and trading volume of shares in Indonesia. Correlation simultaneous testing of all three models is significant, with values below 0.05 F Significance. The amount of weight on the canonical correlation function 1 shows the results of the stock price variable (Y1) of 0.995 and function 2 shows the trading volume variable (Y2) of 0.947. With a variable rate as the most powerful variable correlation as an independent variable that is equal to 0.991. Stock price and trading volume of stocks have a correlation with interest rates and exchange rates.*

Abstrak: Hubungan Penurunan Suku Bunga SBI dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Perubahan Harga Saham dan Perubahan Volume Perdagangan Saham dari Saham-saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakartas. Penelitian difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ karena kebijakan penurunan SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terutama berdampak terhadap perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah untuk mendanai perusahaannya. Mengingat bahwa faktor yang dapat menjadi penyebab perubahan harga saham cukup banyak, berbeda dengan penelitian yang direplikasi, penelitian ini dikembangkan dengan memasukkan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen, dan volume saham yang diperdagangkan sebagai variabel dependen. Hubungan suku bunga dan kurs terhadap Harga saham dan Volume Perdagangan saham di Indonesia. Korelasi secara simultan ketiga model pengujian adalah signifikan, dengan nilai Signifikansi F dibawah 0,05. Besarnya korelasi kanonikal weight pada fungsi 1 menunjukkan hasil variabel harga saham (Y1) sebesar 0,995 dan fungsi 2 menunjukkan variabel volume perdagangan (Y2) sebesar 0,947. Dengan variabel kurs sebagai variabel yang paling kuat korelasinya sebagai variabel bebas yaitu sebesar 0,991. Harga saham dan Volume Perdagangan Saham memiliki korelasi dengan Suku bunga dan Kurs.

Kata Kunci: Suku bunga, Nilai tukar, Harga saham, Bursa Efek.

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: dwi_soegiarto@yahoo.com

PENDAHULUAN

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada awal tahun 2003 masih berada pada tingkat 12,89 %, maka pada akhir Juli 2003 telah berada pada angka 9,1%. Sedangkan perdagangan saham cukup marak, ditandai dengan frekuensi transaksi mencapai 12.880 kali, dengan volume saham yang berpindah tangan sebanyak 781 ribu saham senilai Rp 392,5 miliar (Kompas, 31 Juli 2003).

Penurunan suku bunga SBI ini mempengaruhi tingkat suku bunga perbankan lainnya, baik suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit. Dengan turunnya suku bunga simpanan (tabungan dan deposito) akan mengakibatkan sebagian deposan mengalihkan investasinya ke bentuk yang lain, antara lain ke dalam bentuk saham ataupun obligasi. Demikian pula penurunan tingkat suku bunga kredit akan menyebabkan perusahaan lebih memilih kredit perbankan untuk mendanai perusahaannya daripada menerbitkan saham.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika juga menunjukkan penguatan yang sangat signifikan. Pada awal tahun 2003 nilai dolar Amerika adalah sebesar Rp 8.890,00 sedangkan pada akhir Juli 2003 telah menguat menjadi Rp 8.310,00 (menguat sekitar 7 %). Bagaimana perubahan suku bunga SBI dan penguatan nilai tukar rupiah berhubungan dengan harga saham dan volume perdagangan saham, merupakan sesuatu yang cukup menarik dan menjadi obyek penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ben Amoako-Adu dan Brian Smith pada tahun 2002 yang berjudul "*Analysis of P/E Ratio and Interest Rate*". Penelitian mereka dilakukan terhadap saham-saham yang terdaftar di Toronto *Stock Exchange* dalam rentang waktu tahun 1965 sampai dengan tahun 1997. Berdasarkan penelitian mereka ditemukan bahwa terdapat hubungan kuat yang terbalik antara suku bunga dengan harga saham. Bagaimana hal tersebut berlaku di Indonesia, memerlukan suatu penelitian tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis memandang perlu adanya penelitian tentang hubungan penurunan suku bunga SBI dan perubahan nilai tukar rupiah ini terhadap perubahan harga saham dan perubahan volume perdagangan saham dari saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian hanya difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ karena kebijakan penurunan SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terutama berdampak terhadap perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah untuk mendanai perusahaannya. Mengingat bahwa faktor yang dapat menjadi penyebab perubahan harga saham cukup banyak, berbeda dengan penelitian yang direplikasi, penelitian ini dikembangkan dengan memasukkan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen, dan volume saham yang diperdagangkan sebagai variabel dependen. Pemilihan variabel-variabel ini diantara variabel lainnya yang cukup banyak, disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan peneliti. Apakah pasar saham memberikan reaksi terhadap suatu peristiwa, merupakan suatu studi yang disebut studi peristiwa (*event study*). *Event study* dapat digunakan untuk menguji apakah suatu peristiwa yang dipublikasikan, akan menimbulkan reaksi pada pasar saham. Reaksi pasar biasa ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah terjadi reaksi pasar saham atas adanya peristiwa perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar rupiah.

1. Adakah hubungan antara suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di Indonesia?
2. Seberapa kuat hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di Indonesia?
3. Untuk menganalisis hubungan antara suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap harga

saham dan volume perdagangan saham di Indonesia?

4. Untuk menganalisis seberapa kuat hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di Indonesia?

Penelitian ini bermanfaat terutama, Memberikan pertimbangan kepada investor dan calon investor dalam berinvestasi dengan memahami hubungan antara perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham dan volume perdagangan saham. Menyediakan informasi tambahan bagi penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sejenis..

Seperti halnya komoditi lainnya, mata uang pada dasarnya dapat dianggap sebagai komoditi selain sebagai alat pembayaran. Dengan demikian harga atau daya beli atau nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang negara lain ditentukan oleh hukum pasar melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu perlu untuk memahami faktor apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran satu mata uang. Perubahan nilai tukar antara Rupiah dan *Dollar* Amerika (US\$) dimana Indonesia dan Amerika Serikat melakukan transaksi ekspor dan impor. Permintaan Rupiah ditentukan oleh permintaan barang dan jasa buatan Indonesia oleh orang Amerika. Semakin banyak impor Amerika dari Indonesia maka semakin besar kebutuhan Rupiah untuk membayar impor dari Indonesia. Transaksi impor dari Indonesia juga akan mempengaruhi penawaran US\$, semakin besar impor dari Indonesia berarti penawaran US\$ meningkat, karena semakin banyak US\$ harus ditukar/ ditawarkan terhadap Rupiah untuk membayar impor tersebut.

Sedangkan permintaan US\$ ditentukan oleh permintaan orang Indonesia atas barang dan jasa buatan Amerika Serikat. Semakin banyak permintaan barang dan jasa buatan Amerika Serikat atau semakin besar impor Indonesia dari Amerika Serikat, maka semakin besar permintaan US\$. Ini berarti semakin besar pula penawaran Rupiah untuk ditukarkan dengan US\$ guna membayar impor dari Amerika Serikat. Nilai tukar antara Rupiah dengan US\$ akan menuju keseimbangan baru sesuai dengan arus barang dan jasa diantara kedua negara. Jika ekspor Indonesia ke Amerika Serikat turun maka penawaran US\$ akan turun yang berarti kurva penawaran bergeser. Sedangkan apabila impor Indonesia dari Amerika Serikat meningkat maka permintaan US\$ akan meningkat berarti kurva permintaan akan bergeser. Penurunan penawaran US\$ disertai dengan kenaikan permintaan mengakibatkan nilai tukar Rupiah dengan US\$ mengalami perubahan keseimbangan.

Faktor kedua, yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 1998 mencapai 80% berarti terjadi kenaikan harga barang-barang secara umum sebesar delapan puluh persen. Sementara itu inflasi di Amerika Serikat pada tahun yang sama hanya sekitar 4% berarti daya beli US\$ mengalami penurunan kurang lebih sebesar empat persen. Akibat inflasi yang tinggi di Indonesia tersebut maka orang Indonesia melihat bahwa barang-barang buatan Amerika Serikat menjadi relatif lebih murah. Akibatnya orang Indonesia akan meminta atau mengimpor barang-barang dan jasa buatan Amerika lebih banyak. Impor yang meningkat mengakibatkan permintaan US\$ meningkat untuk membayar impor tersebut. Di sisi lain barang-barang dan jasa buatan Indonesia yang mengalami kenaikan harga sebesar 80% menjadi relatif lebih mahal dari sudut pandang orang Amerika Serikat. Akibatnya permintaan orang Amerika atas barang dan jasa buatan Indonesia turun atau ekspor Indonesia ke Amerika berkurang, barang dan jasa tidak lagi kompetitif dan perolehan devisa US\$ menurun berarti penawaran US\$ turun. Kedua, hal tersebut mengakibatkan Rupiah akan mengalami depresiasi terhadap US\$ sebagai akibat inflasi di Indonesia yang lebih tinggi dibanding inflasi di Amerika Serikat.

Selanjutnya faktor ketiga yang berpengaruh terhadap nilai tukar adalah tingkat bunga. Tingkat bunga deposit secara teoritis mencerminkan tingkat keuntungan riil ditambah dengan tingkat keuntungan premi risiko. Yang dimaksud dengan premi risiko adalah tingkat keuntungan

untuk menutup risiko seperti halnya risiko inflasi, risiko likuiditas dan risiko-risiko lainnya. Dengan demikian apabila inflasi di Indonesia adalah 80% maka tingkat bunga deposito Rupiah secara teoritis harus diatas 80%. Sementara itu apabila tingkat inflasi di Amerika Serikat sebesar 4% maka tingkat bunga deposito US\$ diatas 4%. Tetapi apabila dalam kenyataannya tingkat bunga Rupiah hanya 50% berarti keuntungan riil penabung di Indonesia mengalami penurunan, jika ini terjadi maka pemilik modal tentu lebih senang menanamkan dananya dalam bentuk US\$. Akibatnya permintaan US\$ meningkat karena orang lalu menukarkan Rupiahnya menjadi US\$ untuk didepositokan dalam US\$, sehingga Rupiah akan mengalami depresiasi terhadap US\$. Begitu pula sebaliknya Apabila keuntungan deposito US\$ ternyata lebih rendah dibandingkan dengan Rupiah maka diperkirakan Rupiah akan mengalami apresiasi terhadap, US\$.

Keempat adalah pengharapan pasar atau *market expectation* atas kondisi di masa datang. Apabila pasar berpengharapan inflasi akan tinggi di masa datang, maka pemilik modal akan segera membelanjakan uangnya baik untuk barang-barang *durable* yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga ataupun untuk dibelanjakan/ ditukarkan dalam bentuk mata uang lain yang nilainya stabil. Transaksi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku pasar yang memiliki pengharapan sama bahwa inflasi tinggi semula masih diperkirakan diharapkan akan benar-benar menjadi kenyataan. Dari sudut pandang yang lain, mata uang pada dasarnya tidak berbeda dengan komoditas lainnya yang diperdagangkan, sehingga kesediaan orang untuk mempertahankan atau memiliki suatu mata uang sangat dipengaruhi oleh pengharapan atas nilai mata uang tersebut dimasa datang. Jika diperkirakan nilainya akan mengalami penurunan di masa datang maka orang cenderung untuk mengurangi risiko penurunan nilai dengan cara menukarkannya dengan mata uang lain yang dipandang nilainya relatif stabil. Cara-cara semacam ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang tersebut. Dengan kata lain jika seseorang bermimpi maka mimpinya tinggalah mimpi, tetapi apabila banyak orang atau sebagian besar orang bermimpi hal yang sama maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Pengalaman menunjukkan bahwa depresiasi Rupiah terhadap US\$ juga disebabkan oleh pengharapan pasar tentang kepastian di masa datang.

Reputasi bank sentral dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar. Reputasi bank sentral sering diartikan dengan kredibilitas pimpinan puncak bank sentral. Kemandirian atau independensi pengelola bank sentral dari campur tangan pernetintah. Pelajaran dapat dipetik tatkala *chairman* dari *Federal Reserve (The Fed)* di Amerika yang baru Alan Greenspan dilantik menggantikan Volcker, pada tanggal 2 juni 1987, pasar modal bereaksi dengan nilai tukar dolar dan nilai obligasi merosot tajam. Pada hari itu dolar mengalami penurunan 2,6% terhadap Yen Jepang dan *Treasury bonds* mengalami penurunan 2,3%, secara total penurunan dalam sehari mencapai lebih dari \$100 milyar. Saat itu pasar belum mengetahui kredibilitas Alan Greenspan apakah ia akan terus melanjutkan kebijakan pendahulunya yang gigih mengendalikan inflasi atau sebaliknya justru lebih longgar. Jika ekonomi dilonggarkan maka tingkat bunga akan diturunkan dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran. Tetapi apabila terlalu ekspansif, maka ancaman inflasi akan datang dan berarti akan terjadi penurunan nilai tukar dolar terhadap mata uang lain. Independensi *Bundesbank* dan *The Federal Reserve* sebagai bank sentral di Jerman dan Amerika Serikat sering dijadikan contoh pelajaran yang berharga.

Tabel 1
Perkembangan Kredit Perbankan
(Dalam Milyar)

Rincian	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Bank Persero	73.443	81.333	95.619	110.900	153.266	202.569
Bank Swasta	64.967	90.792	116.401	159.248	168.723	192.076
BPD	3.383	4.099	5.201	7.194	7.539	7.181
Bank Asing/ Camp.	15.377	19.925	25.202	28.783	48.606	75.015
Jumlah	157,710	196.149	242.423	306.125	378.134	476.841

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998.

Sementara itu di Indonesia, sejak kabinet reformasi dibentuk pemerintah menyadari pentingnya bank sentral yang independen, atau bebas dari campur tangan pemerintah, sebagai satu cara untuk menyetatkan sektor perbankan

Memang sebagai salah satu agenda dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, bahwa pemerintah harus melakukan restrukturisasi perbankan nasional untuk menyetatkan industri perbankan. Gubernur Bank Indonesia kemudian tidak lagi dimasukkan sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Memang pada masa krisis ekonomi tengah terjadi, tugas Bank Indonesia menjadi begitu berat karena fakta menunjukkan bahwa dari bank yang ada tidak sehat, lengkap dengan tabel perkembangan sektor perbankan dan *nonperforming loan*.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap nilai tukar adalah intervensi bank sentral di pasar valuta asing. Bank sentral, sebagai pengendali pembayaran pemerintah juga perlu melakukan intervensi, baik melalui mekanisme tingkat bunga ataupun melalui operasi pasar. Apabila dipandang depresiasi Rupiah terlalu besar maka bank sentral dapat melakukan intervensi dengan cara menjual US\$ secara langsung di pasar atau dengan cara menaikkan tingkat bunga. Dan sebaliknya bila Rupiah diperkirakan mengalami apresiasi terlalu tinggi maka bank sentral melakukan intervensi dengan membeli US\$ atau menurunkan tingkat bunga. Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah menggunakan dua alternatif tersebut secara bersama-sama. Pada saat tingkat inflasi hampir mencapai 60% pada bulan juli 1998 dan nilai tukar masih belum stabil, Bank Indonesia mematok bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada tingkat hampir 60%. Tingginya tingkat bunga deposito diharapkan dapat menarik dana masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar turun. Selain itu untuk menyerap modal kerja perusahaan asing yang ada di Indonesia dalam bentuk rupiah, karena memang pada awal krisis perusahaan asing tersebut mengurangi eksposur nilai tukar dengan memperkecil modal kerja dan demonimator Rupiah.

Ada beberapa indikator penting yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal, khususnya bursa efek. Indikator-indikator yang umum digunakan adalah kapitalisasi pasar, likuiditas pasar saham, dan indeks harga saham.

Kapitalisasi pasar adalah total seluruh harga saham (sekuritas) yang dicatatkan di bursa efek. Kapitalisasi pasar ini dapat menggambarkan kemampuan pasar modal dalam menghimpun dana masyarakat bagi pembiayaan investasi jangka panjang. Nilai kapitalisasi pasar berubah-ubah sesuai dengan pergerakan harga saham serta tercatatnya saham-saham baru di bursa efek.

Likuiditas pasar saham menunjukkan kemudahan bagi investor apabila sewaktu-waktu ingin mencairkan sahamnya ke dalam bentuk uang atau ingin mengalihkan pilihan investasinya. Likuiditas pasar diukur melalui tiga indikator, yaitu, frekuensi transaksi, nilai transaksi dan volume transaksi pada tiap periode tertentu. Semakin likuid suatu pasar maka semakin mudah saham-saham ditransaksikan di bursa efek.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ meliputi pergerakan harga untuk saham biasa dan saham preferen. IHSG mulai diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan menggunakan landasan dasar (*baseline*) tanggal 10 Agustus 1982. Karena mencakup seluruh saham yang tercatat di bursa maka kemudian IHSG pada akhirnya menjadi indikator perdagangan saham yang utama di BEJ. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHSG adalah sebagai berikut.

$$\text{IHSG}_t = \frac{\text{Nilai Pasar}}{\text{Nilai Dasar}} \times 100$$

Notasi:

IHSG_t = Indeks Harga Saham Gabungan hari ke-t.

Nilai Pasar = Jumlah lembar tercatat di bursa x harga pasar per lembar dari saham umum dan saham preferen pada hari ke-t.

Nilai Dasar = Jumlah lembar tercatat di bursa x harga pasar per lembar dari saham biasa dan saham preferen yang dimulai dari waktu dasar (10 Agustus 1992).

Dengan demikian IHSG untuk tanggal 10 Agustus 1982 adalah bernilai 100 (nilai ini merupakan indeks dasar). Nilai dasar dari IHSG selalu disesuaikan untuk kejadian seperti IPO, *right issue*, *partial company listing*, konversi dari *warrant* dan *convertible bond*, dan *delisting* (mengundurkan diri dari pencatatan seperti kebangkrutan). Untuk kejadian-kejadian seperti *stock splits*, dividen berupa saham (*stock dividends*), *bonus issue*, nilai dasar dari IHSG tidak berubah, karena peristiwa-peristiwa ini tidak merubah nilai pasar total. Rumus untuk menyesuaikan nilai dasar adalah sebagai berikut.

$$\text{NDB} = \frac{\text{NPL} + \text{NPTS}}{\text{NPL}} \times \text{NDL}$$

Notasi:

NDB = Nilai dasar baru yang disesuaikan.

NPL = Nilai pasar lama.

NPTS = Nilai pasar tambahan saham.

NDL = Nilai dasar lain.

IHSG merupakan cerminan dari minat investasi yang dilakukan oleh masyarakat (investor) pada saham. Sebagai besaran yang dapat mengukur minat investasi, IHSG berfluktuasi, menurut kondisi pasar saham. Apabila IHSG rneningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa harga sebagian besar saham mengalami kenaikan. Harga-harga saham meningkat bila permintaannya naik atau terjadi *excess demand*. Permintaan saham meningkat karena persepsi investor yang menganggap bahwa investasi pada saham relatif lebih *profitable* daripada investasi pada aktiva-aktiva lain. Secara teknis, peningkatan IHSG ini ditandai dengan banyaknya aksi beli saham oleh investor.

Sebaliknya penurunan IHSG menunjukkan bahwa harga sebagian besar saham mengalami penurunan. Harga-harga saham turun bila terjadi *excess supply* pada saham. Kondisi *excess supply* ini terjadi karena persepsi investor yang menganggap bahwa investasi pada saham relatif kurang menguntungkan dibandingkan investasi pada aktiva-aktiva lain. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk saham menurun, yang ditandai dengan banyaknya aksi jual saham.

Investasi pada saham di pasar modal dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kegiatan investasi dipasar modal adalah kondisi makro perekonomian dimana kondisi tersebut tercermin dari indikator-indikator ekonomi-moneter seperti tingkat inflasi, tingkat bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar valas, cadangan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), neraca pembayaran,

kinerja emiten dan sebagainya. Sementara faktor non ekonomi meliputi kondisi politik, tingkat pendidikan masyarakat, rumor dan sebagainya.

Secara teori, investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga, nilai tukar valas, tingkat inflasi dan jumlah uang beredar. Begitu pula investasi saham yang digambarkan melalui pergerakan IHSG. Apabila tingkat bunga naik, maka investor saham akan menjual seluruh/ sebagian sahamnya untuk dialihkan ke dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas risiko, akibatnya IHSG akan turun. Sebaliknya bila tingkat bunga turun, maka masyarakat akan mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih *profitable* dan akibatnya IHSG akan naik. Dengan demikian tingkat bunga akan memberikan pengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

Apabila nilai tukar valuta asing menguat, maka investor saham akan menjual seluruh/ sebagian sahamnya dan dialihkan pada valuta asing untuk kemudian diinvestasikan ke tempat lain. Sebaliknya jika nilai tukar valas melemah, investor akan beramai-ramai membeli mata uang domestik untuk diinvestasikan pada saham, sehingga IHSG akan mengalami peningkatan yang ditandai dengan banyaknya aksi beli saham oleh investor. Dengan demikian nilai tukar valuta asing akan memberikan pengaruh negatif terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa.

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum yang berlaku terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi (Nopirin, 1996 : 174).

Sedemikian pentingnya arti inflasi tersebut sehingga variabel ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian, disamping indikator-indikator ekonomi-moneter lainnya. Kenaikan harga barang dan jasa yang terlalu tinggi dapat mengganggu perekonomian secara luas, menurunkan kepercayaan terhadap rupiah dan akan mendorong perputaran uang lebih cepat. Meningkatnya inflasi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan dapat mendorong meningkatnya suku bunga yang pada akhirnya akan menimbulkan resesi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*overheated*), artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan.

Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang. Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasi. Sebaliknya jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan riil. Dalam kondisi inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan uang ketat dengan meningkatkan suku bunga sehingga masyarakat akan lebih suka menabung dari pada melakukan investasi (Tandelilin, 2001: 212-213).

Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah sebagai berikut.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga dari waktu ke waktu dari tingkat harga umum barang-barang dan jasa yang dibutuhkan kelompok penduduk kota. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Perubahan IHK dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya laju inflasi. Banyak negara termasuk Indonesia menggunakan IHK untuk mengukur laju inflasi, karena umumnya IHK dapat tersedia lebih cepat dibandingkan dengan indikator lainnya

selain itu IHK memiliki cakupan yang lebih luas, karena selain jumlah barangnya lebih banyak juga survei pencatatan harga tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi tersebar di berbagai ibukota propinsi.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indeks yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga dari waktu ke waktu dari barang dan jasa di tingkat harga perdagangan besar produsen atau grosir.
3. Indeks *Implisit Product Domestic Bruto (GDP deflator)*, yaitu indeks yang mempunyai cakupan lebih luas karena meliputi semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada suatu waktu tertentu, sehingga perubahan indeks ini mencerminkan kenaikan tingkat harga-harga umum.

Tingkat bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh pemodal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal. Tingkat bunga merupakan salah satu dari beberapa indikator ekonomi-moneter Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia, dalam rangka mengatur likuiditas peredaran uang di Indonesia antara lain dengan mempergunakan instrumen Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau yang lebih dikenal luas dengan SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto sebagai pengakuan hutang jangka pendek (Bank dan Manajemen, 1994:7). SBI yang diterbitkan umumnya berjangka 7 hari, 14 hari, 28 hari, 91 hari atau 182 hari.

Jumlah uang beredar atau penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat (Sukimo, 2000:143). Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator ekonomi moneter yang juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional.

Terdapat beberapa ukuran jumlah uang beredar yang menjadi indikator ekonomi moneter yaitu

- a. Uang primer (MO), terdiri atas uang kertas dan uang logam yang diedarkan, saldo giro bank dan saldo giro perusahaan pada Bank Indonesia.
- b. Uang kartal, terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku.
- c. Uang giral, terdiri atas rekening giro, simpanan berjangka, dan tabungan dalam rupiah.
- d. Uang kuasi, terdiri atas deposito, simpanan berjangka dan simpanan valas.
- e. MI (uang beredar dalam arti sempit), terdiri atas uang kartal dan uang giral.
- f. M2 terdiri atas, MI dan uang kuasi. M2 disebut uang beredar dalam arti luas yang sekaligus mencerminkan likuiditas perekonomian.

Beberapa ukuran jumlah uang beredar yang paling umum digunakan adalah MI dan M2. Jumlah uang beredar dalam arti sempit sering disebut sebagai *money supply* (MI), yang meliputi uang kertas dan logam yang ada dalam peredaran (uang kartal) dan uang giral (rekening giro) dalam bank-bank umum/ perdagangan, sedangkan jumlah uang beredar dalam arti luas sering disebut sebagai likuiditas perekonomian (M2), yang meliputi MI ditambah dengan uang kuasi (tabungan dan deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing, ditambah giro valas milik masyarakat).

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) merupakan indikator yang bermanfaat karena kadang-kadang M2 memperlihatkan stabilitas yang lebih tinggi daripada MI dan juga telah terbukti menjadi barometer yang lebih baik bagi kesehatan ekonomi.

Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, tentu didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya semacam harga di dalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara ke dua mata uang tersebut. Perbandingan nilai atau harga mata uang nasional tertentu dengan mata uang nasional lain inilah yang sering disebut dengan

nilai tukar atau *exchange rate* (Nopirin, 1996:232).

Nilai tukar (nilai tukar) valuta asing dapat didefinisikan sebagai seunit valuta (mata uang) asing apabila ditukarkan dengan mata uang dalam negeri atau harga mata uang negara asing dalam satuan mata uang domestik. Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Penentuan nilai tukar valas dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu nilai tukar tetap dan nilai tukar fleksibel. Nilai tukar tetap adalah sistem penentuan nilai mata uang dimana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak diubah dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan nilai tukar fleksibel adalah nilai mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran di pasaran valuta asing dari hari ke hari (Sukirno, 2000:197).

Di dalam pasar dari suatu, barang, harga ditentukan pada keadaan di mana permintaan dan penawaran barang mencapai keseimbangan, yaitu jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Dalam pasar valuta asing harga atau nilai tukar valas juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran valas. Pergerakan nilai tukar valas, sama seperti pergerakan harga saham, dapat di bagi menjadi tiga periode.

1. Pergerakan dari hari ke hari (*day-to-day movement*) yang random.
2. Pergerakan jangka pendek yang berkisar dari beberapa hari hingga *trend* yang berlangsung selama beberapa bulan.
3. Pergerakan jangka panjang yang ditandai oleh *trend* naik turun dalam jangka panjang.

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Menurunnya nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan biaya produksi. Menurunnya nilai tukar atau suku bunga agar dapat menjadi lingkungan juga mendorong meningkatnya investasi yang menarik di dalam negeri (Harianto dan Sadono, 1998: 153).

Volume perdagangan saham (*trading volume activity*) dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ saham perusahaan X yang diperdagangkan pada waktu t}}{\Sigma \text{ saham perusahaan X yang beredar pada waktu t}}$$

Selanjutnya dihitung prosentasi perubahan volume saham yang diperdagangkan yang terjadi setiap bulannya. Perubahan yang diamati adalah perubahan volume yang terjadi setiap bulan sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Untuk menghindari bias saham-saham tidur, data yang diambil hanya data saham-saham teraktif, yaitu saham yang masuk dalam LQ-45. Dari 45 saham teraktif tersebut, dipilih saham yang selalu masuk dalam daftar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Banyak penelitian tentang harga saham dilakukan, namun kebanyakan penelitian seakan-akan mengabaikan aspek pengujian terhadap hubungan historikal antara suku bunga dengan harga saham. Suku bunga yang rendah meningkatkan permintaan konsumen dan kredit perusahaan. Demikian pula penurunan suku bunga menyebabkan penurunan biaya modal (*cost of capital*).

Humburger et al. (1972) meneliti tentang pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap perubahan harga saham. Dengan model regresi, dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah uang beredar memiliki dampak terhadap perubahan harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Biwado (2000) adalah menganalisis pengaruh beberapa variabel makro ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta. Variabel makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tingkat bunga SBI, inflasi dan nilai tukar valuta asing (Rp/ US\$). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan secara bulanan. Periode penelitian tersebut adalah bulan Januari 1997 sampai dengan Desember 1999. Alat analisis yang digunakan dalam, penelitian ini adalah regresi linier

berganda dengan prosedur *Ordinary Least Square*. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini.

1. Tingkat bunga SBI secara individu berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Pengaruh variabel ini adalah negatif, besarnya pengaruh variabel ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0.388 yang artinya setiap kenaikan tingkat bunga SBI sebesar 1 satuan (%/tahun) maka IHSG akan bergerak turun sebesar 0.338 % dengan asumsi variabel-variabel lainnya konstan.
2. Inflasi secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di bursa.
3. Perubahan nilai tukar (nilai tukar) rupiah/ dollar AS secara individu berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Pengaruh variabel ini adalah negatif, dengan nilai koefisien sebesar -0,437, yang berarti bahwa bila nilai nilai tukar (rupiah/ US\$) menguat 1 satuan maka IHSG akan turun sebesar 0,437 %. Sebaliknya bila nilai tukar melemah 1 satuan maka IHSG akan naik sebesar 0,437 % dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.
4. Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga SBI, inflasi dan nilai tukar valas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di bursa.

Penelitian yang dilakukan Prihananto (1998) adalah menganalisis bagaimana pengaruh pasar uang dan nilai tukar valuta asing terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta. Pasar uang dalam hal ini diwakili oleh tingkat bunga SBI dan LIBOR (*London Interbank OfferedRate*) dan nilai tukar valas diwakili oleh nilai tukar Rp/ dollar AS. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan prosedur OLS. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan berikut ini.

1. Tingkat bunga SBI secara individu berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dengan koefisien sebesar -37,716 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel-variabel lainnya konstan.
2. Nilai tukar dolar AS secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, dengan koefisien 0,225 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan (rupiah/ US\$) nilai tukar dollar akan meningkatkan IHSG sebesar 0,225 satuan dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.
3. Tingkat bunga internasional (LIBOR) secara individu berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dengan koefisien -153,724 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan (%/ tahun) tingkat bunga internasional akan menurunkan IHSG sebesar 153,724 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Variabel independen yaitu tingkat bunga SBI, nilai tukar ; dolar AS dan tingkat bunga internasional secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di bursa.

Palmer (1990) dan Hoover (1991) menyatakan bahwa terdapat hubungan kausal dua arah antara penawaran uang (*money supply*) dan harga saham, dan kaitan variable penawaran uang dengan pasar saham adalah tingkat suku bunga.

Menurut U.F.Brigham dan J.F.Houston (2001) suku bunga memiliki dua pengaruh terhadap laba perusahaan yaitu sebagai berikut.

- 1) Karena bunga merupakan biaya, maka semakin tinggi suku bunga, semakin rendah laba perusahaan, sementara hal-hal lain konstan
- 2) Suku bunga mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, dan aktivitas ekonomi mempengaruhi laba perusahaan.

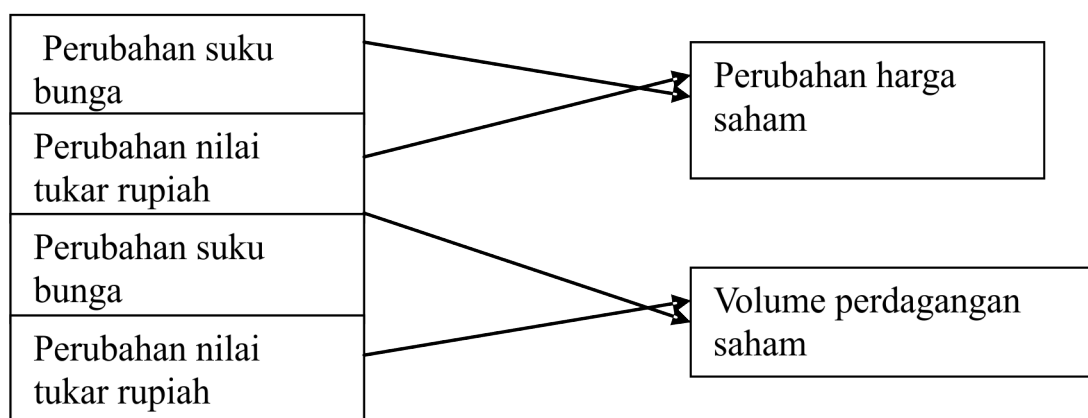
Suku bunga mempengaruhi harga saham karena pengaruhnya terhadap laba, tetapi

barangkali yang lebih penting adalah suku bunga mempunyai pengaruh akibat persaingan di pasar antara saham dan obligasi. Jika suku bunga meningkat, investor memperoleh pengembalian keuntungan yang lebih besar di pasar obligasi. Hal ini menyebabkan investor, menjual sahamnya dan menukarnya dengan membeli obligasi. Sisi penawaran/ *supply* atas saham akan meningkat, sehingga harga saham akan turun, demikian pula sebaliknya. Namun untuk kondisi Indonesia, investor yang bergerak di pasar uang dan pasar modal masih relatif sedikit. Jumlah obligasi yang tersedia di pasar juga masih terbatas. Dengan demikian belum tentu perubahan harga saham akan mengalihkan investor, untuk berpindah ke investasi pada obligasi.

Penelitian Ben Amoako-Adu dan Brian Smith atas saham-saham yang diperdagangkan di Toronto Stock Exchange (2002) menyimpulkan bahwa harga saham turun ketika tingkat suku bunga tinggi. Sebaliknya harga saham (yang ditunjukkan dengan P/E rasio) naik, ketika tingkat suku bunga turun. Penelitian mereka yang berlangsung dari Januari 1965 sampai Juli 1997 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berhubungan secara terbalik (*inversely related*) dengan P/E rasio. Harga saham sangat kuat (98 %) ditentukan oleh deviden, pertumbuhan *earning* perusahaan, dan premi risiko obligasi perusahaan.

Pemisahan antara pasar uang yang terorganisasi dengan pasar uang yang tidak terorganisasi, berdampak antara lain : keterbatasan penggunaan uang giral, terjadinya transaksi tanpa penggunaan uang, banyaknya penyimpanan kekayaan dalam bentuk perhiasan, emas, tanah, rumah, dan sejenisnya, yang secara ekonomi dapat dianggap kurang produktif. Dualisme dalam pasar uang ini berdampak pada keadaan tingkat bunga. Tingkat bunga yang terbentuk lebih diatur oleh pemilik dana daripada oleh pasar. Penentuan tingkat bunga, khususnya di daerah pedesaan, lebih banyak dipengaruhi oleh risiko, biaya administrasi, opportunity cost, derajat kekuatan monopoli. Mengutip pendapat Subrata (1981), Iswardono menyatakan bahwa pengeluaran untuk investasi di negara sedang berkembang pada umumnya bersifat inelastik terhadap tingkat bunga. Hal ini terjadi karena ongkos untuk membayar bunga relatif kecil terhadap total biaya investasi. Dari alasan-alasan di atas, masih diragukan apakah penurunan tingkat suku bunga SBI mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Mengenai perubahan volume perdagangan saham, menurut Beaver (1968 dalam Rini Hidayah dan Hanung T. 2002), merupakan cerminan pengharapan investor secara individual. Berbeda dengan perubahan harga saham, yang merupakan cerminan pengharapan pasar secara agregat. Dalam penelitiannya Rini H dan Hanung T berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum maupun sesudah pengumuman deviden. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pasar saham di Indonesia belum menggunakan informasi tentang pasar saham untuk keputusannya dalam berinvestasi.



Gambar 1.
Kerangka Penelitian

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diperoleh dari paparan sebagaimana diuraikan di depan, penulis berpendapat bahwa perilaku investor di Indonesia belum sepenuhnya sama dengan perilaku investor di negara maju. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. H_{a1} : Diduga suku bunga dan kurs memiliki korelasi terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di Indonesia. H_{a1} : ada $\rho_i \neq 0$
2. H_{a2} : Diduga suku bunga dan kurs memiliki korelasi terhadap harga saham dan volume perdagangan saham di Indonesia secara simultan. H_{a2} : ada $\rho_i \neq 0$

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sampel diambil secara *Judgement Sampling*, yaitu salah satu jenis dari *Purposive Sampling*. Dari keseluruhan data tentang perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta, dipilih data tentang perubahan IHSG dan perubahan volume perdagangan saham antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Metode ini dipilih mengingat penelitian ini ingin mempelajari hubungan antara harga saham dan volume perdagangan saham dikaitkan dengan perubahan nilai tukar rupiah dan perubahan suku bunga SBI. Dengan demikian dipilih saat yang dianggap tepat dan baru, yaitu empat tahun terakhir, setelah krisis keuangan dapat dikatakan mulai mereda.

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari publikasi tahunan *Indonesia Stock Exchange*, publikasi Bank Indonesia, halaman finansial koran Kompas, dari *website* serta publikasi bisnis lainnya. Data tersebut meliputi IHSG, suku bunga SBI, volume saham yang diperdagangkan di BEJ, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Keseluruhannya merupakan data *time series* bulanan mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2011.

a). Harga saham

Perubahan harga saham diambil dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari-hari pengamatan. Dari IHSG harian dilihat berapa persen nilainya berubah antara awal bulan dengan awal bulan berikutnya. Data yang diamati adalah perubahan IHSG sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011.

$$PHS = \frac{(P_1 - P_0)}{P_0}$$

Keterangan

P_1 = Harga Saham awal bulan berikutnya.

P_0 = Harga Saham awal bulan.

b). Volume Perdagangan saham

Volume perdagangan saham (*trading volume activity*) dihitung dengan cara sebagai berikut.

Σ saham perusahaan X yang diperdagangkan pada waktu t

Σ saham perusahaan X yang beredar pada waktu t

Selanjutnya dihitung prosentasi perubahan volume saham yang diperdagangkan yang terjadi setiap bulannya. Perubahan yang diamati adalah perubahan volume yang terjadi setiap bulan sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Untuk menghindari bias saham-saham tidur, data yang diambil hanya data saham-saham teraktif, yaitu saham yang masuk dalam LQ-45. Dari 45 saham teraktif tersebut, dipilih saham yang selalu masuk dalam datar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

c). Tingkat sukubunga SBI.

Diambil dari data yang tersedia pada publikasi Bank Indonesia melalui *websitenya* (www.bi.go.id) dan Informasi Data Perbankan Indonesia. Data yang diamati adalah perubahan tingkat suku bunga yang terjadi setiap bulannya. Data setiap awal bulan dibandingkan dengan data awal bulan sebelumnya, diamati sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011.

$$PSB = \frac{(B_1 - B_0)}{B_0}$$

Keterangan

B_1 = Tingkat suku bunga awal bulan berikutnya.

B_0 = Tingkat suku bunga awal bulan.

d). Perubahan nilai tukar rupiah

Diambil dari data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (US dollar) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia setiap hari. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika setiap awal bulan dibandingkan dengan nilai tukar pada awal bulan sebelumnya. Periode pengamatan sejak Januari 2009 sampai dengan Desember 2011.

$$PNT = \frac{(N_1 - N_0)}{N_0}$$

Keterangan

N_1 = Nilai Tukar rupiah awal bulan berikutnya.

N_0 = Nilai Tukar rupiah awal bulan.

1. Suku bunga adalah perubahan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini diambil mengingat tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh perbankan Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunganya baik suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan (tabungan/ deposito). Data diambil dari *website* Bank Indonesia. Diamati perubahan yang terjadi dari awal bulan sampai awal bulan berikutnya.
2. Harga saham adalah perubahan Indeks Harga Saham Gabungan pada saat pengamatan. Menurut buku panduan perhitungan indeks BEJ, indeks-indeks di BEJ adalah rata-rata tertimbang dari nilai pasar (*market value weighted average price index*). Data diambil dari *website* Bursa Efek Jakarta, diamati perubahan yang terjadi dari awal bulan sampai awal bulan berikutnya. Untuk melihat sektor industri mana yang mempunyai hubungan kuat dan mana yang hubungannya lemah dengan variabel perubahan nilai tukar rupiah dan volume perdagangan saham, diamati pula indeks harga saham masing-masing sektor industri, yang meliputi 9 (sembilan sektor) yaitu : pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, industri konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan.
3. Nilai tukar rupiah adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari daftar nilai tukar valuta asing yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia setiap hari, dilihat perubahan yang terjadi dari awal bulan sampai awal bulan berikutnya.
4. Volume perdagangan saham adalah perubahan aktivitas perdagangan saham dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah saham perusahaan X yang diperdagangkan pada waktu t dengan jumlah saham perusahaan X yang beredar pada waktu t_1 . Mengingat tidak seluruh saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham diperdagangkan setiap hari, bahkan terdapat saham-saham tidur, yaitu saham yang tidak diperdagangkan dalam waktu yang cukup lama, data mengenai volume perdagangan saham diambil dari saham yang aktif diperdagangkan saja. Untuk menghindari bias dari saham-saham tidur dimaksud data tentang volume perdagangan saham diambil dari saham-saham teraktif, yaitu dari saham-saham yang masuk dalam LQ-45. Dari 45 saham teraktif tersebut diambil saham-saham yang selalu masuk dalam daftar LQ-45 sejak tahun 2009 sampai tahun 2011.

Analisis korelasi kanonik adalah alat pengujian penelitian ini, yang menguji pengaruh antara lebih dari satu set variabel independen dengan lebih dari satu set variabel dependen.

Analisis korelasi kanonik melewati lima langkah pengujian untuk memperoleh hasil. Menurut Singgih (2012) proses analisis korelasi kanonik sebagai berikut :

- 1) Menentukan mana yang termasuk variabel independen (set of multiple dependent variable) dan mana yang termasuk dalam kumpulan variabel independen (set of multiple independent variable).
- 2) Menurunkan beberapa canonical functions, yakni korelasi antara set variabel dependen dengan set variabel independen.
- 3) Dari beberapa canonical functions yang terbentuk, akan diuji canonical function yang mana yang bisa digunakan. Pengujian dilakukan dengan uji signifikan, canonical relationship serta redundancy index.
- 4) Dari canonical functions yang digunakan, dilakukan interpretasi hasil dengan menggunakan beberapa metode, seperti canonical weights, canonical loadings atau cross canonical loadings.
- 5) Melakukan validasi atas hasil output tersebut. Validasi biasanya dilakukan dengan membagi dua bagian sampel, kemudian membandingkan kedua hasil yang ada. Jika perbedaan hasil kedua sampel tidak besar, bisa dikatakan korelasi kanonikal adalah valid.

Hair, et al.(1998), memberikan langkah-langkah dalam membentuk analisis korelasi kanonik, yaitu:

a. Menentukan tujuan dan menspesifikasikan masing-masing kumpulan

Variabel Data yang tepat untuk analisis korelasi kanonik adalah dua kumpulan variabel, baik metrik maupun nonmetrik. Diasumsikan bahwa tiap kumpulan dapat diberikan beberapa arti teoritis, setidaknya satu kumpulan dapat didefinisikan sebagai kumpulan variabel dependen dan kumpulan yang lain sebagai kumpulan variabel independen.

b. Menentukan jumlah observasi per variabel dan total ukuran sampel

Sampel yang sedikit tidak akan merepresentasikan variabel dengan baik. Demikian juga sampel yang besar akan memiliki kecenderungan signifikan secara statistik dalam segala hal, namun secara praktik tidak mengindikasikan signifikan. Peneliti diharapkan untuk mempertahankan setidaknya sepuluh pengamatan per variabel.

c. Pengujian Asumsi

Beberapa asumsi pada korelasi kanonik (Santoso, 2010):

1. Adanya hubungan yang bersifat linier (Linieritas) antara dua variabel Neter, et al. (1989) menuliskan bahwa untuk mengetahui ukuran kelinieran dari dua variabel dapat dilihat dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai variabel X. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, jika semua observasi terletak sepanjang garis linier maka koefisien determinasi bernilai 1.

Koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$r^2 = 1 - \frac{SSE}{SSTO}$$

dimana

$$SSE = \text{Jumlah Kuadrat Error} = \sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

$$SSTO = \text{Jumlah Kuadrat Total} = \sum(Y_i - \bar{Y})^2$$

2. Normal Multivariat

Multivariat Normal diperlukan untuk menguji signifikansi setiap fungsi kanonik. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi normal multivariat dilakukan dengan menggunakan software SPSS .

3. Non-multikolinieritas

Pengujian non-multikolinieritas untuk variabel independen dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu membandingkan nilai R²regresi masing-masing variabel independen tersebut dengan R²model. Jika nilai R² regresi masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai R² model, dapat dikatakan terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Jika nilai R² regresi masing-masing variabel independen lebih kecil dari nilai R² model, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen.

d. Memilih Fungsi Kanonik

Maksimum fungsi kanonik yang terbentuk adalah minimum jumlah variabel dalam setiap kumpulan. Penentuan fungsi yang akan dipilih adalah berdasarkan tingkat signifikansinya. Ketika semua fungsi signifikan maka dapat melihat korelasi kanoniknya. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai seberapa besar hubungan yang harus terbentuk, faktor loading mungkin menjadi alternatif dalam menentukan ukuran yang bermakna. Faktor loading lebih besar dari 0,5. Selain hal ini, jika dilihat masih terlalu banyak fungsi yang harus didefinisikan, maka dapat melihat redundancy atau tidaknya. Jhonson dan Wichern, 2002 menyatakan dapat menggunakan ukuran yang terdapat pada analisis komponen utama mengenai keragaman kumulatif dari pasangan variabel kanonik dalam menerangkan keragaman data yang akan dianalisis lebih lanjut yaitu minimum keragaman kumulatif sebesar 80 persen. Dillon dan Goldstein pada tahun 1984 mengemukakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan fungsi kanonik adalah:

Perlunya keterkaitan antara variabel dalam satu himpunan dengan variabel dalam himpunan lainnya dengan cara membentuk variabel-variabel baru (variabelkanonik) yang merupakan kombinasi linier dari variabel asal. Pasangan variabel kanonik dibentuk dari variabel kanonik pertama dari setiap himpunan. Pasangan variabel kanonik yang diinginkan adalah yang mempunyai korelasi maksimum di antara pasangan-pasangan lainnya. Kemudian pasangan variabel kanonik kedua diturunkan sedemikian rupa sehingga mempunyai korelasi yang maksimum yang tidak dihitung oleh pasangan variabel kanonik pertama dan seterusnya.

$$V_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \dots + a_pX_p = a'_iX$$

$$W_1 = b_1Y_1 + b_2Y_2 + b_3Y_3 + \dots + b_pY_p = b'_iY$$

Dimana p adalah banyaknya variabel independen dan q adalah banyaknya variabel dependen. Misalkan r merupakan nilai minimum dari p dan q, maka ada sebanyak r pasangan variabel kanonik. Masing-masing variabel kanonik merupakan kombinasi linier di masing-masing set variabel. Kombinasi linier dari p variabel independen akan berkorelasi maksimum dengan kombinasi linier q variabel dependen. Korelasi (V₁, W₁) maksimum untuk i=1,2,3,...,r. Kombinasi linier dari p variabel independen akan berkorelasi maksimum dengan kombinasi linier q variabel dependen yaitu:

$$\rho(V, W) = \frac{a'S_{xy}b}{[(a'S_{xx}b)(a'S_{yy}b)]^{1/2}}$$

Jika skala pengukurannya berbeda, penggunaan matriks S diganti dengan matriks korelasi

sampel R sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} R_{xx} & R_{xy} \\ R_{yx} & R_{yy} \end{bmatrix}$$

dimana:

R_{xx} = matriks korelasi untuk set variabel X

R_{yy} = matriks korelasi untuk set variabel Y

R_{xy}, R_{yx} = matriks korelasi untuk set variabel X dan Y

Mencari akar ciri (eigenvalue) λ berdasarkan matriks R dengan rumus

$$|R_{xx}^{-1}R_{xy}R_{yy}^{-1}R_{yx} - \lambda I| = 0$$

Setiap akar ciri akan berpadanan dengan vektor cirinya. Dalam pembentukan variabel kanonik, vektor-vektor ciri merupakan koefisien variabel kanonik.

Mencari vektor-vektor ciri berdasarkan akar ciri yang telah diperoleh pada langkah 2 dengan persamaan berikut :

$$(R_{xx}^{-1}R_{xy}R_{yy}^{-1}R_{yx} - \lambda I)\mathbf{a} = 0 \quad \text{dan} \quad (R_{xx}^{-1}R_{xy}R_{yy}^{-1}R_{yx} - \lambda I)\mathbf{b} = 0$$

Vektor ciri a dan b disebut juga sebagai pembobot kanonik (canonical weight). Variabel kanonik yang dapat dibentuk berdasarkan vektor ciri tersebut ada sebanyak minimal (p,q) pasang, sebagai berikut:

$$\begin{matrix} V_1 = \mathbf{a}_1\mathbf{X} & W_1 = \mathbf{b}_1\mathbf{Y} \\ V_2 = \mathbf{a}_2\mathbf{X} & W_2 = \mathbf{b}_2\mathbf{Y} \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ V_p = \mathbf{a}_p\mathbf{X} & W_q = \mathbf{b}_q\mathbf{Y} \end{matrix} \quad \text{dimana } \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ | \\ X_p \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ | \\ Y_p \end{bmatrix}$$

Mendapatkan keragaman data yang dijelaskan oleh setiap pasangan variabel kanonik dengan rumus: $\lambda_i / \sum \lambda_i$. Keragaman kualitatif dari pasangan variabel kanonik dalam menerangkan keragaman data akan dianalisis lebih lanjut. Batasan minimum keragaman kumulatif yang dikemukakan oleh Johnson dan Winchern (2002) adalah 80%.

Melakukan pengujian hipotesis untuk setiap korelasi kanonik:

Bartlett dalam Dillon dan Goldstein menuliskan prosedur untuk menguji signifikansi korelasi kanonik

$$H_0 = \Sigma_{yx} = 0$$

$$H_1 = \Sigma_{yx} \neq 0$$

Bartlett mendefinisikan

$$\Lambda = \prod_{j=1}^M (1 - \lambda_{(j)}) = \frac{|S_{xx}^{-1}S_{xy}S_{yy}^{-1}S_{yx}|}{|S_{yy}|}$$

dimana adalah variabel Wilks' lambda dan $M = \min(m,p)$, dimana m adalah banyaknya variabel independen dan p adalah banyaknya variabel dependen. Aproksimasi khi-kuadrat Bartlett untuk distribusi Λ .

$$X^2 = - \left[(n - 1) - \frac{1}{2}(m + p + 1) \right] \ln \Lambda$$

Hipotesis nol ditolak jika

$$X^2 > X_{\alpha}^2$$

dengan derajat bebas mp . Jika hipotesis nol ditolak, maka pasangan kanonik pertama dihilangkan dari Λ .

Dalam SPSS digunakan empat statistik yaitu Pillais, Hotelling, Wilks, dan Roy's untuk menguji signifikansi semua fungsi kanonik yang terbentuk. Setelah pengujian hipotesis dan fungsi kanonik terbukti signifikan secara statistik, maka selanjutnya dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

e. Menginterpretasikan variabel kanonik

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui keterkaitan Suku Bunga dan Kurs terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham di Indonesia digunakan analisis korelasi kanonik. Sebelum masuk ke dalam tahap-tahap melakukan analisis korelasi kanonik, ada asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi:

Uji Linieritas dilakukan dengan melakukan analisis korelasi-regresi linier dengan berturut-turut menggunakan Suku Bunga dan Kurs sebagai variabel bebas, sedangkan variabel yang lain, yaitu Harga saham dan Volume perdagangan saham digunakan sebagai variabel tak bebas. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 2 Pengujian ini menggunakan taraf nyata 0.05 persen.

Tabel 2
Hasil Pengujian Linieritas

		ANOVA Table					
		Sum of					
			Squ	df	Mean Squ	F	Sig.
volume perdag * kurs	Between Groups	(Combined)	5.107	11	.464	1.654	.149
		Linearity	1.153	1	1.153	4.109	.054
		Deviation from Linearity	3.953	10	.395	1.408	.238
	Within Groups		6.456	23	.281		
	Total		11.562	34			
			Linearity	.960	1	.960	1713.224
Harga saham * kurs	Between Groups	(Combined)	1.093	11	.099	177.225	.000
		Linearity	.132	10	.013	23.625	.000
		Deviation from Linearity	.013	23	.001		
	Within Groups		.013	23	.001		
	Total		1.105	34			
			Linearity	.013	1	.013	177.225

, Berdasarkan, pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa terdapat korelasi linier antara variable dependent dan independent. Ada dua hasil yang perlu kita lihat pertama adalah kolom F-LINEARITY dan kolom F-DEVIATION FROM LINEARITY. F-LINEARITY menunjukkan sejauh mana jika variabel dependen diprediksi berbaring persis di garis lurus. Jika hasilnya signifikan ($p < 0.05$) maka model linier cocok diterapkan pada hubungan model

tersebut. Idealnya semua kasus terletak tepat pada garis lurus sehingga tidak ada penyimpangan (deviasi) kasus dari linieritas. Dengan kata lain deviasi akan sama dengan nol dan sehingga linieritas benar-benar menjelaskan total (gabungan) antara group pada linearity.

Penentuan normal atau tidaknya distribusi data dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut Tabel 3 Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov.

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		kurs	suku bga	Harga saham	volume perdag
N		35	35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.030099	.038521	-.004075	-.101184
	Std. Deviation	.1732823	.1692377	.1803181	.5831511
Most Extreme Differences	Absolute	.398	.387	.465	.123
	Positive	.398	.387	.465	.102
	Negative	-.260	-.317	-.256	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		2.356	2.291	2.752	.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.666

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 3 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov di dapat nilai signifikansi untuk masing-masing variabel bebas di atas 0,05 sehingga data penelitian berdistribusi secara normal.

Uji multikolenearitas menguji akan keeratan hubungan antara variabel bebas. Variabel bebas tidak boleh memiliki korelai yang kuat ($r > 0,9$) sesama variabel bebas. Hasil uji multikolenearitas disajikan sebagai berikut. Pengujian ini menggunakan taraf nyata 0.1.

Tabel 4
Uji Multikolenearitas

Correlations			
Control Variables		kurs	suku bga
Harga saham	kurs	Correlation	1.000
		Significance (2-tailed)	.574
		df	0
suku bga	kurs	Correlation	.574
		Significance (2-tailed)	1.000
		df	.000

Correlations			
Control Variables		kurs	suku bga
volume perdag	kurs	Correlation	1.000
		Significance (2-tailed)	.842
		df	0
suku bga	kurs	Correlation	.842
		Significance (2-tailed)	1.000
		df	.000

Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas yang tidak bernilai di atas 0,9 dengan menggunakan taraf nyata 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak mengandung multikolenearitas

1 Hubungan Suku bunga dan Kurs terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham di Indonesia.

Hasil pengujian dengan analisis korelasi kanonik, mengenai hubungan Suku bunga dan Kurs terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham di Indonesia, yang dilihat melalui nilai signifikansi eigenvalues and canonical correlations.

Tabel 5
Eigenvalue dan Canonical Correlations

Root No.	Eigenvalue	Pct.	Cum. Pct.	Canon Cor.	Sq. Cor
1	9,85940	99,92006	99,92006	,95285	,90791
2	,00789	,07994	100,00000	,08846	,00783

Dimension Reduction Analysis					
Roots	Wilks L.	F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
1 TO 2	,09137	35,77913	4,00	62,00	,000
2 TO 2	,99217	,25241	1,00	32,00	,619

Jika dilihat pada kolom Signifikansi yang menguji fungsi kanonikal terlihat untuk fungsi 1 signifikan pada 0,00, begitu juga dengan fungsi 2 tidak signifikan pada 0,619. Oleh karena fungsi 1 memiliki signifikansi di bawah 0,05 sedang fungsi 2 tidak maka fungsi 1 dapat diproses lebih lanjut sedangkan fungsi 2 tidak. Ini berarti pasangan kanonik yang digunakan adalah pasangan kanonik yang pertama.

Hasil uji simultan pada persamaan fungsi kanonikal. Dengan menggunakan 3 (tiga) metode yang berbeda yaitu Pillais, Hotellings, dan Wilks Roys maka hasil ditampilkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Analysis of Variance

Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = -1/2, N = 14 1/2)					
Test Name	Value	Approx. F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
Pillais	,91574	13,51321	4,00	64,00	,000
Hotellings	9,86729	74,00464	4,00	60,00	,000
Wilks	,09137	35,77913	4,00	62,00	,000
Roys	,90791				
Note.. F statistic for WILKS' Lambda is exact.					

Hasil uji signifikansi secara simultan menunjukkan bahwa ketiga model pengujian adalah signifikan, yang dibuktikan oleh besarnya Sig. of F dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa jika digabung, secara simultan fungsi kanonik yang ada signifikan sehingga dapat diproses lebih lanjut.

Analisis korelasi (canon corr) digunakan untuk mengetahui tinggi-rendah dan arah korelasi antara variabel dependen dengan variabel independent. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui dari besarnya cannon cor pada Tabel 7 yang memuat koefisien korelasi (cannon cor) sebagai berikut :

Tabel 7
Eigenvalue dan Canonical Correlations

Root No.	Eigenvalue	Pct.	Cum. Pct.	Canon Cor.	Sq. Cor
1	9,85940	99,92006	99,92006	,95285	,90791
2	,00789	,07994	100,00000	,08846	,00783

Dimension Reduction Analysis

Roots	Wilks L.	F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
1 TO 2	,09137	35,77913	4,00	62,00	,000
2 TO 2	,99217	,25241	1,00	32,00	,619

Didalam model ini terdapat dua variabel dependent dan 2 variabel independent. Jika diambil jumlah terkecil yaitu dua variabel dependen, maka akan terbentuk dua Fungsi Kanonikal. Dua fungsi kanonikal ini terlihat pada Root No dengan angka korelasi kanonikal (Canon Cor) untuk fungsi 1 adalah 0,9527 dan fungsi dua adalah 0,088. Korelasi kanonikal pertama lebih penting dari korelasi kanonikal kedua. Untuk korelasi kanonikal pertama, "covariate" variabel kanonikal mampu menjelaskan 90,7 % variasi dalam variabel canonical dependent. Korelasi kanonikal kedua menjelaskan variasi sebesar 0,07 %. Kolom Signifikansi yang digunakan untuk pengujian canonical function terlihat untuk fungsi 1 signifikan pada 0,000, namun fungsi 2 tidak signifikan pada 0,619. Oleh karena fungsi 1 memiliki signifikansi di bawah 0,05 maka dapat diproses lebih lanjut sedangkan fungsi 2 tidak. Dengan 0,5 untuk kekuatan korelasi dua variabel, maka fungsi 1 mempunyai korelasi kanonikal di atas 0,5. Dengan demikian fungsi 1 dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah diketahui fungsi kanonikal 1 signifikan langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap canonical variate yang ada pada fungsi 1.

Tabel 8
Pembobot kanonik dan fungsi variable kanonik
Standardized canonical coefficients for COVARIATES
CAN. VAR.

COVARIATE	1	2
bga	,39834	3,09246
kurs	,61451	-3,05685

Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables
Function No.

Variable	1	2
hgsh	1,03549	-,35027
volpd	-,09781	1,08875

Dari tabel yang memuat pembobot kanonik tersebut, diperoleh persamaan fungsi kanonik sebagai berikut: pasangan variabel kanonik (V,W).

$$V = 0,39834 \text{ bunga} + 0,61451 \text{ kurs}$$

$$W = 1,035 \text{ harga saham} - 0,097 \text{ volume perdagangan saham}$$

Canonical variate adalah kumpulan dari beberapa variabel yang membentuk sebuah variate. Dalam kasus ini kita ada dua kanonikal variate, yaitu dependen canonical variates yang berisi dua variabel Y1 dan Y2 serta independend canonical variates, yang berisi 2 variabel independen X1 dan X2. Canonical variates dapat diukur dengan melihat canonical weight dan canonical loading. Uraian akan dimulai dengan melihat hasil perhitungan berdasarkan canonical weight lalu dilanjutkan dengan canonical loadings. Hasil pengujian dengan canonical weight ditampilkan pada Tabel 9 dan 10 berikut.

Tabel 9

Canonical Weight

Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables		
Function No.		
Variable	1	2
hgshm	1,03549	-,35027
volpd	-,09781	1,08875

Correlations between DEPENDENT and canonical variables

Function No.		
Variable	1	2
hgshm	,99599	,08947
volpd	,32043	,94727

Untuk fungsi 1 pada dependen variabel hanya variable harga saham yang angka korelasi di atas 0,5 yaitu 1,035 sedangkan pada fungsi 2 variabel volume perdagangan memiliki nilai korelasi di atas 0,5 yaitu sebesar 1,088.

Tabel 10

Anava

Standardized canonical coefficients for COVARIATES		
CAN. VAR.		
COVARIATE	1	2
bga	,39834	3,09246
kurs	,61451	-3,05685

Tabel 9 menunjukkan bahwa untuk fungsi 1 pada independen variabel hanya satu angka korelasi yang tinggi dan di atas 0,5 yaitu 0,614 yang dimiliki oleh variabel kurs. Sedangkan fungsi ke 2 terdapat dua angka korelasi di atas 0,5 yaitu 3,09246 yang dimiliki oleh variabel bunga dan -3,05685 yang dimiliki oleh variable kurs.

Tabel 11
Canonical Loading

Correlations between DEPENDENT and canonical variables		
Function No.		
Variable	1	2
hgshm	,99599	,08947
volpd	,32043	,94727
Correlations between COVARIATES and canonical variables		
CAN. VAR.		
Covariate	1	2
bga	,98039	,19708
kurs	,99181	-,12775

Untuk fungsi 1 dependen variabel, memberikan satu angka kanonikal loading di atas 0,5 yaitu harga saham dengan loading 0,995. Pada fungsi 2 dependen variabel, memberikan satu angka canonical loading di atas 0,5 yaitu volume perdagangan sebesar 0,947. Nilai untuk variabel independen angka loading di atas 0,5 ada dua pada fungsi 1 dengan yaitu bunga dengan loading 0,980 dan kurs dengan loading 0,991. sedang Fungsi 2 untuk variabel independen angka loading di bawah 0,5.

Didalam model ini terdapat dua variabel dependent dan 2 variabel independent. Jika kita ambil jumlah terkecil yaitu dua variabel dependen, maka akan terbentuk dua canonical function yang terlihat pada Root No dengan angka korelasi kanonikal (Canon Cor) yakni 0,95285. Dari hasil canonical weight maupun canonical loading dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara dependent variate dengan independent variate atau harga saham dan volume perdagangan memang berkorelasi secara bersama-sama dengan bunga dan kurs. Dari keduanya variabel bebas tersebut adalah kurs yang paling kuat korelasinya yaitu $X_1 = 0,991$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Disimpulkan bahwa terdapat adanya hubungan suku bunga dan kurs terhadap Harga saham dan Volume Perdagangan saham di Indonesia. Korelasi secara simultan ketiga model pengujian adalah signifikan, dengan nilai Signifikansi F dibawah 0,05.
2. Besarnya korelasi kanonikal weight pada fungsi 1 menunjukkan hasil variabel harga saham (Y1) sebesar 0,995 dan fungsi 2 menunjukkan variabel volume perdagangan (Y2) sebesar 0,947.
3. Dengan variabel kurs sebagai variabel yang paling kuat korelasinya sebagai variabel bebas yaitu sebesar 0,991.
4. Harga saham dan Volume Perdagangan Saham memiliki korelasi dengan Suku bunga dan Kurs.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penyempurnaan, dengan

menambah luas sampel penelitian dan juga menambah variabel penelitian. Penambahan variabel jumlah uang beredar sebagai variabel bebas yang mempengaruhi harga saham dan volume perdagangan, sangat disarankan penulis untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adu, Ben Amoako dan Smith, Brian, (2002), Analysis of PE Ratio and Interest Rate, *The Journal of Managerial Finance*, Volume 28, November 2002, halaman 48-59.
- Agus Sartono.(2001). Manajemen Keuangan Internasional. Yogyakarta, BPFE.
- Bank Indonesia. (2001). Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta.
- Biwado, Andy Setyo. (2000). Analisis Pengaruh Beberapa Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta. Skripsi S1 UNS.
- Brigham, E.F. dan Daves, P.R. (2002), *Intermediate Financial Management.*, 7th edition, Thomson Learning, South Western, USA
- Cooper, D.R., dan Emory, C.W. (1995), *Business Research Methods, fifth edition*, Irwin
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu, (1998), *Statistik Induktif*, cetakan ke-4, BPFE, Yogyakarta.
- Dittman, (1995), *The effect of business risk on corporate capital structure: Theory and evidence. Journal of Finance*, p.1693-1715.
- Eugene F, Fama, (2000). *Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance.*
- Franco Modigliani and Merton H. Miller, (1963). *The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, American Economic Review.*
- Gudono. (2014). Analisis Data Multivariate. BPFE, Yogyakarta
- Ghozali, Imam, (2011). Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, Anderson, Tatham & Black. (1998). Multivariate Data Analysis. Prentice Hall. Fifth Edition.
- Hariato, Farid , Siswono Sudono. (1998). Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia. Jakarta.
- Hady, Hamdi, (2001), *Valas untuk Manajer*, Cetakan ke-4, Ghalia, Jakarta.

- Hand, John RM, Holthausen, R.W., dan Leftwich, R.W., (1992), The Effect of Bond Rating Agency Announcement on Bond and Stock Prices, *The Journal of Finance*, volume XLVII no.2 1992 halaman 733 –752.
- Hidayah, Rini dan Triatmoko, Hanung, (2002), Pengaruh Pengumuman Perubahan Dividen Terhadap Volume Perdagangan Saham dan Variabelitas Tingkat Keuntungan Saham, *Perspektif*, volume 17 halaman
- Iswardono, (1999), Sukubunga diturunkan, Investasi Akan Meningkatkan ?, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 14, No.2 halaman 34 – 42.
- Megginson, W. L. (1997), *Coorporate Finance Theory*, Addison-Wesley.
- Nopirin. (1996). *Ekonomi Moneter Buku 2*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Prihananto. (1998). Pengaruh Pasar Uang dan Kurs Valuta Asing terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta. Skripsi S1 Brawijaya.
- Reilly, Frank K dan Brown, Kith C, (2002), *Investment Analysis and Portfolio Management, 6th edition*, The Dresden Press, Fort Worth.
- Singgih, Santoso, (2012). Aplikasi SPSS pada Statistik Multivariat. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sunariyah. (2000). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta, YKPN.
- Sukirno, Sadono. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma, (2000), *Research Method for Business : A Skillbuilding Approach*, 3rd edition, John Wiley & Son Inc., New York.
- Tandelilin, Eduardus, (2001), *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

IbM KELOMPOK USAHA BERSAMA “MEKAR SARI”

Wahyu Dwi Artaningtyas¹

Sri Rahayu Budi Hastuti²

***Abstract: IbM Group Joint “Mekarsari”.** Joint Business Group “Mekar Sari” is a small business located in the village Sangubanyu, Purworejo, Central Java. Members of this group consists of a few housewives who are trying to earn their own income through embroidery business. This effort has been running for nearly 25 years, but to date has not shown significant improvement. That is because the various problems they face, such as: lack of capital, modern marketing, as well as the regeneration of the main usaha. Tujuan of programs that run in the science and technology activities for this community is to assist them in overcoming the problems they face. In terms of capital, they helped to make a proposal for capital assistance, while to overcome the problem of lack of raw materials caused by the lack of capital, then formed a kind of co-operatives, as well as the recruitment of new members was held to address the problem of regeneration. In terms of marketing, it has dibuat online store with www.bordirmekarsari.com name, and also to register their products to obtain Trademarks are very important in order to improve their marketing.*

Abstrak: IbM Kelompok Usaha Bersama “Mekar Sari”. Kelompok Usaha Bersama “Mekar Sari” adalah sebuah usaha kecil yang terletak di Desa Sangubanyu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Anggota kelompok ini terdiri dari beberapa ibu rumah tangga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri melalui usaha kerajinan bordir. Usaha ini telah berjalan selama hampir 25 tahun, namun sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut dikarenakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti : kurangnya modal, pemasaran yang modern, serta regenerasi usaha. Tujuan utama dari program program yang dijalankan dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat ini adalah untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal permodalan, mereka dibantu untuk dapat membuat proposal permohonan bantuan permodalan, sementara untuk mengatasi masalah kurangnya bahan baku yang disebabkan oleh minimnya modal, maka dibentuklah semacam koperasi, serta diadakan perekrutan anggota baru untuk mengatasi masalah regenerasi. Dalam hal pemasaran, maka telah dibuat took online dengan nama www.bordirmekarsari.com, dan juga dengan mendaftarkan produk mereka untuk memperoleh Merk Dagang yang sangat penting guna meningkatkan pemasaran mereka.

Kata Kunci: Kerajinan Bordir, Merk Dagang , Regenerasi.

PENDAHULUAN

1 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: artaningtyas@ymail.com

2 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: Rahayubud@yahoo.com

Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang tetap mampu bertahan dan tidak terpengaruh ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia adalah industri mikro dan usaha kecil. Di Indonesia, sektor UKM bahkan menjadi tumpuan kehidupan yang semakin besar sejak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 (Sarosa: 2000).

Kebanyakan industri mikro dan usaha kecil di Indonesia bergerak di sektor informal. Todaro (2004), dalam penelitiannya mengatakan bahwa sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, kepemilikan unit produksi yang bersifat perorangan atau kekeluargaan, tidak adanya pemisahan antara asset keluarga dan asset perusahaan, relatif sederhananya teknologi yang digunakan serta bersifat *labor intensive*.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) “ Mekar Sari ” adalah salah satu bentuk usaha mikro yang berlokasi di desa Sangubanyu, kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo , Jawa Tengah. Usaha ini mulai berdiri tanggal 5 Agustus 1993, dengan jenis bidang usaha bordir dan jahit. Usaha ini telah memiliki SIUP , Nomor 27 / 11.11 / PK / II / 1995, serta surat ijin STDJK Nomor : 74 Kandep / 21 / 2 / III / 1995. Usaha ini dirintis oleh beberapa ibu rumah tangga yang berusaha untuk menambah pendapatan keluarga. Sampai saat ini usaha tersebut walaupun telah memasuki usia yang ke 20 tahun, namun tidaklah begitu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti , pun dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha tersebut.

Modal yang dimiliki oleh KUB “ Mekar Sari ” pada saat usaha ini berdiri adalah sebesar Rp. 5.569.000,00, ditambah dengan 4 mesin juhi, 1 mesin jahit dan 1 mesin obras. Tenaga kerja yang dimiliki pada saat berdiri sejumlah 19 orang . Daerah pemasaran hasil produksi kelompok usaha ini baru dipasarkan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, itupun apabila ada pesanan. Output rata-rata sebesar 200 unit per bulan, dan kesemuanya langsung dipasarkan karena memang bersifat *made by ordered*. (Artaningtyas: 2013)

Kelompok Usaha Bersama ini menghadapi permasalahan sebagaimana yang biasa dihadapi oleh industri mikro, dimana para pengrajin biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Kurangnya ketrampilan khusus ,kurangnya modal, serta masalah pemasaran produk yang telah mereka hasilka, sangat berdampak terhadap produktivitas mereka dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Diperlukan adanya pemberdayaan yang lebih intensif agar usaha ini berkembang dan dapat menjadi andalan sumber penghasilan rumah tangga pengrajin.

Menurut Priyono (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari dua sisi. : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain. (Sriyana : 2010).

KUB “ Mekar Sari “ apabila dikategorikan dalam bentuk usaha termasuk dalam usaha mikro. Sebagaimana berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Indonesia, masalah permodalan menempati urutan pertama yang mendesak untuk dipecahkan. Pemecahan masalah ini akan sangat membutuhkan peran lembaga keuangan seperti perbankan atau pihak –pihak lain yang terkait seperti perusahaan perusahaan dalam kaitannya dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang saat ini menjadi program yang harus dijalankan oleh perusahaan –perusahaan besar.

Beberapa karakteristik yang ada pada UMKM antara lain adalah sebagai berikut (Wibisono Gentur : 2012) :

- Dimiliki oleh individual (bukan badan usaha formal)
- Tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai
- Transaksi bisnis dan pribadi yang tidak terpisah
- Transaksi dilakukan dengan tunai.
- Menggunakan kelebihan dana hasil usaha untuk keperluan di luar bisnis.

KUB “ Mekar Sari “ pun demikian, dalam perkembangannya selama ini, dimana walaupun telah berdiri selama lebih dari 20 tahun, namun baru satu kali mendapatkan bantuan pinjaman permodalan dalam bentuk kredit lunak dari Bank Kredit Kecamatan (BKK). Tidak adanya pihak yang membantu mencoba memberikan pengarahan bagi para anggota KUB untuk mencari tambahan permodalan, menjadikan usaha ini tetap stagnan, jalan di tempat karena terhambat masalah permodalan.

Semakin sedikitnya generasi muda yang tertarik untuk menekuni bidang usaha yang telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun ini, juga membuat kekhawatiran akan terhentinya usaha KUB “ Mekar Sari “. Padahal usaha ini apabila ditekuni, dapat memberikan penghasilan yang lumayan dapat digunakan untuk menambah penghasilan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra program IbM ini sebagai berikut :

- a. Dalam hal produksi, keterbatasan pengetahuan tentang sistem produksi yang efektif yang disebabkan karena sifat individualisme setiap pengrajin yang menjadikan kelompok usaha ini tidak berkembang. Ibarat lidi jika hanya satu maka tidak akan sekuat dan sebermanfaat jika digunakan secara bersama- sama.
- b. Keterbatasan akan metode pemasaran yang efektif.
- c. Masalah regenerasi usaha, dimana semakin berkurangnya minat dari generasi muda yang bersedia untuk melangsungkan usaha tersebut.
- d. Keterbatasan dalam hal permodalan, yang berdampak pada kelangsungan proses produksi.

Target utama yang dijadikan sasaran dalam program ini bukan lagi pada masalah sumber daya manusia yang terbatas, akan tetapi sudah lebih dalam mengacu pada meningkatnya manajemen produksi kelompok usaha. maupun dalam hal manajemen pemasaran hasil produksi. Selama ini mereka hanya memproduksi jika ada pesanan, itupun pesanan secara langsung, tidak ada kekonsistenan dalam memproduksi, hal inilah yang menjadikan usaha ini seperti mati suri selama bertahun – tahun. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari minimnya permodalan yang mereka miliki sehingga menjadikan keterbatasan dalam hal pengadaan bahan

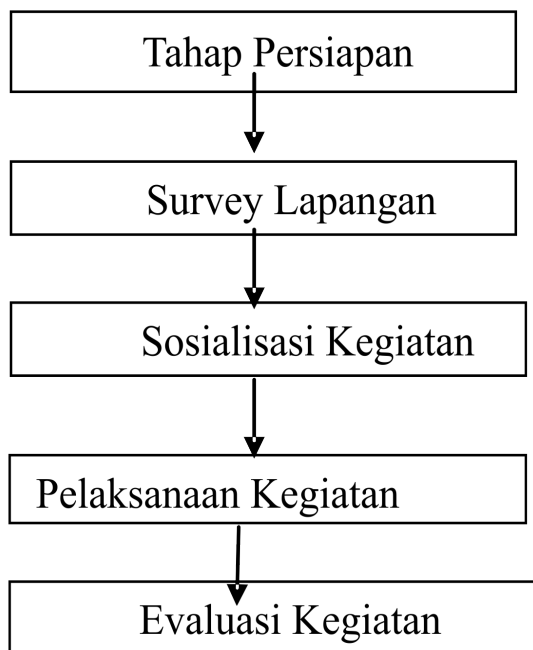
baku serta pengadaan mesin- mesin produksi yang lebih modern.

Target selanjutnya adalah meningkatnya bantuan ataupun pinjaman modal yang dapat diperoleh dari pihak perbankan maupun lembaga keuangan lain serta terutama dari perusahaan yang mempunyai keterkaitan dengan usaha kelompok perajin ini.

Target selanjutnya yang ingin dicapai adalah terjadinya regenerasi bagi terjaminnya keberlangsungan usaha ini, mengingat usaha yang terletak di pedesaan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat berkembang apabila ada generasi penerus yang memiliki wawasan luas dan lebih maju. Sehingga diharapkan dapat juga secara tidak langsung dapat mengatasi masalah pengangguran.

Luaran yang telah dicapai dari program ini adalah dimilikinya web bagi kelompok usaha ini guna mendukung manajemen pemasaran yang lebih modern, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan omzet penjualan. Luaran yang lain adalah berupa meningkatnya bantuan permodalan dari Koperasi “KOMPAYO”, sehingga mampu meningkatkan kapasitas modal yang dapat mereka gunakan untuk produksi. Luaran yang paling penting adalah dimilikinya Merk Dagang (dalam proses penerbitan sertifikat)

Hal – hal yang berkaitan dengan tahapan kerja dan metode analisis dijelaskan dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar Tahapan Kerja IbM

Diawali dengan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan survey untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan- permasalahan yang dihadapi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan sosialisasi program, kemudian direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan program, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program. Evaluasi pelaksanaan program dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program serta untuk menentukan apakah masih diperlukan pendampingan tahap lanjut.

METODE

Di tahap awal kegiatan IbM ini , diawali dengan berbagai persiapan di kampus , pada tanggal 10 Mei 2014. Dari hasil survey itulah berbagai permasalahan yang ada didapatkan, sehingga dapat dirumuskan solusi bagi pemecahan masalah tersebut. Persiapan utama yang dilakukan adalah berupa persiapan berbagai perlengkapan pendukung kegiatan, dan juga materi materi sosialisasi program IbM ini bagi masyarakat khususnya anggota KUB “ Mekar Sari “. Kegiatan sosialisasi yang pertama kali dilakukan adalah dalam bentuk pertemuan dengan pengurus inti KUB “ Mekar Sari “ yang dalam hal ini terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Dari pertemuan tersebut disepakati kapan waktu pelaksanaan program IbM . Kegiatan selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2014 adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pemasaran berbasis internet. Dalam hal ini KUB “ Mekar Sari “ telah memiliki 1 unit laptop bantuan dari warga, namun karena dirasa masih kurang maka perlu ditambah peralatan laptop lagi yang dilengkapi dengan modem untuk dapat akses internet. Diharapkan dengan dikuasainya internet , mereka dapat terus melakukan update terhadap model serta variasi bordir sehingga dapat bersaing dengan produsen lain.

Kegiatan pertama yang dilakukan guna mendukung terwujudnya metode pemasaran berbasis internet, tentu saja adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini berupa pengadaan satu unit notebook, sebagai tambahan sarana yang telah dimiliki sebelumnya. Setelah laptop tersedia maka kebutuhan selanjutnya yang harus dipenuhi adalah modem serta quota internet yang memang selama ini belum dimiliki oleh KUB ini. Diterimanya dengan baik program IbM oleh semua anggota KUB “ Mekar Sari “ ini tentu saja sangat menentukan bagi keberhasilan atau tercapainya target dan tujuan utama dari program IbM ini. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah persiapan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang manajemen produksi.

Selama ini, keluhan utama anggota KUB “ Mekar Sari adalah dalam mendapatkan bahan baku utama bagi output mereka yaitu berupa benang bordir. Dalam pengadaan bahan baku , walaupun mereka sudah terwadahi dalam suatu Kelompok Usaha Bersama, namun rasa individual mereka masih cukup besar, mereka terkadang harus membuang waktu dan juga biaya hanya demi mendapatkan benang di pasar yang letaknya relatif jauh dari tempat tinggal mereka. Secara ekonomi hal ini tentu saja sangat merugikan, karena sebenarnya mereka dapat menghemat waktu dan juga biaya seandainya ada kios benang yang juga terletak di lokasi yang sama yang akan mensuplai berbagai macam kebutuhan bahan baku bagi industri bordir tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut , maka pengusul program , memberikan solusi berupa didirikannya Kios Benang “ Mekar Sari “. Persiapan awal yang dilakukan untuk membuka kios benang tersebut adalah berupa pembelian sejumlah alat jahit , bordir dan terutama benang bordir , demi menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan bagi KUB “ Mekar Sari “. Mulai tanggal 23 Mei 2014, walaupun belum semua jenis benang dapat terbeli , namun setidaknya dapat membantu dalam pengadaan bahan baku.

Sistem penjualan yang diterapkan di Kios Benang Mekar Sari ini adalah sebagai berikut : harga jual untuk satu cone benang bordir merk “ Double Penguin “ dijual dengan harga yang sama apabila mereka membeli di pasar . Perbedaannya adalah, untuk setiap satu cone benang yang mereka beli, maka itu berarti mereka telah menyisihkan sebesar Rp 500,00 rupiah sebagai tabungan di kios benang. Tabungan tersebut dapat diambil oleh peserta yang bersangkutan setahun sekali yaitu pada saat menjelang lebaran, Sementara keuntungan dari harga pokok pembelian akan dimasukkan di koperasi kios benang yang dapat dipergunakan sebagai dana simpan pinjam maupun untuk menambah stock benang yang dijual.

Kegiatan selanjutnya setelah berdiri kios benang , dan dalam rangka mengatasi permasalahan di bidang manajemen pemasaran adalah persiapan pembuaan metode pemasaran berbasis internet dengan jalan membuat web bagi KUB “ Mekar Sari “. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dibutuhkan persiapan berupa pembelian alat laptop, printer dan juga modem beserta quota internet . Semua keperluan tersebut dapat dipenuhi pada tanggal 29 Mei 2014. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan tersedia , maka dengan meminta bantuan jasa dari “SKI “ web Design, maka saat ini KUB “ Mekar Sari “ telah memiliki web toko online yaitu www.bordirmekarsari.com

Setelah setidaknya sedikit demi sedikit pengetahuan pengurus KUB tentang internet dan web bertambah , maka kegiatan selanjutnya yang penting adalah bagaimana mereka dapat memasarkan produk mereka secara lebih intensif dan lebih menarik , dan yang tak kalah penting adalah bagaimana metode pemasaran tersebut efektif dalam meningkatkan omzet penjualan mereka.

Persoalan tersebut diatasi dengan mengadakan pelatihan Manajemen Pemasaran selama dua kali yaitu pada tanggal 28 Mei dan 31 Mei 2014. Pelatihan ini berisi tentang bagaimana metode pemasaran yang efektif, khususnya metode pemasaran berbasis internet. Seperti kita ketahui saat ini begitu banyak metode pemasaran berbasis internet baik itu dengan dimilikinya blog maupun dimilikinya website.

Bisnis berbasis internet adalah bisnis berdasarkan atas kepercayaan, maka dalam pelatihan ini selalu ditekankan pada para pengrajin untuk tetap dan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pembeli. Jangan sekali kali mengecewakan mereka baik dari segi ketepatan waktu pengerjaan dan waktu pengiriman barang, maupun dari sisi kesesuaian produk yang dikirim dengan pesanan.

Pelatihan ini juga memberikan pengetahuan bagi mereka bagaimana menampilkan produk secara lebih menarik , sehingga dapat berkompetisi dengan usaha lain yang menjual produk yang sama. Kerajinan bordir yang selama ini menjadi acuan atau tolok ukur bagi kerajinan bordir KUB “ Mekar Sari “ adalah bordir Tasikmalaya. Studi banding juga pernah dilakukan oleh KUB ini ke sentra pengrajin bordir Tasikmalaya, dan dibiayai oleh Disperindakop Kabupaten Purworejo. Namun studi banding yang mereka lakukan seakan menjadi sia sia karena tidak ada pendampingan lebih lanjut dalam hal manajemen produksi dan manajemen pemasaran yang efektif. Studi banding itu hanya menjadi sebuah pelesiran saja tanpa hasil yang jelas.

Pembukaan toko online www.bordirmekarsari.com dilakukan pada tanggal 29 Mei 2014 dengan mengundang semua anggota KUB “ Mekar Sari “. Kepada mereka dijelaskan apa manfaat dengan dimilikinya website toko online bagi mereka. Areal pemasaran yang menjadi tak terbatas dimensi ruang dan waktu juga dijelaskan pada mereka. Semua anggota diminta untuk menyerahkan contoh hasil karya mereka untuk kemudian diupload di website. Konsekuensi bagi pemasaran berbasis internet ini adalah kesiapan mereka untuk dapat bekerja dengan cepat dan mampu mengikuti perkembangan model sesuai dengan permintaan konsumen.

Selama ini anggota KUB “Mekar Sari” hanya memproduksi apabila ada pesanan saja, tidak pernah mempunyai persediaan hasil produksi dalam jumlah banyak. Hal ini tentu saja akan menjadi kendala yang sangat berarti apabila mereka sudah masuk dalam era pemasaran berbasis internet. Kendala ini bukan tanpa alasan, mengapa mereka tidak menyediakan stok atau persediaan produk untuk dipasarkan. Keterbatasan modalah yang menjadi alasan utama mereka.

Permodalan yang relatif kecil, mengingat usaha ini dilakukan oleh para ibu rumah tangga, membuat mereka enggan dan tidak mau menanggung resiko apabila produk yang telah mereka hasilkan tidak laku di pasaran atau tidak ada yang memesan. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan kegiatan program IbMini membantu mengatasi permasalahan tersebut

Permasalahan di bidang terbatasnya permodalan diatasi dengan tidak begitu saja memberikan mereka modal secara cuma-cuma, tetapi ibarat kita memberi kail bukan memberi ikan. Para pengurus KUB “Mekar Sari” diberikan pengetahuan dasar tentang pembukuan sederhana yang dimaksudkan agar usaha mereka menjadi lebih bankable. Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pelatihan penyusunan pembuatan proposal bantuan permodalan.

Berbicara mengenai permodalan, maka permodalan yang dimiliki oleh KUB” Mekar Sari “ dapat dikatakan sangat minim sekali. Mereka hanya memiliki modal dari setoran yang diberikan oleh para anggotanya untuk setiap prosentase tertentu dari hasil produk para anggota yang berhasil terjual. Tidak ada permodalan tetap yang dapat digunakan untuk memperbesar usaha. Memang mereka pernah menerima bantuan permodalan dalam bentuk kredit lunak dari PT. Primisima Yogyakarta di tahun 2005, dan kredit dari Bank Kredit Kecamatan.

Kredit dari PT. Primisima yang mereka terima merupakan bagian dari dana Corporate Social Responsibility dari PT. Primisima. Kredit tersebut kemudian dihentikan oleh perusahaan dengan alasan KUB “Mekar Sari” berada di luar wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu saja berdampak cukup besar terhadap keberlangsungan usaha kerajinan bordir ini.

Pada program hibah IbM ini, pelaksana program berusaha membantu mereka dalam hal mengatasi masalah permodalan yaitu dengan jalan membantu mereka menyusun proposal pengajuan bantuan permodalan pada pihak-pihak terkait baik itu pada lembaga keuangan maupun kepada perusahaan-perusahaan dalam kaitannya dengan CSR. Alhasil, bantuan permodalan berupa kredit lunak berhasil didapatkan yaitu dari Koperasi “KOMPAYO” dengan pinjaman sebesar 25 juta untuk jangka waktu pengembalian selama 2,5 tahun. Pelatihan penyusunan proposal bantuan permodalan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 14 Juni dan 20 Juni 2014, yang diberikan oleh Bapak Dr. Ir. Harry Budiharjo S, selaku Ketua Pengawas Koperasi “KOMPAYO” yang telah memberikan bantuan permodalan pada KUB “Mekar Sari”.

Dimilikinya web toko online membawa konsekuensi kesiapan para pengrajin dalam memenuhi permintaan konsumen. Apabila hanya mengandalkan tenaga kerja yang saat ini menjadi anggota KUB, maka akan mengalami masalah dalam ketepatan waktu pelayanan pada konsumen, mengingat sebagian besar anggota adalah ibu-ibu yang telah berusia 50 tahun ke atas.

Masalah regenerasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, karenanya pada kegiatan IbM ini juga dilakukan semacam pencangkokan bagi generasi muda yang bersedia bergabung dan masuk menjadi anggota KUB. Mereka adalah yang nantinya diharapkan menjadi ujung tombak dalam menerima dan mengerjakan pesanan dalam jumlah banyak dan butuh waktu pengerjaan yang cepat.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan bordir bagi para anggota baru yang baru saja masuk menjadi anggota agar dapat menghasilkan produk yang bagus dan halus sebagaimana bila dikerjakan oleh anggota yang telah lama menekuni kerajinan bordir. Pelatihan diberikan oleh anggota senior KUB kepada anggota baru. Sebagai ganti atas waktu yang hilang, kepada anggota senior diberikan kompensasi atas waktu mereka memberikan pelatihan dan atas sewa mesin yang digunakan oleh para anggota baru selama mereka menjalani kursus bordir. Setiap paket kursus dilakukan selama sepuluh kali pertemuan dan diberikan oleh tiga pelatih.

Kepada para anggota baru tersebut diadakan pelatihan dasar-dasar bordir dan bordir lanjutan. Pelatihan diberikan oleh anggota yang telah senior, dengan harapan hasil, baik motif maupun tingkat ketelitian serta tingkat kehalusan pekerjaan yang selama ini menjadi ciri khas dari bordir Sangubanyu tetap dapat terjaga dengan baik. Pelatihan secara resmi diadakan selama tiga sesi yaitu tanggal 3, 5 dan 7 Juni 2014. Setelah tiga hari tersebut, mereka diperbolehkan menggunakan mesin bordir yang telah ada di KUB, yang merupakan bantuan

dari Disperindagkop kabupaten Purworejo. Status penggunaan tersebut adalah pinjam sewa dimana untuk setiap bulannya mereka wajib mengisi ke kas KUB sebesar Rp 1.000,00. Mereka juga diwajibkan untuk setidaknya menyetorkan hasil produk yang mereka hasilkan ke KUB agar sewaktu waktu ada kunjungan atau acara pameran, maka sudah siap dengan produk produknya. Setelah kegiatan pelatihan selesai, pendampingan terhadap para pengrajin bordir ini tetap terus dilakukan sampai batas waktu berakhirnya program IbM ini. Di akhir program diadakan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program IbM ini.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah program IbM ini dilaksanakan, hasil yang didapatkan mulai tampak terasa, yaitu :

- a. Meningkatnya produktivitas para pengrajin karena kemudahan dalam memperoleh bahan baku, sehingga dapat dengan cepat memenuhi permintaan konsumen.
- b. Meningkatnya kemampuan dalam membuat proposal bantuan permodalan.
- c. Meningkatnya jumlah pesanan dari luar daerah melalui pembelian online.
- d. Meningkatnya jumlah generasi muda yang bergabung dalam usaha kerajinan border.

Dimilikinya MERK Dagang, membuat kelompok ini berencana melakukan difersifikasi produk tidak hanya dengan produk border saja, tetapi pada item lain yang menjadi hak merk bagi usaha ini, seperti kerajinan Smok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan hibah Ipteks bagi Masyarakat (IbM) adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya kios benang Mekar Sari memberikan manfaat yang cukup besar bagi anggota, mereka dapat menghemat waktu dan juga biaya untuk memperoleh bahan baku utama produk mereka.
2. Dimilikinya website toko online memberikan dampak yang cukup berarti bagi semakin dikenalnya produk mereka ke luar daerah sehingga dapat memperluas pangsa pasar.
3. Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen pemasaran , menjadikan mereka lebih mau untuk berkreasi tidak hanya monoton baik dalam hal desain maupun dalam kombinasi warna.
4. Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen pemasaran , menjadikan mereka lebih mau untuk berkreasi tidak hanya monoton baik dalam hal desain maupun dalam kombinasi warna.

DAFTAR PUSTAKA

- Artaningtyas dan Budi Sri (2013), *Peningkatan Pengetahuan Tentang Pembukuan Sederhana Guna Mendukung Usaha Yang Lebih Bankable Serta Peningkatan Kemampuan Penggunaan Teknologi Komputer Guna Meningkatkan Omzet Usaha Kain Bordir Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Mekar Sari” Desa Sangubanyu, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.*
- Priyono, Edy, (2004), *Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan*, dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2004.
- Sarosa, Wicaksono, (2000), “Menyoroti Sektor Informal Perkotaan,” Research and Development Director Urban and Regional Development Institute (URDI) diakses pada 7 Agustus 2004 dari <http://www.urdi.org/urdi/bulletin/volume-12a.php> .
- Sriyana, Jaka (2010),” Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : studi Kasus di kabupaten Bantul”, makalah dalam Simposium Nasional 2010 : Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif, Purworejo.
- Todaro, P Michael, Smith c. Stephen (2004), *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUMBERARUM
KEC. MOYUDAN KAB. SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI *INTEGRATED RURAL TOURISM (IRT)***

Eny Endah Pujiastuti¹
Isbandi Sutrisno²
Didik Indarwanta³
Muh. Edy Susilo⁴

***Abstract: Rural Community Empowerment Desa Sumberarum Kec. Moyudan Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Through Integrated Rural Tourism (IRT).** Sumber Arum empowerment of rural communities through the development of rural tourism, based on the concept of integrated rural tourism (IRT). How to empower people so that the activities can take place in a sustainable manner is to do a good accompaniment when KKN PPM running or after KKN PPM is completed. As a solution to overcome the problems outlined programs: Empowering people's economic, social and cultural empowerment, empowerment tourist village environment, creation of an atmosphere conducive village through good governance..*

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberarum Kec. Moyudan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Integrated Rural Tourism (IRT). Pemberdayaan masyarakat desa Sumber Arum melalui pengembangan desa wisata, dengan berdasarkan konsep integrated rural tourism (IRT). Cara pemberdayaan masyarakat agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan adalah dengan melakukan pendampingan baik saat KKN PPM berjalan ataupun setelah KKN PPM selesai. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut tertuang Program-program : Pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemberdayaan sosial budaya, Pemberdayaan lingkungan desa wisata, Penciptaan suasana desa kondusif melalui good governance.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Integrated Rural Tourism.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil rembung desa atau diskusi dengan anggota kelompok masyarakat yang tergabung dalam BKM Arum Mandiri menyadari bahwa Desa Sumber Arum memiliki potensi baik dibidang budaya, kerajinan maupun pertanian. Oleh karena itu keberadaan pariwisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah disadari oleh masyarakat Desa Sumber Arum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, dan pemerintah desa yang mempunyai

1 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email: eny_endah@yahoo.co.id

2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email: isbandi_sutrisno@yahoo.com

3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email: didik_indarwanta@yahoo.co.id

4 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email: muh_edy_susilo@yahoo.co.id

komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pemerintah Desa Sumberarum, bersama segenap elemen masyarakat berupaya untuk membangun Desa Sumberarum menuju Sumber arum Mukti Wibawa yang direpresentasikan pada RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) yang berbasis pada Komunitas, sebagai acuan untuk membangun Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman melalui tiga pilar utama yaitu; Industri Rumah Tangga, Pertanian dan Pariwisata. Untuk memulai hal tersebut, Pemerintah Desa Sumberarum bekerja sama dengan masyarakat dalam wadah BKM ARUM MANDIRI telah memutuskan tiga titik lokasi yang ditetapkan sebagai skala prioritas yaitu;

1. Pembangunan Kios sebagai sentral ekonomi serta Penataan Kawasan Industri Tenun di Padukuhan Pingitan,
2. Pembangunan Sentra Kandang Ternak terpadu di Padukuhan Karanganjir, Pembangunan KAWASAN WISATA TERPADU yang meliputi Kolam renang, Taman bermain, Lintasan Trail di Hutan Wisata, dan Gardu pandang Sungai Progo, yang kesemuanya terletak di Padukuhan Sejati Pasar

Adapun potensi yang ada di wilayah desa Sumber Arum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a. Potensi budaya :
Potensi budaya yang ada adalah memiliki warisan budaya seperti kegiatan bersih desa, keramahan dari masyarakat desa.
- b. Potensi alam
Kondisi lingkungan di Desa Sumber Arum masih sangat alami hembusan udara yang sejuk, rindangnya berbagai jenis tanaman, riuhnya suara ocehan burung di alam bebas, ramahnya penduduk desa bisa dijumpai di sepanjang jalan Desa Sumber Arum, sementara di sisi yang lain hamparan sawah, yang sudah dikelola dengan system yang baik oleh penduduk memberi warna keindahan tersendiri Desa Sumber Arum. Selain memiliki lingkungan yang masih alami, Potensi sektor kehutanan Desa Sumberarum adalah pada jenis tanaman kayu jati dan mahoni, yang merupakan hutan milik Desa terletak ditanah kas Desa seluas 2 ha, dan tanaman jati yang ada dipekarangan milik masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah desa Sumberarum. Di Desa Sumberarum juga terdapat tempat wisata Religius bagi umat Katholik yaitu Sendang Jatiningsih.
- c. Potensi pengembangan ekonomi
 1. Potensi yang dimiliki antara lain banyaknya usaha rumah tangga di desa Sumber Arum antara lain : tenun, besek, anyaman tikar, kurungan ayam, mebel, tempe, snack, telur asin, jamu, jok, minyak kelapa, nata de coco.. Tenun dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi desa setempat
Sesuai dengan program kerja pemerintah desa Sumber Arum untuk mewujudkan desa Sumber Arum sebagai desa wisata maka pemerintah desa dan masyarakat berusaha untuk mewujudkan dengan mengelola potensi yang dimiliki. Akan tetapi dalam memulai untuk mewujudkan program tersebut muncul beberapa permasalahan yang dapat menggagalkan terwujudnya program tersebut. Adapun permasalahan yang muncul sebagai berikut :
 - a. Desa wisata
 1. Pemerintah desa belum memahami bagaimana mewujudkan desa wisata
 2. Pemerintah desa belum memiliki rencana/master plan untuk desa wisata
 3. Belum memiliki produk wisata yang akan di tawarkan ke wisatawan yang berbeda desa wisata lain
 4. belum adanya jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata

5. Potensi alam seperti hutan wisata dll belum dikelola dengan baik
- b. Pemerintah desa
 1. Potensi desa belum terdata dengan rapi sehingga pada saat dibutuhkan mengalami kesulitan
 2. Belum adanya pengelola desa wisata
 3. Belum adanya konsep pengembangan desa wisata
 4. Belum terbentuknya iklim kondusif untuk menciptakan desa wisata
 5. Belum terbentuknya kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif Kepariwisata di desa Sumber Arum
 6. Belum dipemetakannya potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata
 - c. Sosial dan Budaya
 1. Budaya khas dari desa Sumber Arum sudah lama tidak di publikasikan atau tidak dilakukan lagi seperti bersih desa dll
 - d. Pengembangan ekonomi
 1. Kios sebagai sentral ekonomi serta Penataan Kawasan Industri Tenun di Padukuhan Pingitan akan tetapi belum di manfaatkan sebagai sentra distribusi dan promosi usaha terpadu.
 2. Industry rumah tangga belum berkembang karena masih minim pengetahuan mengenai manajemen
 3. Belum adanya kelompok atau forum komunikasi antar pemilik usaha rumah tangga
 4. Belum optimalnya usaha ekonomi produktif
 5. Keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha
 - e. Lingkungan
 1. Adanya pencemaran air karena limbah dari rumah tangga sehingga kualitas air menurun
 2. Beberapa lokasi dijadikan TPS liar, sampah belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

Solusi penyelesaian permasalahan yang ada adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa Sumber Arum melalui pengembangan desa wisata, dengan berdasarkan konsep integrated rural tourism (IRT). Cara pemberdayaan masyarakat agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan adalah dengan melakukan pendampingan baik saat KKN PPM berjalan ataupun setelah KKN PPM selesai. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut tertuang Program sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat
2. Pemberdayaan social budaya
3. Pemberdayaan lingkungan desa wisata
4. Penciptaan suasana desa kondusif melalui good governance

Mitra dalam kegiatan ini adalah Desa Wisata Penting Sari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY. Adapun pengelola desa wisata adalah Bapak Doto Yogantoro. Desa wisata Penting Sari merupakan desa wisata no. 1 di DIY saat ini. Inilah desa wisata di daerah Kabupaten Sleman yang tidak pernah sepi pengunjung pada setiap bulannya. Para pengunjung berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dari Jakarta, Riau hingga Kalimantan. Selain dari pengunjung dalam negeri, wisatawan dari manca negara juga tertarik pada desa wisata ini, mereka berasal dari Eropa, Asia dan Amerika. Keunggulan desa wisata ini karena memiliki 3 aspek yang sangat diandalkan. Antara lain keunikan alamnya, sistem kerja dan pemberdayaan masyarakat. Selain keanekaragaman vegetasi yang tetap dilestarikan, keberadaan pancuran, kali serta bebatuan sebagai kekayaan alam menambah desa wisata ini sangat recommended

untuk dikunjungi wisatawan. Obyek wisata yang ditawarkan di desa Pentingsari adalah sebagai berikut :

1. Pancuran Suci Sendangsari
2. Luweng
3. Rumah Joglo
4. Wisata Alam
5. Batu Dakon
6. Batu Persembahan
7. Ponteng
8. Jalur Traking

Pada tanggal 28 September 2012 di Jakarta, Ketua kelompok sadar wisata Desa Wisata Pentingsari dengan disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menandatangani komitmen untuk melaksanakan kode etik kepariwisataan dunia. Pernyataan yang bisa dikutip adalah : kami, Kelompok sadar wisata pentingsari menyatakan komitmen kelompok kami untuk mematuhi dan melaksanakan kode etik kepariwisataan dunia, dengan mengedepankan butir-butir yang paling terkait sebagaimana tersebut di atas. Pada tanggal 1 Oktober 2013 di Bali, ketua kelompok juga menandatangani sebuah komitmen, bahwa desa wisata Pentingsari akan mengikuti atau mengimplementasikan UNWTO Global Code of Ethics for Tourism.

Desa Sumberarum yang berada sekitar 5 Km arah barat Kecamatan Moyudan dan 20 Km arah barat laut ibukota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah Desa Sumberarum dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Sumberarum berada pada 125 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2225 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 17-41° C. Dengan kondisi iklim yang demikian maka banyak ditemukan areal persawahan di hampir seluruh bagian Desa Sumberarum.

Secara administrasi Desa Sumberarum terletak di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Desa Sendangmulyo, batas sebelah selatan yaitu Desa Sumber Rahayu, sebelah barat dengan Kabupaten Kulom Progo, dan sebelah timur dengan Desa Sumberagung, Moyudan, Sleman. Wilayah Desa Sumberarum terdiri dari 16 padukuhan yang terdiri dari 76 RT (Rukun Tetangga) dan 35 Rw (Rukun Warga), yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 bekas kelurahan lama. Kelurahan Lama tersebut yaitu Kelurahan Lama Puluhan, Kelurahan Lama Jitar Dukuh, Kelurahan Lama Sejati, dan Kelurahan Lama Sermo

Struktur perekonomian Desa Sumberarum terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan, peternakan dan Kehutanan. Untuk sektor perikanan didominasi di Wilayah Padukuhan Jetis, Puluhan dan Jitar Dukuh, Jenis ikan yang dipelihara berupa Gurameh, Bawal, Nila dan lele. Sektor peternakan terdiri dari peternakan sapi potong, kambing, domba, bebek/itik/puyuh, ayam, dan burung. Potensi sektor kehutanan Desa Sumberarum adalah pada jenis tanaman kayu jati dan mahoni, yang merupakan hutan milik Desa terletak ditanah kas Desa seluas 2 ha, dan tanaman jati yang ada dipekarangan milik masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah desa Sumberarum. Sedangkan untuk sektor pertambangan pada Desa Sumberarum terdapat pertambangan pasir dan batu kali, terletak di wilayah padukuhan Jitar Ngemplak seluas 2 ha, padukuhan Sejati Desa seluas 5 ha, padukuhan pakelan 1,5 ha.

Kegiatan perekonomian yang terdapat di Desa Sumberarum di antaranya, kelompok simpan pinjam sebanyak 20 kelompok dengan keanggotaan mencapai ratusan orang. Selain itu, terdapat berbagai macam usaha kelontong yang tersebar di padukuhan – padukuhan sewilayah desa sumberarum. Dalam bidang industri terdapat industri tenun, anyaman bambu, industri pasir semen. Kegiatan tersebut masih menyebar di wilayah masing-masing.

Dilihat dari jenisnya, di Desa Sumberarum terdapat berbagai jenis sarana dan prasarana perekonomian. Dari Koperasi Simpan Pinjam, Kredit Union, Warung, Toko hingga Pasar Desa. Sarana-sarana ekonomi tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk di Desa Sumberarum sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumberarum.

Desa Sumberarum adalah sebuah desa, yang terletak di sudut / pojok; selatan-barat dari wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini di bawah kepemimpinan Bpk. H. Senaja, Pemerintah Desa Sumberarum, bersama segenap elemen masyarakat berupaya untuk membangun Desa Sumberarum menuju **Sumberarum Mukti Wibawa**. Sekarang sudah dibuat rencana ke depan Wajah Desa Sumberarum melalui RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) yang berbasis pada Komunitas, sebagai acuan untuk membangun Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.

Desa Sumber Arum memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu

a. Budaya

Perspektif budaya masyarakat di Desa Sumberarum masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Sleman masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Keraton Kasultanan maupun Pakualaman yang ada di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat..Penduduknya yang ramah.Desal Sumberarum memiliki tempat Ziarah umat Katolik yaitu Sendang Jati Ningsih yang terletak di padukuhan Jitar Kulon Sumberarum, Moyudan, Sleman. Penduduknya yang ramah. Penduduk setempat berperan secara efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang arah pengembangan desa Sumber Arum sebagai desa wisata.

b. Alam

Desa Sumberarum mempunyai potensi obyek wisata Alam yaitu disepanjang tepi sungai progo, Kolam renang, Taman bermain, Lintasan Trail di Hutan Wisata, dan Gardu pandang Sungai Progo.

c. Industri

Adanya usaha rumah tangga di desa Sumber Arum antara lain : tenun, besek, anyaman tikar, kurangan ayam, mebel, tempe, snack, telur asin, jamu, jok, minyak kelapa, nata de coco.. Tenun dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi desa setempat

Pengelolaan obyek wisata secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman secara optimal, serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar Desa Sumberarum. Di Desa Sumberarum juga terdapat tempat wisata Religius bagi umat Katholik yaitu Sendang Jatiningsih. Menurut data, tidak kurang dari 20.000 orang setiap tahunnya orang berziarah ke tempat tersebut

Pada tahap pelaksanaan ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Model konsep yang di gunakan adalah mengacu pada model pengembangan desa wisata yaitu IRT. IRT mengacu pada konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan alternatif dalam menekankan pendekatan bottom-up yang melibatkan pemangku kepentingan lokal terpusat dalam mengejar dan yang didasarkan pada fisik lokal, ekonomi,sumber daya sosial, dan budaya (Mitchell dan Weaver 2005). Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model pariwisata perdesaan yaitu Integrated Rural Tourism (IRT), menurut pusat studi pengembangan model pariwisata pedesaan (<http://www.p2par.itb.ac.id>). yaitu pendekatan pariwisata perdesaan terpadu yang harus dapat; (1) memanfaatkan

dengan optimal sumber daya alam, ekonomi, dan sosial budaya lokal, sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya tersebut; (2) memberdayakan masyarakat lokal pada setiap tahap pengembangan pariwisata perdesaan; (3) mendorong terwujudnya keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata perdesaan; (4) membuka peluang dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kemitraan/kolaborasi antar pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pariwisata perdesaan; (5) memberikan manfaat yang luas, tidak hanya kepada masyarakat dan sumber daya lokal, tetapi juga kepada sistem perdesaan yang lebih luas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohim (2013), langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, kabupaten Gunung Kidul DIY yaitu pertemuan/sarasehan, pendampingan, bantuan modal, pembangunan sarana prasarana, pembentukan organisasi desa wisata, kerja bakti dan pemasaran. Pendekatan yang dikembangkan oleh peneliti maupun hasil kegiatan pengabdian terdahulu dan telah dimodifikasi oleh penulis.

METODE

Kegiatan KKN PP PPM sudah berjalan sejak bulan April, setelah pengumuman penerimaan proposal KKN PPM. Berdasarkan mahasiswa yang daftar ulang maka jumlah peserta KKN PPM sebanyak 152 mahasiswa yang berasal dari program studi ; Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, Teknik Perminyakan.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kesepakatan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dukuh, maka dukuh yang akan dikembangkan adalah Dukuh Pingitan dan Dukuh Jitar Kulon. Desa wisata yang akan dikembangkan adalah berbasis Budaya dan Pertanian.

Target dan luaran serta indicator keberhasilan program KKN PPM yang telah di capai berikut ini :

Ketercapaian dari Target / Luaran :

1. Perbaiki sistem :
 - Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province;
 - meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing desa
 - Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis UMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata
2. Peningkatan partisipasi masyarakat
 - Meningkatnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa wisata
 - Meningkatnya partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata
 - Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan
 - meningkatnya kualitas sumber daya manusia pengelola desa wisata
 - meningkatnya kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata
 - menguatnya kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata
 - Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan
 - meningkatnya kualitas sumber daya manusia pengelola desa wisata
 - meningkatnya kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata

- menguatnya kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program menengah yang dikembangkan masyarakat lokal
 - menguatnya kualitas produk wisata meningkatnya pengemasan produk wisata.
 - Terbentuknya strategi pemasaran desa wisata
 - Terbentuknya strategi komunikasi pemasaran terpadu di UKM
3. Peningkatan Produksi
- terbentuknya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Desa Sumber Arum yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa
 - meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
 - meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah
4. Peningkatan swadaya
- Adanya komitmen dari masyarakat untuk mengembangkan desa wisata

Program KKN PPM yang telah selesai dilaksanakan serta apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat mewujudkan capaian hasil yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur (seperti kenaikan income percapita, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan peningkatan umur harapan hidup).

Pemerintah mengembangkan pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan untuk memperoleh devisa dan penghasilan non migas. Manfaat dari pariwisata yang dikembangkan adalah menciptakan serta memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan pariwisata di DIY adalah dengan mengembangkan destinasi wisata baru yang sehingga bisa memberi variasi produk wisata. Desa Sumberarum mempunyai keinginan untuk mengembangkan sebuah desa wisata. Untuk mewujudkan keinginan tersebut salah satu yang dilakukan adalah merintis adanya desa wisata melalui KKN PPM.

Program KKN PPM yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta menekankan kepada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat (individu, kelompok) memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (menurut Parso et al, dalam Suharto, 2009). Program KKN PPM dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat karena dengan pendekatan ini penulis anggap lebih memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi dan lebih diterima oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini merupakan bagian penting untuk mengembangkan pariwisata, karena di harapkan masyarakat lebih bertanggung jawab dan rasa memiliki terhadap desa wisata yang akan dikembangkan. Pendekatan pembangunan Desa wisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata dan pemahaman bahwa produk wisata merupakan proses rekayasa sosial masyarakat merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pada komunitas atau masyarakat (community based development).

Pengembangan desa wisata terdiri dari beberapa bagian yang perlu dikembangkan, salah satu yang mendukung berkembangnya desa wisata adalah dengan mempersiapkan masyarakat desa Sumberarum berkaitan dengan langkah-langkah :

1. Persiapan desa bersama para perangkat desa: menentukan tempat dan waktu, koordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, mengumumkan kepada masyarakat tentang rencana untuk mengkaji keadaan desa,
2. Analisis potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh desa Sumberarum

3. membuat rancangan strategi pemasaran desa wisata.

Adapun hasil dari kegiatan KKN PPM berkaitan dengan :

A. Pengembangan pola pikir.

Pengembangan pola berpikir yang dimaksud adalah :

1. Ada kesadaran dari masyarakat setempat tentang potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan agrowisata. Bahwa memang ada sesuatu yang khas, yang diperkirakan dapat menarik bagi kalangan wisatawan.
2. Ada kehendak dari masyarakat setempat bahwa potensi itu harus dikembangkan
3. Semangat dari masyarakat untuk membentuk pengelola desa wisata

B. Sarana dan Prasarana

1. Kalitas jalan yang baik menuju desa Sumberarum
2. Mempersiapkan rumah-rumah penduduk sebagai tempat penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam sehingga nantinya memiliki homestay
3. Mempersiapkan masyarakat setempat untuk mampu membuat cendramata yang khas dari kawasan itu.
4. ketersediaan rambu-rambu/petunjuk arah
5. memiliki air bersih
6. ada nya listrik
7. jaringan telpon
8. jarak tempuh dari pusat kota yang pendek

C. Strategi pemasaran wisata

Berdasarkan hasil survey potensi desa wisata, maka desa Sumberarum :

1. Memiliki daya tarik di sumber daya alam, daya tarik budaya dan daya tarik di industri kreatif.
2. Kebijakan pengembangan desa wisata berbasis pedukuhan yaitu Dukuh Jitar Kulon dan Pingitan
3. Produk wisata yang bisa dikembangkan dengan adanya budaya jathilan, musik rebana, ketoprak, musik tek tek, UKM (tenun, besek, kuda lumping), alam (bumi perkemahan, hutan), trekking, menikmati keindahan alam
4. Membuat komunikasi pemasaran untuk mempromosikan potensi wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung
5. Desa sumberarum bisa memberikan kenyamanan seperti udara yang bersih dan sejuk, bebas dari bau yang mengganggu, bebas dari kebisingan, tidak ada lalu lintas yang mengganggu.

D. Kelembagaan Desa wisata

1. Penyiapan desa wisata dengan merancang pengelola desa wisata

Langkah-langkah yang dilakukan di atas oleh KKN PPM memang harus dilakukan karena Desa wisata tergantung pada berbagai sumber daya yang dimiliki alam dan budaya, infrastruktur yang terkait, dan fasilitas interpretatif, serta penyediaan akomodasi, makanan, minuman, dan barang-barang. Hasil dari kegiatan KKN PPM yang lain adalah menganalisis kondisi dari sarana prasarana, aksesibilitas, dan daya tarik maka Desa Sumberarum layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai. Daya tarik suatu lokasi kawasan wisata merupakan alasan yang utama para pengunjung untuk mengunjungi ke lokasi wisata dalam rangka melakukan kegiatan wisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat Sumberarum, melalui Integrated Rural tourism, dan permasalahan riil yang ada di wilayah Sumberarum Moyudan Sleman, dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan KKN PPM ini bahwa :

1. Tata cara kehidupan dan penghidupan serta budaya masyarakat tradisional perdesaan yang masih kental, seperti keramah tamahan dari masyarakat
2. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas yang cukup memadai
3. Ada kesadaran dari masyarakat setempat tentang potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan desa wisata.
4. Ada kehendak dan partisipasi dari masyarakat setempat bahwa potensi itu harus dikembangkan
5. Desa wisata yang akan dikembangkan adalah desa wisata berbasis budaya dan pertanian, adapun dukuh yang akan dikembangkan adalah Dukuh Jitar dan Dukuh Pingitan.
6. Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KKN PPM sudah bisa menumbuhkan kesadaran serta keinginan untuk mengembangkan dukuh Jitar Kulon dan dukuh Pingitan serta pemerintah desa untuk segera mengembangkan desa wisata.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk dapat mewujudkan desa wisata di Desa Sumberarum adalah :

1. Menyediakan sarana prasarana seperti toilet untuk wisatawan
2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumberdaya manusia masyarakat sekitar agar kualitas pelayanan terhadap wisatawan dapat lebih optimal.
3. Mengoptimalkan potensi alam sosial dan budaya serta peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan variasi atraksi dari Desa Sumberarum menjadi produk wisata guna menarik kunjungan wisatawan.
4. Menjalin kerjasama dengan dengan pemerintah setempat untuk membantu pengembangan potensi untuk pengembangan desa wisata tersebut
5. Menyusun pengelola desa wisata di dukuh Jitar Kulon maupun dukuh pingitan, agar segera mewujudkan desa wisata yang akan dikembangkan
6. Mempersiapkan berbagai paket-kegiatan di kawasan desa wisata itu, dan menyepakati biaya yang harus dibayar oleh wisatawan.
7. Mempersiapkan lokasi untuk menjual cendramata bagi wisatawan
8. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk lebih memperhatikan lagi program optimalisasi desa yang memiliki potensi pariwisata.
9. Menggali dan meningkatkan potensi dusun-dusun lain disekitarnya, dan mengintegrasikannya denan potensi Pingitan serta Jitar Kulon.

DAFTAR PUSTAKA

- Cawley, Mary, Desmond A. Gillmor, (2007), *Integrated Rural Tourism, : Concepts and Practice*, *Annals of Tourism Research*, Vol. 35, No. 2, pp. 316–337, 2008.
- Koddeng, Baharuddin, (2007), *Pengembangan Kawasan Pariwisata (Tepian) Makasar sebuah Praxis :Waterfront Development Concept*, *RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas* Volume 4 No. 1, April.
- Kusuma, Ika, Permanasari, (2011), *Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)*, Tesis, UI.
- Prabawati , Hemas Jakti Putri¹ dan Asnawi Manaf, (2013), *Faktor- Faktor Keberhasilan Pengembangan desa Wisata di dataran tinggi Dieng*, *Jurnal Teknik PWK* Volume 2 Nomor 3.
- Rohim,Abdur, (2013),*Pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan desa Wisata (studi di desa wisata Bejiharjo,Kecamatan Karangmojo,kabupaten Gunung Kidul,Yogyakarta, Skripsi,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- Sukmana, Oman, (2010), *Konsep Pemberdayaan masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas berbasis Lokal (Studi di Desa Wisata Bunga Sidomulyo,Kota batu,Jawa Timur, Humanity, Volume 6, Nomor 1, September.*
- Weaver, D. (2005). *Comprehensive and Minimalist Dimensions of Ecotourism. Annals of Tourism Research* 32:439–455.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional Tahun 2010 – 2025.
- Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata ITB, *STUDI PENGEMBANGAN MODEL PARIWISATA PERDESAAN*, <http://www.p2par.itb.ac.id>.

UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI: PENJELASAN TEORI *SLIPPERY SLOPE*

Dwi Ratmono¹

Abstract: Efforts to Improve Compliance with Tax Payers Personal: Explanation Theory Slippery Slope. *The purpose of this study is to develop and examine tax compliance model for individual taxpayers. Based on slippery slope theory, this study proposes hypothesis that severe tax sanctions (more than mild ones) can communicate to society that sanctioned behavior is morally unacceptable. Thus, this research argues that particularly authorities who enact the sanction procedures in a fair manner stimulate compliance with their decisions. This study examines the moderating role of procedural fairness in the positive effect of sanction on tax compliance. This interactive effect of sanction size and procedural fairness on compliance should thus be mediated by trust of the tax authority. A laboratory experiment from 40 individual taxpayers in Semarang city supports for these hypotheses. This study concludes that trust in authorities forms an important mediating variable to the effectiveness of sanction and procedural fairness as tools to enhance tax compliance.*

Abstrak: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Penjelasan Teori Slippery Slope. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengembangkan model kepatuhan bagi wajib pajak pribadi dengan menggunakan desain eksperimental. Berdasarkan teori slippery slope, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa sanksi pajak yang berat (daripada yang ringan) dan diberikan melakukan melalui prosedur yang adil akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menguji peran moderasi keadilan prosedural pada pengaruh positif sanksi pada kepatuhan pajak. Pengaruh interaksi besarnya sanksi dan keadilan prosedural pada kepatuhan dihipotesiskan dimediasi oleh kepercayaan pada otoritas pajak. Penelitian ini telah mengumpulkan data dengan melakukan eksperimen terhadap 40 orang wajib pajak di Kota Semarang. Data penelitian dianalisis dengan ANOVA dan regresi sebagai alat pengujian hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai mediasi pengaruh denda dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini mendukung beberapa argumen teori slippery slope. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka disusun model yang menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, denda, keadilan prosedural, kepercayaan terhadap otoritas pajak.

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, email: dwi_ratmono@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menghadapi masih rendahnya penerimaan dari sektor perpajakan khususnya yang bersumber dari wajib pajak pribadi. Masalah ini mengkhawatirkan karena pajak merupakan penyumbang terbesar APBN untuk mendanai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Fuad Rahmany selaku Dirjen Pajak menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan optimalisasi kebijakan peningkatan penerimaan pajak (www.bloomberg.com, 28 Februari 2013). Fuad Rahmany menyatakan bahwa Ditjen Pajak, sebagai otoritas yang berwenang, akan meningkatkan pemeriksaan secara masif terhadap wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan (tax evaders) dan meningkatkan denda pajak.

Namun, kebijakan di atas dapat bertentangan dengan literatur dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel economic deterrence (pemeriksaan dan denda pajak) hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan (enforced tax compliance). Dalam jangka panjang, kebijakan dengan menggunakan pemeriksaan dan denda pajak ini akan kurang efektif karena tax ratio yang tinggi hanya dapat tercapai jika telah ada kepatuhan pajak sukarela (Kogler et al., 2013; Kirchler et al., 2008). Oleh karena itu, otoritas pajak seharusnya juga mempertimbangkan variabel psikologi-sosial yang cenderung dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance). Berdasar masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran variabel tingkat denda pajak, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

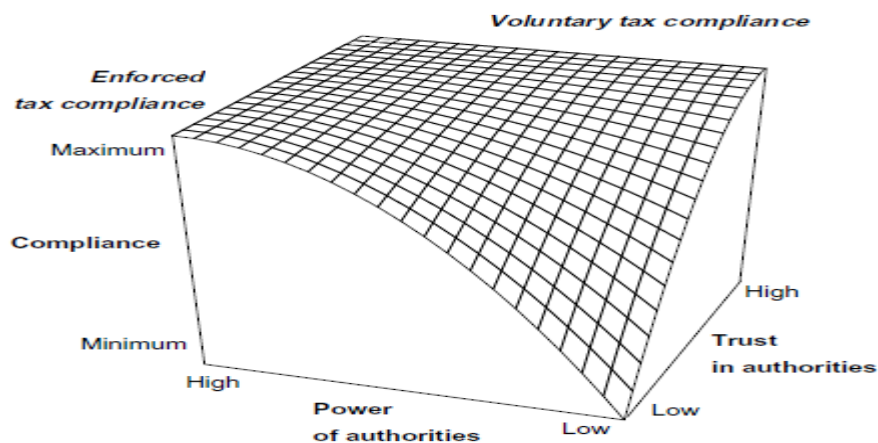
Penelitian ini urgen karena mempunyai kontribusi dalam beberapa hal berikut:

- a. Pemerintah Indonesia menghadapi masih rendahnya penerimaan dari sektor perpajakan khususnya yang bersumber dari wajib pajak pribadi. Masalah ini mengkhawatirkan karena pajak merupakan penyumbang terbesar APBN untuk mendanai kegiatan pembangunan. Masalah rendahnya tax ratio diperparah dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dengan banyaknya kasus korupsi perpajakan oleh aparat pajak sendiri. Selain itu, ancaman krisis ekonomi global juga berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan (www.tribunnews.com, 16 Oktober 2012).
- b. Pemerintah perlu menyusun kebijakan perpajakan yang inovatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kebijakan perpajakan Indonesia selama ini masih bertumpu pada variabel-variabel economic deterrence seperti pemeriksaan dan denda pajak. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi kurang efektif karena hanya meningkatkan enforced tax compliance belum voluntary tax compliance (Kogler et al., 2013; Kirchler et al., 2008). Ciri penting pada masyarakat modern adalah kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) yang ada pada negara-negara maju dengan tax ratio tinggi.
- c. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan berupa rekomendasi model kebijakan bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dalam upaya peningkatan moral perpajakan sukarela perpajakan (voluntary tax compliance) pada saat terjadi berbagai kasus pajak yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Penelitian ini urgen karena merupakan kajian untuk memperbaiki kebijakan perpajakan institusi pemerintah yang sangat mendesak saat ini.
- d. Penelitian ini juga urgen karena menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan sukarela yaitu dengan menggabungkan variabel-variabel ekonomi (seperti denda dan pemeriksaan pajak) dan psikologi-sosial (keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak). Penelitian ini sejalan dengan perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini yang memandang

variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel economic deterrence (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela ini telah menjadi ketertarikan penelitian dari berbagai multidisiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi selama 50 tahun terakhir (Kirchler, et al., 2008; van Dijke & Verboon, 2010). Paradigma penelitian kepatuhan pajak pada saat ini cenderung memfokuskan pada peran variabel-variabel psikologi-sosial (Wenzel, 2004; van Dijke & Verboon, 2010). Hal ini karena kesadaran bahwa analisis penelitian dengan menggunakan variabel-variabel deterrence saja (seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan denda pajak) tidak cukup dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak (Gosh dan Crain, 1996; Hanno dan Violette, 1996). Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini karenanya memandang variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel deterrence (Kirchler, et al. 2008).

Teori slippery slope menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan deterrence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel deterrence cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*). Berdasar teori slippery slope ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.



Gambar 1. Teori Slippery Slope

Penilaian moral tentang perilaku yang pantas dihukum merupakan faktor kunci dalam memahami hubungan antara pemberian sanksi oleh otoritas pajak dan kepatuhan (Mulder, 2009). Apakah ketidakpatuhan pajak dipandang tidak bermoral atau bermoral tergantung pada bagaimana sanksi dipersepsikan: (1) sebagai *compensatory* yaitu menunjukkan sebuah transaksi ekonomi, atau (2) *retributive* menunjukkan bahwa pelanggaran norma memang layak dihukum. Sanksi yang bersifat *retributive* cenderung dapat meningkatkan kepatuhan dibandingkan sanksi *compensatory* karena menunjukkan ketidaksetujuan secara moral terhadap pelanggaran norma (Verboon & van Dijke, 2011). Sanksi *compensatory* tidak menunjukkan pertimbangan moral karena lebih bersifat transaksi ekonomi.

Mulder (2009) menyatakan bahwa pemberian sanksi yang lebih berat cenderung dipersepsikan bersifat *retributive* dibandingkan sanksi ringan. Hal ini karena sanksi berat

merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas tersebut telah merepresentasikan ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran pajak. Sanksi yang berat cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena merupakan sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak. Sanksi berupa denda pajak yang terlalu rendah dapat dipersepsikan sebagai indikator bahwa otoritas pajak lemah sehingga menurunkan kepercayaan pembayar pajak yang jujur (Kirchler dkk., 2008).

Meskipun demikian, selain hasil penelitian Mulder (2009), penelitian lainnya menunjukkan bukti empiris yang bertentangan tentang pengaruh tingkat sanksi terhadap kepatuhan (Kirchler et al., 2008). Sebagai contoh, Tenbrunsel & Messick (1999) menemukan bahwa pengaruh tingkat sanksi terhadap kepatuhan tergantung (dimoderasi) oleh probabilitas persepsian bahwa pelaku akan tertangkap melakukan pelanggaran oleh otoritas. Mulder (2009) menemukan tingkat sanksi dapat meningkatkan moral concerns tentang perilaku yang tidak etis jika otoritas dipersiapkan dapat dipercaya. Wenzel (2004) menemukan bahwa tingkat sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan untuk masyarakat yang percaya bahwa membayar pajak merupakan sebuah perilaku etis. Verboon & van Dijke (2011) menemukan bahwa tingkat sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika prosedur pemberian sanksi tersebut dipandang fair oleh masyarakat. Dengan kata lain, pemberian sanksi yang berat melalui prosedur yang adil dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh tingkat denda pajak terhadap kepatuhan tergantung pada (dimoderasi oleh) variabel-variabel lain. Tyler (2006) menyatakan bahwa pengaruh sanksi yang berat dalam meningkatkan kepatuhan pajak tergantung pada apakah otoritas pajak dipersepsikan mempunyai legitimasi dengan telah melakukan prosedur yang tepat, benar, dan adil (Tyler, 2006). Kirchler et al. (2008) menyatakan pendapat serupa yaitu bahwa pemberian denda pajak yang tidak tepat misalnya dalam kasus seorang pembayar pajak secara tidak sengaja membuat kesalahan karena tidak jelasnya peraturan pajak dapat menurunkan keadilan persepsian masyarakat.

Tingkat keadilan prosedural merupakan salah sumber penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi tingkat moral otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang konsisten bahwa masyarakat mempersepsikan otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang tidak fair sebagai otoritas yang tidak mempunyai legitimasi (Murphy, 2004; Tyler, 1997, 2006). Selain itu, hasil penelitian van Prooijen et al. (2008) menunjukkan bahwa sistem sanksi hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberian sanksi tersebut dinilai adil. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (trust) terhadap otoritas menjadi menurun. Ketika otoritas pajak telah membuat prosedur secara fair, termasuk dalam pemberian sanksi denda pajak yang tinggi, masyarakat akan cenderung taat pada keputusan otoritas tersebut (Cropanzano, Rupp, Mohler, & Schminke, 2001; de Cremer & Tyler, 2005; Tyler, 2006).

Berdasar kajian di atas, penelitian ini mengajukan argumen bahwa pemberian denda pajak yang tinggi belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun pengaruhnya tergantung pada tingkat keadilan prosedural otoritas pajak dalam pemberian sanksi tersebut. Semakin tinggi keadilan prosedural maka pemberian denda pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Argumen tersebut dinyatakan dalam hipotesis pertama berikut ini:

Hipotesis 1: Semakin tinggi denda pajak dan semakin besar keadilan prosedural maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental (Lind, 2001) yaitu anggota

masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas/keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki (sense of belongingness) suatu negara. Namun pada saat yang sama, keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya (misalnya penyelewangan pajak yang dibayarkan warga negara oleh aparat pajak).

Hubungan antara keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak juga dapat dijelaskan oleh teori fairness heuristic (Lind, 2001). Teori ini menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat dipercaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, keadilan prosedural, termasuk dalam pemberian denda pajak, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Konovsky & Cropanzano, 1991; Korsgaard, Schweiger, & Sapienza, 1995). Kirchler et al. (2008) menyatakan bahwa kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Mereka juga menyatakan bahwa keadilan prosedural merupakan anteseden bagi kepercayaan terhadap otoritas pajak. Berdasar argumen di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dinyatakan hipotesis kedua ini berikut:

Hipotesis 2: Tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh interaksi positif antara denda pajak dan keadilan prosedural terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi..

METODE PENELITIAN

Subjek eksperimen dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan disain eksperimen untuk meningkatkan validitas internal dan obyektivitas data kepatuhan pajak sukarela. Disain eksperimen yang digunakan adalah 2 x 2 between subject design dengan 2 variabel independen yang dimanipulasi dan masing-masing variabel mempunyai 2 level yaitu variabel denda pajak (rendah vs. tinggi) dan variabel keadilan prosedural (rendah vs. tinggi). Variabel dependen adalah tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan perpajakan sukarela. Dengan disain di atas maka terdapat 4 kondisi/sel eksperimen sebagai berikut:

Tabel 1. Disain Eksperimen

Denda Pajak	Keadilan Prosedural	
	Rendah	Tinggi
Rendah	Sel I	Sel III
Tinggi	Sel II	Sel IV

Tingkat kepatuhan pajak diukur dengan sebuah skenario dengan data hipotetis. Partisipan diminta bermain peran seolah-olah sebagai seorang wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS. Selain sebagai PNS, ia mempunyai penghasilan tambahan sebagai konsultan freelance. Dalam tahun 2009, sebagai konsultan, ia mempunyai penghasilan sebesar Rp50 juta. Pada tahun 2009 tersebut, ia berencana membeli sebuah mobil baru dari uang penghasilan tambahan tersebut. Ia memahami aturan pajak bahwa penghasilan tambahan tersebut merupakan obyek pajak penghasilan (PPH) dan seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang. Dalam hal ini, ia akan menghadapi konflik kepentingan yaitu apakah akan menggunakan seluruh uang penghasilan tambahan tersebut untuk membeli mobil baru atau melaporkan penghasilan tambahan tersebut dalam SPT dengan konsekuensi ia harus membayar PPh atas penghasilan tambahan tersebut. Dengan skenario tersebut, tingkat kepatuhan perpajakan diukur dengan menanyakan kepada partisipan seberapa besar probabilitas

bahwa mereka akan melaporkan penghasilan tambahan sebagai konsultan tersebut dalam SPT. Partisipan diberikan sebuah skala grafik dengan skor 0=sama sekali tidak akan melaporkan penghasilan tambahan dalam SPT, dan 100=akan melaporkan seluruh penghasilan tambahan tersebut dalam SPT.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel akhir penelitian ini yang dilakukan dengan setting eksperimen terdiri atas 40 orang wajib pajak (WP) pribadi di kota Semarang. Pada bagian ini akan diuraikan profil responden yang meliputi jenis kelamin dan usia subjek eksperimen. Tabel 2 menyajikan profil responden menurut jenis kelamin. Responden berjenis kelamin pria sebanyak 16 orang (40%) dan wanita 24 orang (60%).

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

	Jumlah	Persentase
Pria	16	40.0
Wanita	24	60.0
Total	40	100.0

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif usia subjek eksperimen. Rata-rata usia responden adalah 32,02 tahun dengan usia termuda 22 tahun dan tertua 46 tahun. Statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia relatif muda.

Tabel 3. Deskripsi Usia Subjek Eksperimen

	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Deviasi Std.
Usia	40	22	46	32,02	6,46

Eksperimen laboratorium menggunakan desain 2 x 2 (tingkat denda: rendah vs. tinggi; keadilan prosedural: rendah vs. tinggi). Tabel 4 melaporkan distribusi subjek eksperimen ke dalam 4 sel eksperimen dengan menggunakan teknik random assignment. Setiap sel eksperimen terdiri atas 10 subjek eksperimen.

Tabel 4 melaporkan statistik deskriptif tingkat kepatuhan pajak dalam setiap sel eksperimen. Nampak bahwa rata-rata tingkat kepatuhan tertinggi adalah pada sel tingkat denda tinggi dan keadilan prosedural tinggi. Sebaliknya, rata-rata tingkat kepatuhan terendah adalah pada sel tingkat denda tinggi dan keadilan prosedural rendah.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pajak

tingkat denda	keadilan prosedural	jenis kelamin	Std.		N
			Mean	Deviation	
rendah	Rendah	pria	61.25	4.787	4
		wanita	42.50	4.183	6
		Total	50.00	10.541	10
	Tinggi	pria	50.00	3.536	5
		wanita	58.00	4.472	5
		Total	54.00	5.676	10
Total	pria	55.00	7.071	9	
	wanita	49.55	9.070	11	
	Total	52.00	8.491	20	
tinggi	Rendah	pria	43.33	5.774	3
		wanita	50.00	10.408	7
		Total	48.00	9.487	10
	Tinggi	pria	72.50	2.887	4
		wanita	80.00	5.477	6
		Total	77.00	5.869	10
	Total	pria	60.00	16.073	7
		wanita	63.85	17.578	13
		Total	62.50	16.741	20

Pengujian hipotesis menggunakan analysis of variance (ANOVA) dengan menggunakan demografi responden (gender dan usia) sebagai variabel control atau covariate. Penggunaan ANOVA mensyaratkan asumsi varian sama. Tabel 5 melaporkan hasil pengujian asumsi tersebut dengan levene test. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis nol bahwa varian sama tidak dapat ditolak dengan nilai sigifikansi 0,113. Dengan demikian asumsi ANOVA telah terpenuhi.

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi ANOVA
(Model Kepatuhan Pajak)

Levene's Test of Equality of Error Variances ^a				
Dependent Variable: tingkat kepatuhan pajak				
F	df1	df2	Sig.	
1.840	7	32	.113	
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.				
a. Design: Intercept + denda + prosedur + denda * prosedur + gender + usia				

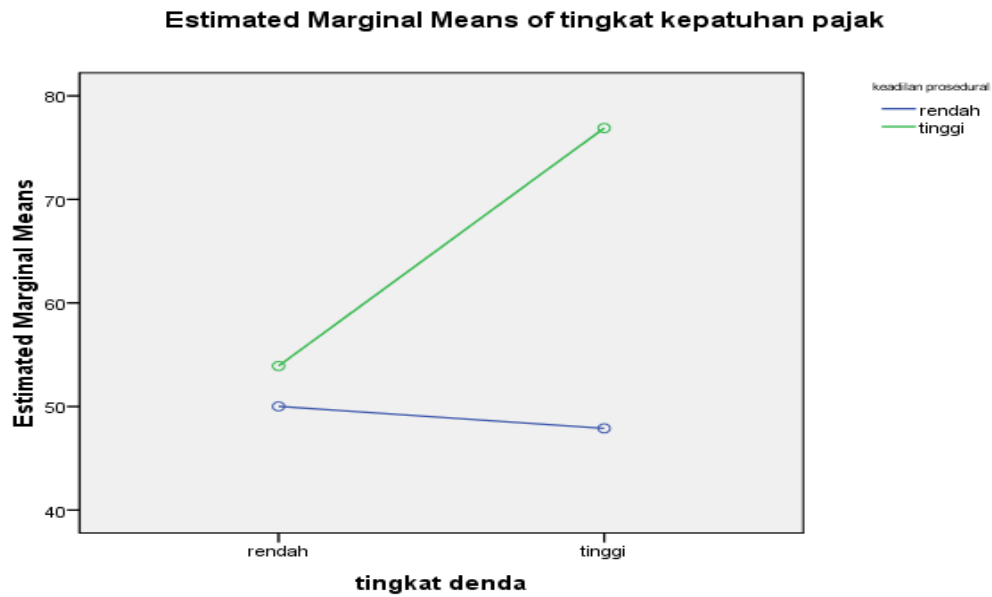
Tabel 6 merupakan hasil pengujian hipotesis 1 dengan ANCOVA untuk interaction effect variabel denda dan keadilan prosedural setelah mengontrol pengaruh variabel demografi seperti gender dan usia responden. Interaksi antara denda pajak dan keadilan prosedural (denda*prosedur) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan (nilai $p=0,000$). Oleh karena variabel interaksi signifikan maka hipotesis 1 didukung. Hasil pada tabel 6 juga menunjukkan bahwa variabel demografi responden yaitu gender dan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil juga menunjukkan bahwa main effect variabel tingkat denda dan keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan dengan nilai p sebesar 0,000. Secara keseluruhan, hasil pengujian

menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 1 yaitu bahwa semakin tinggi denda dan keadilan prosedural maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak sukarela.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Tests of Between-Subjects Effects						
Dependent Variable: tingkat kepatuhan pajak						
Source		Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	Hypothesis	4605.692	1	4605.692	67.412	.000
	Error	2335.556	34.185	68.321 ^a		
Denda	Hypothesis	1075.562	1	1075.562	15.215	.000
	Error	2403.414	34	70.689 ^b		
Prosedur	Hypothesis	2424.389	1	2424.389	34.297	.000
	Error	2403.414	34	70.689 ^b		
denda * prosedur	Hypothesis	1546.102	1	1546.102	21.872	.000
	Error	2403.414	34	70.689 ^b		
Gender	Hypothesis	5.365	1	5.365	.076	.785
	Error	2403.414	34	70.689 ^b		
Usia	Hypothesis	1.373	1	1.373	.019	.890
	Error	2403.414	34	70.689 ^b		

Gambar 2 berikut merupakan plot interaksi variabel tingkat denda pajak dan keadilan prosedural. Nampak bahwa tingkat rata-rata kepatuhan pajak tertinggi adalah kelompok subjek eksperimen yang mendapatkan treatment tingkat denda pajak yang tinggi dengan keadilan prosedural yang tinggi pula. Secara keseluruhan, hasil plot memperkuat temuan sebelumnya yaitu bahwa hipotesis 1 didukung.



Gambar 2. Plot Tingkat Kepatuhan Pajak

Bagian ini membahas hasil pengujian dengan kepercayaan pada otoritas pajak sebagai variabel dependen. Tabel 7 melaporkan statistik deskriptif tingkat kepatuhan pajak dalam setiap sel eksperimen. Nampak bahwa rata-rata tingkat kepercayaan pada otoritas pajak tertinggi adalah pada sel tingkat denda tinggi dan keadilan prosedural tinggi (rata-rata sebesar 4,70). Sebaliknya, rata-rata tingkat kepercayaan pada otoritas pajak tertinggi terendah adalah pada sel tingkat denda tinggi dan keadilan prosedural rendah (rata-rata sebesar 2,60).

Tabel 7. Statistik Deskriptif Tingkat Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Descriptive Statistics					
Dependent Variable:kepercayaan pada otoritas pajak					
tingkat denda	keadilan procedural	Jenis kelamin	Mean	Std. Deviation	N
rendah	Rendah	Pria	3.25	.957	4
		Wanita	3.83	.408	6
		Total	3.60	.699	10
	Tinggi	Pria	3.60	.548	5
		Wanita	3.40	.894	5
		Total	3.50	.707	10
	Total	Pria	3.44	.726	9
		Wanita	3.64	.674	11
		Total	3.55	.686	20
tinggi	Rendah	Pria	2.67	.577	3
		Wanita	2.57	.535	7
		Total	2.60	.516	10
	Tinggi	Pria	4.50	.577	4
		Wanita	4.83	.408	6
		Total	4.70	.483	10
	Total	Pria	3.71	1.113	7
		Wanita	3.62	1.261	13
		Total	3.65	1.182	20

Pengujian hipotesis menggunakan analysis of variance (ANOVA) dengan menggunakan demografi responden (gender dan usia) sebagai variabel kontrol/covariate. Penggunaan ANOVA mensyaratkan asumsi varian sama. Tabel 8 melaporkan hasil pengujian asumsi tersebut dengan levene test. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis nol bahwa varian sama tidak dapat ditolak dengan nilai sigifikansi 0,208. Dengan demikian asumsi ANOVA telah terpenuhi.

Tabel 8. Hasil Pengujian Asumsi ANOVA
(Model Kepercayaan pada Otoritas Pajak)

Levene's Test of Equality of Error Variances ^a			
Dependent Variable:kepercayaan pada otoritas pajak			
F	df1	df2	Sig.
1.484	7	32	.208

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

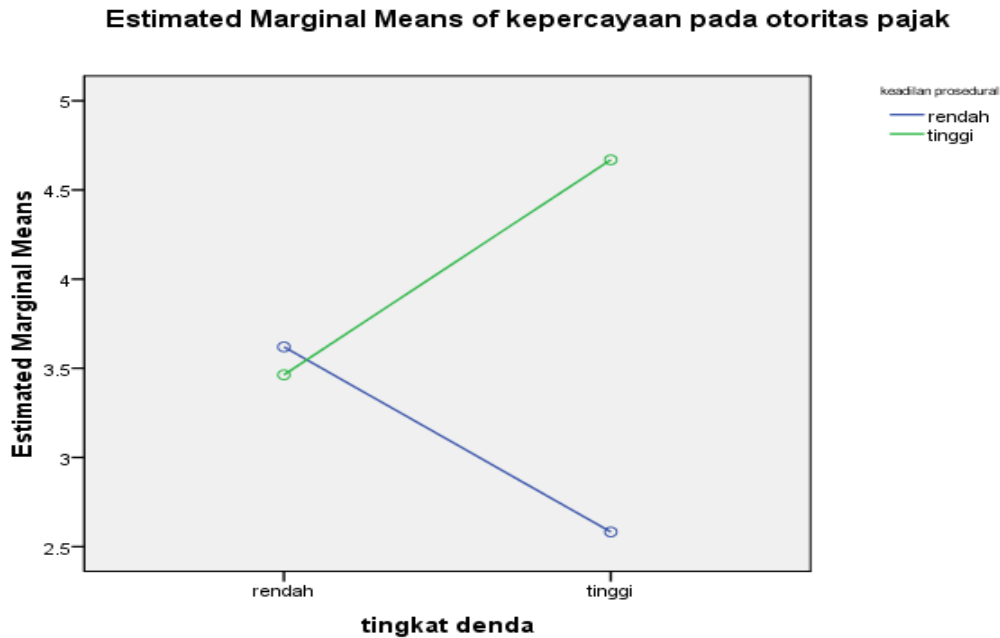
a. Design: Intercept + denda + prosedur + denda * prosedur + gender + usia

Tabel 9 berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dengan variabel dependen kepercayaan pada otoritas pajak. Pengujian dilakukan dengan ANCOVA untuk interaction effect variabel denda dan keadilan prosedural setelah mengontrol pengaruh variabel demografi seperti gender dan usia responden. Interaksi antara denda pajak dan keadilan prosedural (denda*prosedur) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak (nilai $p=0,000$). Hasil pada tabel 9 juga menunjukkan bahwa variabel demografi responden yaitu gender dan usia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak. Hasil juga menunjukkan bahwa main effect variabel tingkat denda tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak dengan nilai p sebesar 0,670. Main effect keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada otoritas pajak dengan nilai p sebesar 0,000. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan peran penting keadilan prosedural. Tingkat denda pajak hanya dapat meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak jika dilakukan prosedur yang dipersepsikan adil oleh wajib pajak.

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis dengan ANOVA
(Model Kepercayaan pada Otoritas Pajak)

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Intercept	Hypothesis	21.799	1	21.799	58.088	.000
	Error	13.127	34.979	.375 ^a		
Denda	Hypothesis	.070	1	.070	.185	.670
	Error	12.915	34	.380 ^b		
Prosedur	Hypothesis	8.338	1	8.338	21.950	.000
	Error	12.915	34	.380 ^b		
denda * prosedur	Hypothesis	12.345	1	12.345	32.501	.000
	Error	12.915	34	.380 ^b		
Gender	Hypothesis	.254	1	.254	.667	.420
	Error	12.915	34	.380 ^b		
Usia	Hypothesis	.246	1	.246	.647	.427
	Error	12.915	34	.380 ^b		

Gambar 3 berikut merupakan plot interaksi variabel tingkat denda pajak dan keadilan prosedural terhadap kepercayaan pada otoritas pajak. Nampak bahwa tingkat rata-rata kepercayaan pada otoritas pajak adalah kelompok subjek eksperimen yang mendapatkan treatment tingkat denda pajak yang tinggi dengan keadilan prosedural yang tinggi pula. Pemberian denda pajak yang tinggi namun dengan prosedur yang tidak adil justru menurunkan kepercayaan pada otoritas pajak.



Gambar 3. Plot Tingkat Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Bagian selanjutnya membahas pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak sukarela. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi ordinary least squares. Tabel 10 melaporkan koefisien determinasi atau R-squared sebagai indikator kekuatan penjelas. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,235 atau 23,5% menunjukkan kepercayaan pada otoritas pajak mampu menjelaskan variansi kepatuhan pajak sukarela sebesar 23,5%.

Tabel 10. Koefisien Determinasi
(Regresi Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.505 ^a	.255	.235	12.365	1.348

a. Predictors: (Constant), kepercayaan pada otoritas pajak
b. Dependent Variable: tingkat kepatuhan pajak

Tabel 11 melaporkan hasil uji F untuk mengevaluasi kelayakan model regresi. Dengan nilai F sebesar 12,999 dan signifikan pada nilai p sebesar 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan.

Tabel 11. Hasil Kelayakan Model dengan Uji F
(Regresi Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1987.528	1	1987.528	12.999	.001 ^a
	Residual	5809.972	38	152.894		
	Total	7797.500	39			

a. Predictors: (Constant), kepercayaan pada otoritas pajak
b. Dependent Variable: tingkat kepatuhan pajak

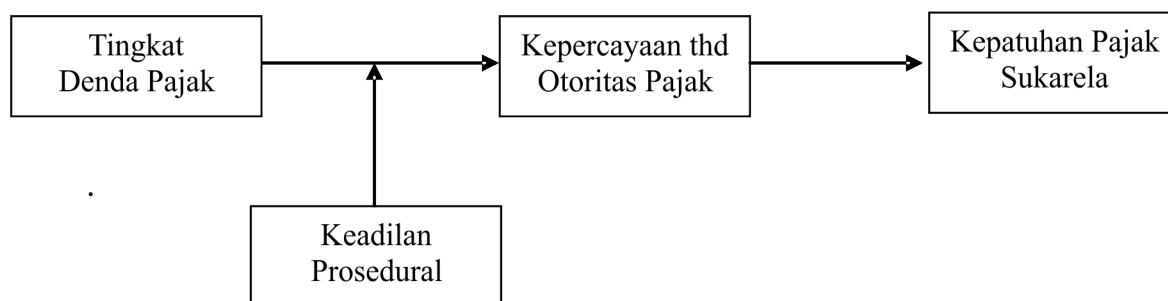
Tabel 12 melaporkan hasil pengujian hipotesis bahwa kepercayaan pada otoritas pajak merupakan determinan positif tingkat kepatuhan pajak sukarela. Dengan koefisien regresi sebesar 7,472 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis 2
(Regresi Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.351	7.712		3.935	.000
	kepercayaan pada otoritas pajak	7.472	2.072	.505	3.605	.001

a. Dependent Variable: tingkat kepatuhan pajak

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan keadilan prosedural sebagai pemoderasi pengaruh tingkat denda pajak terhadap kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Pemberian denda pajak yang tinggi hanya dapat meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan sukarela jika dilakukan dengan prosedur yang dipersepsikan adil oleh wajib pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak mempunyai peran penting karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan empiris terhadap hipotesis bahwa tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengaruh interaksi positif antara denda pajak dan keadilan prosedural terhadap tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Secara ringkas, model kepatuhan pajak sukarela dari hasil temuan penelitian ini adalah seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Model Kepatuhan Pajak Sukarela

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kepatuhan sukarela bagi wajib pajak pribadi. Model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Penelitian ini urgen karena merupakan kajian untuk memperbaiki kebijakan perpajakan institusi pemerintah yang sangat mendesak saat ini. Penelitian ini juga urgen karena menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan sukarela yaitu dengan menggabungkan variabel-variabel ekonomi (seperti denda dan pemeriksaan pajak) dan psikologi-sosial (keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak). Luaran penelitian ini ditargetkan berupa inovasi model kebijakan perpajakan dengan tidak hanya menggunakan variabel-variabel denda dan pemeriksaan seperti kebijakan pemerintah ini.

Penelitian ini telah mengumpulkan data dengan melakukan eksperimen terhadap 40 orang wajib pajak di Kota Semarang. Data penelitian dianalisis dengan ANOVA dan regresi sebagai alat statistika untuk pengujian hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak didukung oleh bukti empiris. Hasil ini setelah variabel-variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela seperti gender dan usia responden dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemediasi pengaruh denda dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini mendukung beberapa argumen teori slippery slope. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka disusun model kepatuhan pajak sukarela. Model yang dihasilkan menyatakan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Pemberian sanksi denda pajak tidak dapat langsung meningkatkan kepatuhan pajak sukarela namun denda dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap otoritas pajak baru kemudian mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Demikian juga variabel keadilan prosedural. Prosedur yang dipersepsikan adil oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan selanjutnya kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Berdasar hasil studi empiris penelitian ini maka dapat disusun beberapa saran bagi otoritas pajak dalam kebijakan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

1. Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan determinan utama kepatuhan pajak sukarela. Oleh karena itu, perlu dikembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak khususnya setelah berbagai kasus korupsi yang justru melibatkan aparat pajak sendiri. Kebijakan inovatif dalam rekrutmen pegawai pajak, sistem pengendalian internal, remunerasi, dan hukuman diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap otoritas pajak.
2. Kebijakan denda pajak tidak dapat langsung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Otoritas pajak harus mengkombinasikannya dengan kebijakan yang bersifat psikologi-sosial seperti diuraikan pada poin 1 untuk dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak.
3. Tingkat keadilan prosedural merupakan salah sumber penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi tingkat moral otoritas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan temuan bahwa masyarakat mempersepsikan otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang tidak fair sebagai otoritas yang tidak mempunyai legitimasi. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (trust) terhadap otoritas

menjadi menurun. Ketika otoritas pajak telah membuat prosedur secara fair masyarakat akan cenderung taat pada keputusan otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak menyajikan transparansi bagaimana prosedur yang mereka lakukan dapat diketahui dan dievaluasi oleh publik.

4. Penelitian ini menggunakan disain eksperimental yang mempunyai kelebihan dalam validitas internal namun mempunyai keterbatasan dalam validitas eksternal khususnya generalisasi. Penelitian mendatang dapat menggunakan disain survei kuesioner untuk menguji generalisasi temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M.G. dan Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1(3) hal 323-338.
- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review* 66 (July) hal 577-593.
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1993). Fiscal exchange, collective decisions institutions, and tax compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 22, 285–303.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36, 818–860.
- Cahyonowati, Nur., dan Ratmono, D. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Laporan Hibah Bersaing tahun I.
- Cahyonowati, Nur., dan Ratmono, D. (2012). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Laporan Hibah Bersaing tahun II.
- Carroll, J. S. (1978). A psychological approach to deterrence: The evaluation of crime opportunities. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36, 1512–1520.
- Cropanzano, R., Rupp, D. E., Mohler, C., & Schminke, M. (2001). Three roads to organizational justice. *Research in Personnel and Human Resources Management*, 20, 1–113.
- De Cremer, D., & Tyler, T. R. (2005). Managing group behavior: The interplay between procedural justice, sense of self, and cooperation. In M. P. Zanna (Ed.). *Advances in experimental social psychology* (Vol. 37, pp. 151–218). San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
- Eek, D., Loukopoulos, P., Fujii, S., & Gärling, T. (2002). Spill-over effects of intermittent costs for defection in social dilemmas. *European Journal of Social Psychology*, 32, 801–813.
- Faisal, Cahyonowati, Nur dan Ratmono D. (2013). Model Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. Laporan Hibah Bersaing tahun I.
- Gosh, D. dan Crain, TL. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and

- Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting* Vol 8 hal 219-241.
- Hanno, D. dan Violette, G. (1996). An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting* Vol 8 hal 57-75.
- Kirchler, E., Hoelzl, E & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology* 29 hal 210–225.
- Kogler, C, Batrancea L & Nichita A. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology* 34 hal 169–180.
- Konovsky, M. A., & Cropanzano, R. (1991). Perceived fairness of employee drug testing as a predictor of employee attitudes and job performance. *Journal of Applied Psychology*, 76, 698–707.
- Konovsky, M. A., & Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. *Academy of Management Journal*, 37, 656–669.
- Korsgaard, M. A., Schweiger, D. M., & Sapienza, H. J. (1995). Building commitment, attachment, and trust in strategic decision-making teams: The role of procedural justice. *Academy of Management Journal*, 38, 60–84.
- Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis (Eds.), *Social exchange: Advances in theory and research* (pp. 27–55). New York: Plenum.
- Lind, E. A. (2001). Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), *Advances in organizational justice*. Stanford, US: Stanford University Press.
- Lind, E. A., Kray, L., & Thompson, L. (2001). Primacy effects in justice judgments: Testing predictions from fairness theory. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 85, 189–210.
- Magner, N. R., Johnson, G. G., Sobery, J. S., & Welker, R. B. (2000). Enhancing procedural justice in local government budget and tax decision making. *Journal of Applied Social Psychology*, 30, 789–815.

- Mulder, L. B., Van Dijk, E., De Cremer, D., & Wilke, H. A. M. (2006). Undermining trust and cooperation: The paradox of sanctioning systems in social dilemmas. *Journal of Experimental Social Psychology*, 42, 147–162.
- Mulder, L. B., Verboon, P., & De Cremer, D. (2009). Sanctions and moral judgments: The moderating effect of sanction severity and trust in authorities. *European Journal of Social Psychology*, 39, 255–269.
- Murphy, K. (2004). The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior*, 28, 187–209.
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38, 652–668.
- Porcano, T. M. (1988). Correlates of tax evasion. *Journal of Economic Psychology*, 9, 47–67.
- Stalans, L., & Lind, E. A. (1997). The meaning of procedural fairness: A comparison of taxpayers' and representatives' views of their procedural fairness. *Social Justice Research*, 10, 311–331.
- Tenbrunsel, A. E., & Messick, D. M. (1999). Sanctioning systems, decision frames, and cooperation. *Administrative Science Quarterly*, 44, 684–707.
- Thibaut, J. W., & Walker, L. (1975). *Procedural justice: A psychological analysis*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- Tyler, T. R. (1997). The psychology of legitimacy. A relational perspective on voluntary deference to authorities. *Personality and Social Psychology Review*, 1, 323–345.
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.
- Van Dijke, M dan Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology* 31 hal 80–91.
- Van Prooijen, J.-W., Gallucci, M., & Toeset, G. (2008). Procedural justice in punishment systems: Inconsistent punishment procedures have detrimental effects on cooperation. *British Journal of Social Psychology*, 47, 311–324.

- Verboon, P dan van Dijke, M. (2011). When do severe sanctions enhance compliance? The role of procedural fairness. *Journal of Economic Psychology* 32 hal 120–130.
- Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior*, 28, 547–567.
- Worsham, R. G. Jr., (1996). The effect of tax authority behavior on tax payer compliance: A procedural justice approach. *Journal of the American Taxation Association*, 18, 19–39.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (STUDI PADA UMKM KAIN TENUN IKAT TROSO JEPARA)

Nita Andriyani Budiman¹

Zuliyati²

***Abstract: Factors Affecting the Use of Accounting Information (Studies on SMEs Woven Tie Troso Jepara).** This study aims to determine the factors that influence the use of accounting information on SMEs ikat troso in Jepara regency. Variables used are the latest education manager or owner, business scale, period leading companies, the age of the company, accounting training, and accounting information. The sample in this research were 80 respondents . The method used in this research is using descriptive statistics test, test data quality, classic assumption test, and test the hypothesis by using regression analysis. The study states that there are significant effect education manager or owner, the age of the company, and accounting training to accounting information. While the scale of effort and time to lead the company does not significant effect the accounting information.*

Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM kain tenun ikat troso di Kabupaten Jepara. Variabel yang digunakan adalah pendidikan terakhir manajer atau pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi, dan informasi akuntansi. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pendidikan terakhir manajer atau pemilik, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi terhadap informasi akuntansi. Sedangkan skala usaha dan masa memimpin perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap informasi akuntansi.

Kata Kunci: UMKM, *agency theory*, dan informasi akuntansi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional, dan investasi nasional. Hingga tahun 2014 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta dan 98,9 adalah usaha mikro (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014).

Kontribusi tersebut akan semakin baik apabila berbagai permasalahan yang masih dihadapi UMKM tersebut dapat diatasi, dan salah satunya adalah permasalahan dalam memanfaatkan informasi akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan usahanya. Di banyak penelitian, permasalahan ini diduga kuat bersumber dari kurangnya persepsi dan pemahaman pengelola dalam bidang akuntansi. Sari dan Setyawan (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan manajer

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: nitandriyani@gmail.com

² Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: zuliyatiyati@yahoo.co.id

(pemilik) perusahaan kecil tentang informasi akuntansi keuangan khususnya dan akuntansi umumnya sangat kurang sekali. Dalam penelitian lainnya juga disebutkan bahwa dalam upaya untuk berkembang, UMKM menghadapi berbagai kendala atau masalah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan usaha, pengalaman manajerial, kurangnya pemahaman teknologi informasi dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan (Sari dan Setyawan, 2014).

Di Indonesia kajian tentang penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil relatif belum banyak dilakukan. Murniati (2012) meneliti hubungan pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi seorang wirausaha mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Murniati (2012) juga menyimpulkan bahwa masa memimpin perusahaan, pendidikan manajer atau pemilik, pelatihan akuntansi, umur perusahaan dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya (Warsono, 2010). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi sehingga pelaku UMKM dalam hal akuntansi, serta upaya perbaikannya sehingga mampu memanfaatkan informasi akuntansi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan berbagai keputusan yang dibuatnya.

Dari penelitian empiris diatas, serta pentingnya informasi akuntansi bagi UMKM maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (STUDI PADA UMKM KAIN TENUN IKAT TROSO JEPARA)”

Berdasarkan latar belakang di atas serta betapa pentingnya informasi akuntansi bagi UMKM, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendidikan manajer atau pemilik terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara?
2. Apakah terdapat pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara?
3. Apakah terdapat pengaruh masa memimpin perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara?
4. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara?
5. Apakah terdapat pengaruh pelatihan akuntansi manajer atau pemilik terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara?

Penelitian ini bermanfaat untuk: memberikan gambaran tentang informasi akuntansi yang sering digunakan oleh UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara. Bagi akademisi sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait penggunaan informasi akuntansi. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan UMKM, maupun bagi UMKM yang sedang tumbuh dan berkembang.

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini termasuk pada UMKM. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Oleh karena itu, teori ini cocok digunakan oleh berbagai peneliti dibidang akuntansi. Prinsip utama teori ini adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang atau pemilik usaha (agency)

dengan yang menerima wewenang (manajer atau karyawan).

Dalam konteks perusahaan, masing-masing akan berusaha memaksimalkan fungsinya, pemilik usaha akan berusaha untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya sedangkan pihak manajer atau karyawan mengharapkan kompensasi yang sebesar-besarnya, sehingga muncul asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut yang menyebabkan munculnya conflict of interest. Para agen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemilik usaha atau principal. Disinilah akuntansi memegang peranan penting sebagai media penyampaian informasi mengenai kinerja perusahaan. Informasi akuntansi disajikan dalam bentuk suatu laporan yang disebut laporan keuangan.

Sesuai PSAK No 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka.

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang hanya mengatur usaha kecil perlu diganti agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha (UU RI Nomor 20 Tahun 2008). Selanjutnya menurut Undang-Undang UMKM Tahun 2008 (UU RI Nomor 20 Tahun 2008) Bab IV Pasal 6 menyebutkan tentang Kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau; (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Belkaoui (2010) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan dan alternatif-alternatif tindakan. Pengguna informasi akuntansi untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional.

Akuntansi adalah media komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai ”bahasanya dunia usaha” (business language) (Soemarso, 1999:5). Akuntansi ditinjau dari sudut kegiatan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Sedangkan akuntansi ditinjau dari sudut pemakainya adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (Yusuf, 2011:4).

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bagi pihak-pihak dalam perusahaan maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Hasil akuntansi di perlukan untuk (Yusuf, 2011:4): (1) membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, dan (2) pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya

Informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi yang ada pada UMKM yang dijadikan obyek dalam penelitian. Hal ini mengingat hampir sebagian besar dari UMKM belum menjalankan teknik-teknik akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Akan tetapi kegiatan akuntansi yang ada pada UMKM masih sebatas berupa pembukuan-pembukuan sederhana. Meskipun hanya berupa pembukuan sederhana akan tetapi laporan keuangan yang disajikan nantinya dapat ditelusuri kebenaran dan kewajarannya sampai pada bukti transaksi. Bentuk-bentuk pembukuan yang dijalankan pada sebagian besar UMKM antara lain: buku kas masuk, kas keluar, buku persediaan, buku piutang (piutang uang maupun piutang barang), buku hutang (hutang uang maupun hutang barang.), buku inventaris (buku kekayaan), buku pembelian dan buku penjualan.

Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer UMKM ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Tingkat pendidikan manajer atau pemilik menentukan pemahaman manajer atau pemilik terhadap pentingnya penggunaan informasi akuntansi. Pendidikan pemilik atau manajer perusahaan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti. Apabila pemilik atau manajer perusahaan mempunyai pendidikan SMA berarti pemilik atau manajer tersebut telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun.

Skala usaha juga berhubungan positif terhadap tingkat penyediaan informasi akuntansi. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks kebutuhan perusahaan akan informasi yang dibutuhkan. Tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha, apabila skala usaha meningkat, maka proporsi perusahaan dalam penyediaan informasi akuntansi juga meningkat. Pengukuran skala usaha dalam penelitian ini dengan menggunakan angka 0 untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 19 orang dan angka 1 untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 20 orang.

Masa manajer memimpin perusahaan atau lamanya seseorang memimpin perusahaan akan menentukan tingkat pemahaman akan pentingnya akuntansi dalam sebuah perusahaan. Semakin lama usia seseorang memimpin perusahaan maka semakin bertambah kebutuhannya akan berbagai informasi, dan tentunya informasi tersebut hanya bisa didapatkan jika perusahaan menyelenggarakan teknik akuntansi secara benar. Masa jabatan pemimpin perusahaan diukur mulai dari manajemen tersebut penerima tanggungjawab sebagai pemilik atau manajer perusahaan sampai penelitian ini dilakukan.

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan beroperasi. Semakin lama perusahaan beroperasi, maka kebutuhan informasi semakin kompleks. Hal ini disebabkan tuntutan dari perkembangan yang dialami oleh perusahaan. Umur perusahaan adalah usia atau lamanya perusahaan tersebut beroperasi. Variabel ini diukur didasarkan pada lamanya perusahaan berdiri (dalam tahun) sejak awal pendirian perusahaan sampai dengan penelitian ini dilakukan.

Pelatihan seputar akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan seorang manajer terhadap penguasaan teknis akuntansi. Semakin sering seorang manajer mengikuti pelatihan akuntansi, maka semakin baik kemampuan manajer tersebut dalam menggunakan informasi akuntansi.

Hipotesis 1 :

Pendidikan manajer atau pemilik berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara.

Hipotesis 2 :

Skala usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara.

Hipotesis 3:

Masa memimpin perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara.

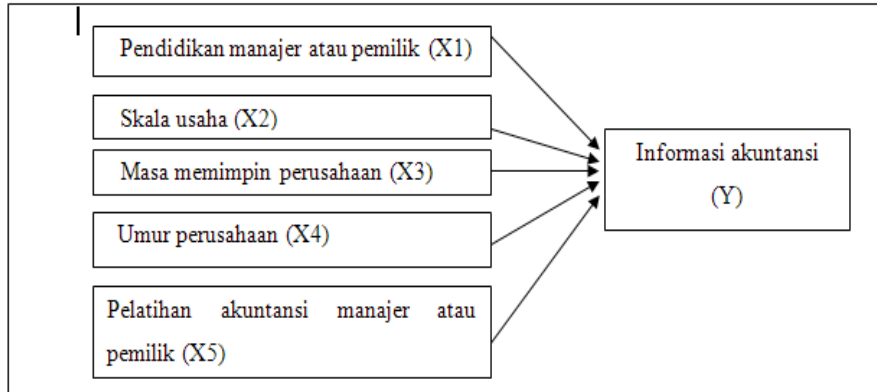
Hipotesis 4:

Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara.

Hipotesis 5:

Pelatihan akuntansi manajer atau pemilik berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Kain Tenun Ikat Troso Jepara.

Berdasarkan hipotesis di atas, kerangka pikir penelitian sebagai signifikansi dari variabel yang dianalisis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Regresi linier berganda di gunakan untuk mendeteksi beberapa variabel yang berelasi dengan variabel yang diuji. Untuk pengujian terhadap akan menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan paket program SPSS untuk pengujian hipotesis.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM pengrajin tenun ikat troso yang tergolong menengah keatas yang ada di desa Troso Kecamatan Pecangaan Jepara yang berjumlah 250 pengrajin. Dengan rumus Slovin didapatkan sampel sebesar 80 responden. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner yang dikirimkan kepada responden secara langsung.

Hasil Uji validitas diketahui item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki r hitung lebih dari r tabel (r hitung $> 0,227$) yang berarti masing-masing item dari variabel pendidikan terakhir manajer atau pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi, dan informasi akuntansi adalah valid.

Hasil Uji reliabilitas diketahui bahwa variabel pendidikan terakhir manajer atau pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi, dan informasi akuntansi memiliki nilai cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,6, maka dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik One Sample Kolmogorof-Smirnov Test. Berdasarkan uji normalitas dengan hasil 0,867 lebih besar dari 0,6, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinieritas untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau nilai VIF dengan asumsi jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Pada uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada nilai toleransi yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas untuk model persamaan yang digunakan.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatterplot. Dengan asumsi apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu dan tidak membentuk suatu pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS diketahui bahwa tidak ada variabel bebas yang dimasukkan secara signifikan mempengaruhi nilai absolute residual, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda, Dengan persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,700 + 0,213 X_1 + 0,176 X_2 + 0,085 X_3 + 0,184 X_4 + 0,206 X_5 + e$$

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Nilai adjusted R square sebesar 0,445 yang mengandung arti bahwa 44,5% variasi besarnya informasi akuntansi bisa dijelaskan oleh pendidikan terakhir manajer atau pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi,. Sedangkan sisanya 55,5% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Statistik F seringkali juga dinamakan dengan analysis of variance. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil SPSS diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	652.579	6	108.763	10.874	.000 ^a
	Residual	680.141	68	10.002		
	Total	1332.720	74			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan Terakhir Manajer atau Pemilik, Skala Usaha, Masa Memimpin Perusahaan, Umur Perusahaan, Pelatihan Akuntansi

b. Dependent Variable: Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai F hitung sebesar 10,874 mempunyai probabilitas (sig) 0,000. Nilai probabilitas (sig) ini lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$), hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terakhir manajer atau pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi terhadap informasi akuntansi.

Dalam uji parsial ini diketahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.. Berdasarkan tabel 2 di bawah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.700	4.483		.156	.876		
Pendidikan terakhir manajer atau pemilik	.213	.085	.253	2.498	.015	.732	1.366
Skala usaha	.176	.106	.169	1.654	.103	.721	1.386
Masa memimpin perusahaan	.085	.054	.153	1.589	.117	.813	1.229
Umur perusahaan	.184	.074	.220	2.490	.015	.959	1.042
Pelatihan akuntansi	.206	.069	.272	2.967	.004	.890	1.124

a. Dependent Variable: Informasi Akuntansi

Pengaruh Pendidikan Terakhir Manajer atau Pemilik terhadap Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pendidikan terakhir manajer atau pemilik sebesar 0,213 mempunyai t hitung sebesar 2,498 dengan probabilitas (sig) 0,015. Nilai probabilitas (sig) ini lebih kecil dari nilai α ($0,015 < 0,05$), sehingga variabel pendidikan terakhir manajer atau pemilik berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan pendidikan terakhir manajer atau pemilik berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi diterima.

Semakin tinggi pendidikan formal dari manajer atau pemilik usaha tenun ikat troso maka semakin memahami penggunaan informasi akuntansi, seperti penggunaan buku kas, mencatat persediaan seta pencatatan pendapatan dan biaya.

Pengaruh Skala Usaha terhadap Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien regresi dari variabel skala usaha sebesar 0,176 mempunyai t hitung sebesar 1,654 dengan probabilitas (sig) 0,103. Nilai probabilitas (sig) ini lebih besar dari nilai α ($0,103 > 0,05$), sehingga variabel skala usaha berpengaruh positif

tidak signifikan terhadap informasi akuntansi. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan skala usaha berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi ditolak. Semakin banyak karyawan yang dimiliki oleh pengusaha troso tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi oleh manajer atau pemilik usaha tenun ikat troso

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien regresi dari variabel masa memimpin perusahaan sebesar 0,085 mempunyai t hitung sebesar 1,589 dengan probabilitas (sig) 0,117. Nilai probabilitas (sig) ini lebih besar dari nilai α ($0,117 > 0,05$), sehingga variabel masa memimpin perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap informasi akuntansi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan masa memimpin perusahaan berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi ditolak. Semakin lama manajer atau pemimpin memimpin usaha tenun troso tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi oleh manajer atau pemilik usaha tenun ikat troso, karena pada umumnya masih menggunakan sistem tradisional

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien regresi dari variabel umur perusahaan sebesar 0,184 mempunyai t hitung sebesar 2,490 dengan probabilitas (sig) 0,015. Nilai probabilitas (sig) ini lebih kecil dari nilai α ($0,015 < 0,05$), sehingga variabel umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap informasi akuntansi. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi diterima. Semakin lama manajer atau pemilik usaha mengelola usaha, semakin tinggi pula penggunaan informasi oleh manajer atau pemilik usaha tenun ikat troso, karena semakin berpengalaman dalam menjalankan usahanya.

Pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pelatihan akuntansi sebesar 0,206 mempunyai t hitung sebesar 2,967 dengan probabilitas (sig) 0,004. Nilai probabilitas (sig) ini lebih kecil dari nilai α ($0,004 < 0,05$), sehingga variabel pelatihan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap informasi akuntansi. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi diterima. Manajer atau pemimpin memimpin usaha tenun troso yang sudah pernah melakukan pelatihan akuntansi akan lebih banyak menggunakan informasi akuntansi dari pada yang belum pernah menggunakan informasi akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pendidikan terakhir manajer atau pemilik berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi. Semakin tinggi pendidikan terakhir manajer atau pemilik maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman terhadap informasi akuntansi.
- b. Skala usaha berpengaruh tidak signifikan terhadap informasi akuntansi. Variabel tersebut masih relatif lemah karena pemahaman terhadap informasi akuntansi tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan.
- c. Masa memimpin perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap informasi akuntansi. Masa memimpin perusahaan tidak berpengaruh terhadap informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan pemilik tidak memiliki keterampilan dalam memahami akuntansi yang baik.
- d. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi. Semakin lama umur perusahaan maka informasi akuntansi akan semakin baik, karena semakin berpengalaman
- e. Pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi. Semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti maka informasi akuntansi akan semakin baik.

Saran

- a. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi informasi akuntansi yang lain.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, agar memperluas cakupan penelitian, misalnya UMKM kabupaten atau kota lain di luar UMKM tenun ikat troso di Kabupaten Jepara.
- c. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan pertanyaan lisan dan tertulis agar data yang diperoleh akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, Riahi Ahmed. (2010). Teori Akuntansi Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara. 2011.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- IAI. (2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
- Kellen, Pius Bumi. (2004). Peranan Akuntansi untuk Pengembangan Bisnis Kecil. Jurnal Bisnis dan Usahawan Vol. II No.7.
- Kementrian Koperasi dan UMKM. 2014.
- Murniati. (2012). Analisis yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sari, Ria Nita dan Aris Budi Setyawan. (2014). Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah atas Penggunaan Informasi Akuntansi. Universitas Gunadarma: Jakarta.
- Soemarso SR, A., (1999). Akuntansi Suatu Pengantar. Rineka Cipta: Jakarta.
- Subanar. (2011). Manajemen Usaha Kecil. BPFE: Yogyakarta.
- . Undang-Undang No 20 Tahun 2008, Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
- Warsono. (2010). Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikan. Asgard Chapter Winarno: Yogyakarta.
- Yusup, Al.Haryono. (2011). Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1. STIE YKPN: Yogyakarta

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR PENGARUHNYA
BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI PADA DESA NELAYAN SAMBIROTO
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI)**

Amin Kuncoro¹

***Abstract: Influence of Coastal Women's Empowerment for the Improvement of Public Welfare (Study on the District Fishermen Village Sambiroto Kabupaten Tayu Pati).** Coastal and marine areas adalah suatu strategic area for the development of various business sectors. In addition the coast is rich in natural resources that are strategically able to increase human resources in the environment sekitarnya. The growing number of business sectors, with stakeholder dalam development of coastal and marine areas, in the absence of coherence in development it will create a new konflik konflik. Fedriansyah (2008) in his research entitled Evaluation of Economic Empowerment of Coastal Communities in Muna, said that coastal communities are identical with individuals who live in the area around the beach which is sometimes forgotten by development because government policies have focused on coastal development, Iin Indarti, Ward, 2010. Coastal communities are the people who live and develop social life in the sea or near the sea waters and typically spend most of his life on the waters of the sea. Empowerment of women, especially in the coastal village of the District Sambiroto Tayu Pati regency, synonymous with the motivation that aims to improve living standards. In other words, that women have a stock of coastal diharuskan to develop in accordance with the existing productive resources. From the above phenomena, the formulation of the research problem is how to influence the empowerment of women to the welfare of coastal communities, whereas dari penelitian goal is to determine the extent of the impact of community empowerment to improve welfare. This research is a quantitative descriptive which describe the existing findings in the field and then analyzed for the effect by using regression, the sample was women in the coastal village of the District Sambiroto Tayu Pati regency totaling 30 people. Results from this study is the empowerment of women affect the increased well-being, this is because women have activity outside the coast of everyday tasks that produce various kinds of food though are made from marine products. This is what has been the driver of the rural economy, especially on the north coast of the island of Java, the village Sambiroto District of Tayu.*

Abstrak: Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati). Wilayah pesisir dan laut adalah suatu kawasan yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Selain itu pesisir kaya akan sumberdaya alam yang secara strategis mampu meningkatkan sumberdaya manusia di lingkungan sekitarnya. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan menciptakan konflik konflik baru. Fedriansyah

¹ Dosen Praktisi Pemasaran dan Kewirausahaan Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati, email: amin_kuncoro@yahoo.com

(2008) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Muna, mengatakan bahwa masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir, Iin Indarti, Wardana, 2010. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di perairan laut atau dekat perairan laut dan secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut. Pemberdayaan perempuan pesisir khususnya di Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, identik dengan pemberian motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan kata lain bahwa perempuan pesisir diharuskan mempunyai bekal untuk berkembang sesuai dengan sumberdaya produktif yang ada. Dari fenomena diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan perempuan pesisir bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya pemberdayaan masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan temuan-temuan yang ada dilapangan kemudian dianalisis untuk mencari pengaruh dengan menggunakan regresi, sampelnya adalah perempuan pesisir di Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang berjumlah 30 orang. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, hal ini dikarenakan perempuan pesisir mempunyai aktivitas diluar tugas sehari-hari yaitu menghasilkan berbagai jenis makanan olah yang berbahan dasar hasil laut. Inilah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi pedesaan khususnya di pesisir utara Pulau Jawa yaitu didesa Sambiroto Kecamatan Tayu.

Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan pesisir dan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan bagian dari komunitas yang sangat rentan akan permasalahan berkenaan dengan peluang kerja. Terdapat berbagai masalah mengenai keterbatasan perempuan untuk memperoleh sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: pertama, dari pihak perempuan sendiri tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang cukup memadai, kedua, pihak institusi pemilik pekerjaan yang seringkali mempersyaratkan kompetensi yang relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan perempuan dengan kompetensi yang rendah amat sulit untuk menjangkau, Setyawati, 2011.

Perempuan masyarakat nelayan pada umumnya bekerja sebagai pengasuh anak, mengolah dan menjual hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari suaminya. Selain itu, mereka sering membentuk kelompok-kelompok arisan. Namun, kegiatan yang mereka lakukan tidak dapat mengubah status keluarga dan posisi mereka sebagai komunikasi yang berhadapan dengan permasalahan, (Marwiah, 2012).

Pada tataran sosial (masyarakat pesisir), dominasi perempuan pesisir dalam sektor ekonomi, telah menempatkan mereka sebagai kontributor penting terhadap dinamika ekonomi kawasan pesisir. Stabilitas dinamika ekonomi pesisir sangat menentukan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peranan yang demikian dapat dirasakan jika kita mengamati kehidupan sosial-ekonomi di desa-desa nelayan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar. Kontribusi ekonomi perempuan pesisir terhadap kehidupan

masyarakatnya merupakan wujud kapasitas aktualisasi diri mereka dan sebagai realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Mereka dapat dianggap sebagai modal pemberdayaan. Perempuan pesisir yang harus bekerja dalam konteks ketiga jenis tanggung jawab di atas merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan kehidupan, yang dianut dan disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat pesisir, Kusnadi, 2015.

Pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, (2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan (4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama, Sipahelut, 2010.

Strategi pengembangan masyarakat pantai terdapat dua pendekatan yaitu, pendekatan struktural dan non struktural. Pendekatan struktural yaitu pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut.

Pendekatan non struktural adalah pendekatan subyektif. Pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut.

a. Pendekatan Struktural

Adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit.

Langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk pendekatan struktural:

- Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.
- Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ekonomi.
- Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Proses Pengambilan Keputusan.
- Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.
- Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.
- Pengembangan Jaringan Pendukung.

Setyawati, 2011.

b. Pendekatan non Struktural

Adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Dengan asumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya.

Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Peran domestik perempuan pesisir dilaksanakan dalam kedudukan sebagai isteri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah pekerjaan-pekerjaan di seputar rumah tangga, seperti menangani pekerjaan dapur, membersihkan rumah, mengasuh dan mendidik anak, menyediakan kebutuhan sekolah anak-anak, dan menyiapkan bekal suami melaut. Bagi rumah tangga nelayan yang mampu, mereka

akan meminta bantuan kerabatnya untuk meringankan tanggung jawab pekerjaan domestik. Posisi suami dalam tanggung jawab domestik ini bersifat "membantu semata", jika kesempatan memungkinkan. Peranan domestik adalah kewajiban pertama perempuan pesisir, Kusnadi, 2015.

Pada tataran sosial masyarakat pesisir, dominasi perempuan pesisir dalam sektor ekonomi, telah menempatkan mereka sebagai kontributor penting terhadap dinamika ekonomi kawasan pesisir. Stabilitas dinamika ekonomi pesisir sangat menentukan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peranan yang demikian dapat dirasakan jika kita mengamati kehidupan sosial-ekonomi di desa-desa nelayan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar. Kontribusi ekonomi perempuan pesisir terhadap kehidupan masyarakatnya merupakan wujud kapasitas aktualisasi diri mereka dan sebagai realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Mereka dapat dianggap sebagai modal pemberdayaan. Perempuan pesisir yang harus bekerja dalam konteks ketiga jenis tanggung jawab di atas merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan kehidupan, yang dianut dan disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat pesisir.

Penciptaan sumber pendapatan melalui mata pencaharian alternatif merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab kelangsungan hidup rumah tangga nelayan. Illo dan Polo (1990:117) menyimpulkan bahwa rumah tangga nelayan akan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan jika hanya bertumpu pada aktivitas dari melaut karena sumber daya perikanan terus mengalami penipisan. Dengan demikian maka untuk bisa bertahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, nelayan harus mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor penangkapan, berdagang, bertani, dan beternak. Dalam aktivitas matapencaharian tambahan tersebut, kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif.

Terdapat beberapa hal dalam meningkatkan mata pencaharian nelayan sehingga nelayan bisa memberdayakan sumberdaya produktif dan ekonomi kreatif, yaitu: Pertama, jenis-jenis mata pencaharian alternatif yang akan dikelola perempuan pesisir sangat bergantung pada struktur dan potensi sumber daya ekonomi lokal, baik yang tersedia di kawasan pesisir, maupun dengan mendayagunakan potensi sumber daya laut. Identifikasi potensi sumber daya alam ini sangat penting, karena menjadi dasar aktivitas ekonomi alternatif. Lahan pesisir bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian tanaman bahan pangan (hortikultura) dan buah-buahan.

Kedua, penentuan jenis usaha sebagai mata pencaharian alternatif akan berpengaruh terhadap pilihan teknologi dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung usaha tersebut.

Ketiga, jaringan pemasaran yang luas dan jauh untuk menjamin keberlanjutan usaha dari mata pencaharian alternatif. Selama ini produk-produk industri kecil-menengah di desa-desa nelayan memiliki jangkauan konsumen dan wilayah pemasaran yang terbatas, maksimal berbasis hanya di tingkat kabupaten terdekat (Kusnadi dkk. 2005).

Ketersediaan teknologi dan peralatan hanya merupakan salah satu kebutuhan dari keseluruhan kebutuhan mata rantai proses penciptaan mata pencaharian alternatif yang dirancang secara berkelanjutan. Eksistensi suatu matapencaharian alternatif akan berkelanjutan jika potensi sumber daya yang menjadi bahan baku usaha mudah diperoleh dan tersedia di tingkat lokal. Berkembangnya mata pencaharian alternatif di kalangan masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai upaya komprehensif mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Jika upaya ini berhasil, akan menjadi jaminan bagi kelangsungan dinamika ekonomi di kawasan pesisir, Kusnadi, 2015.

Kondisi perempuan pesisir di desa Sambiroto

Desa Sambiroto merupakan desa nelayan yang terletak di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan sumber daya alam laut khususnya, desa ini terkenal dengan posisi strategisnya karena tepat berada di pesisir utara Laut Jawa, sehingga tingkat kesibukan warganya masih tergantung dengan hasil lautnya, akan tetapi minimnya teknologi yang ada, membuat warga

di perkampungan nelayan ini, menjadi sarat akat permasalahan diantaranya adalah belum maksimalnya sumber daya produktif khas laut, dengan kata lain bahwa kekayaan hasil laut yang dihasilkan oleh Desa Sambiroto tersebut belum mencapai taraf yang baik, bahkan ada kecenderungan mengalami kemerosotan terutama apabila dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu pada waktu siang hari.

Padahal apabila dilihat lebih mendalam, maka aspek sumberdaya produktif yang berada di desa Sambiroto tersebut sangat baik karena letaknya berdekatan dengan pasar tradisional dan akses jalan menuju kelaut.

Namun sebagian besar warga masih menggantungkan hasil laut dan tidak pernah mencoba untuk mengolah menjadi sumber ekonomi kreatif. Sebagian besar dampak perekonomian yang muncul di desa Sambiroto adalah semakin menipisnya hasil tangkapan, sehingga masyarakat apatis dengan tingkat perkembangan teknologi yang digunakannya. Oleh sebab itu pencapaian kepuasan yang perlu dirasakan oleh wanita-wanita khususnya tentang hasil laut, perlu mendapatkan perhatian yang serius, tujuannya adalah kemandirian dan pemberdayaan perempuan yang bertumpu pada meningkatnya pengasilan atau peningkatan sumber ekonomi kreatif.

Rumusan masalah adalah untuk merumuskan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, kemudian dituangkan dalam karya ilmiah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan perempuan pesisir terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan perempuan pesisir pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan

Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekwen melaksanakan keputusan tersebut.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Ife (1995), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan
- 5) Sumber-sumber; kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

- 6) Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi, dan tujuan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi didasarkan atas pemikiran Pareto dimana kesejahteraan ekonomi akan meningkat jika seseorang menjadi lebih baik dan tidak ada seorangpun yang menjadi lebih jelek, Usus, (2012).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi topek penting dalam setiap diskusi maupun perdebatan public, sehingga ke depan pemerintah berkonsentrasi pada titik-titik melemahnya kesejahteraan ekonomi. Pencapaian indikator kesejahteraan ekonomi di Indonesia menjadi hal yang patut ditindaklanjuti lebih seksama, sehingga hasilnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ciri-Ciri Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Kenneth Arrow merumuskan bahwa suatu fungsi kesejahteraan sosial mempunyai ciri ciri sebagai berikut ini.

1. Pilihan-pilihan bersifat transitif
2. Pilihan tidak dapat dipaksakan oleh seorang individu
3. Perbaikan-perbaikan kepuasan seseorang tanpa penurunan tingkat kepuasa yang lainya tidak dapat menurunkan/mengurangi peringkat kesejahteraan sosial.
4. Peringkat pilihan seseorang berhubungan dengan lainnya tidak ternggantungan pada berbagai pilihan alternatif

Walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Harold L. Wilensky (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya menjadi salah satu bahasan utama dalam makalah ini. Minimnya lapangan pekerjaan, pembangunan yang tidak merata dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah menjadi salah satu contoh penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), masih belum bisa mengembangkan potensinya terhadap SDA yang ada, sehingga SDA yang kita punya belum dapat diolah sendiri. Hal itu

disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan membahas masalah kesejahteraan ini dengan mengaitkannya pada Pasal 27 UUD 1945, yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penulisan menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan kajian kepustakaan serta observasi secara langsung pada Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dalam pemilihan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala tertentu pada obyek kajian. Dalam tulisan ini menggambarkan tentang kondisi masyarakat di pesisir khususnya Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi survey, wawancara dan kuesioner. Data sekunder bersumber dari buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet dan jurnal. Dari beberapa sumber tersebut diharapkan dapat memperkuat pembahasan Pendekatan penulisan

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan Pesisir Desa Sambiroto pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan. Konsep utama sebuah pemberdayaan adalah semakin meningkatnya kondisi saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan pesisir adalah memaksimalkan konsep diri bagi setiap individu yang ada di lokasi pesisir. Tingkat kesejahteraan ekonomi pesisir, diukur dengan semakin tingginya sumberdaya ekonomi desa di pesisir, dengan kata lain bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan ekonomi yang baik.

Sumber-sumber pendukung peningkatan sumberdaya ekonomi desa di pesisir, mencakup nilai-nilai yang terkandung dari setiap lingkungan yang ada di desa, sehingga kondisi sosial ekonomi maupun sosial budaya di pesisir semakin membaik seiring berjalannya kondisi desa tersebut.

Beberapa manfaat bagi rakyat cukup lewat peningkatan cadangan kekayaan alam laut, penciptaan lapangan meskipun bukan pekerja ahli atau dari pembayaran pajak dan royalti. Padahal faktanya, dengan pengelolaan yang terjadi saat ini, bagian pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh swasta.

Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan masyarakat pesisir agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun 2015. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk memberdayakan perempuan pesisir adalah:

Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM.

Sumber daya manusia (SDM) begitu menjadi sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan guna menghadapi persaingan tersebut. Jika diamati sesungguhnya SDM Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah dan instansi terkait dalam memajukan dan meningkatkan kualitas kompetensi SDM Indonesia agar dapat bersaing dengan SDM dari Negara-negara ASEAN lainnya.

Program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal

Pemberdayaan ekonomi dengan mengutamakan produk asli daerah dan memunculkan nilai-nilai potensi daerah, mengundang banyak pertanyaan, sehingga pemerintah sebagai fasilitator dari daerah ke pusat-pusat kota lain, memunculkan ide2 segar yang patut dipelajari dengan seksama. Alasannya adalah dengan menciptakan potensi lokal dengan kualitas global.

Setelah melakukan olah data dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows maka hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, hal ini dibuktikan karena nilai t hitung 1.902 lebih besar dari t tabel 1.699, dengan nilai signifikansi 0.002. hal ini dibuktikan bahwa perempuan pesisir mempunyai kegiatan positif yaitu dengan memaksimalkan konsep diri dengan berupaya menciptakan kreatifitas. Pembuktian adanya pemberdayaan perempuan yang telah berupaya untuk meningkatkan perempuan pesisir adalah dengan semakin mengembangkan kelompok usaha bersama (KUB) di berbagai wilayah pesisir di Kabupaten Pati.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pra nikah

Pada dasarnya sebuah keluarga dibangun dengan berbagai cara agar mampu bertahan, dengan kata lain eksistensi pembangunan mental bagi keluarga pra sejahtera dibutuhkan waktu dan komitmen untuk maju mengembangkan keluarga yang sejahtera.

Akan tetapi kesejahteraan tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena banyak indikator yang harus dipenuhi agar kesejahteraan tersebut bisa tercapai. Kebijakan yang sering muncul di pusat, membuat masyarakat yang hidupnya dibawah normal (kesejahteraan masih sebatas symbol), sehingga berbagai daerah masih merasa bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kebijakan yang sama. Kebijakan yang muncul sebenarnya diperuntukan untuk semua lapisan masyarakat, dari kota sampai pada pelosok pedalam atau desa-desa. Namun minimnya informasi membuat kebijakan tidak pernah sampai pada yang tujuan.

Kesejahteraan bagi masyarakat pra nikah sebetulnya dibangun dengan inisiatif manusia atau sumberdaya manusia yang ada, akan tetapi kebiasaan yang membuat mereka merasa nyaman dengan kondisi masih sendiri, membuat mereka terbentur dengan time kehidupan yang konsumtif bahkan ada kecenderungan berbuat melebihi batas kemampuan sumber keuangan mereka.

Kesejahteraan setelah nikah

Kesejahteraan yang dibangun setelah masyarakat mempunyai pilihan hidup dan pedamping hidup, membuat mereka memikirkan aspek kedepan walaupun tanpa mempunyai bekal informasi yang cukup. kebijakan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pasangan muda, belum mempunyai efek yang tepat, sehingga munculnya keluarga kecil yang masih belum sejahtera, membuat beban kegiatan ekonomi semakin tumpang tindih, inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, karena keluarga yang dibangun dengan bekal seadanya, amak tidak pernah mampu bertahan pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Berbeda dengan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah membuat masyarakat mengerti akan fungsi-fungsi kemasyarakatan, kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui beberapa informasi dan sosialisasi, mempunyai dampak yang luar biasa, karena masyarakat akan mengetahui dengan jelas bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan ataupun perkotaan, membuat fungsi-fungsi sumber daya ekonomi pedesaan dan fungsi sumberdaya manusia menjadi lebih mempunyai nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Desa Sambiroto adalah sebuah desa yang kaya akan sumberdaya manusia yang produktif, memiliki kekayaan alam yang melimpah dikarenakan terletak dipesisir utara tepatnya di Kabuapten Pati wilayah Kecamatan Tayu yang berada di dekat laut. Kekayaan alam dan potensi sumberdaya manusia yang kreatif itulah yang semestinya mendapatkan perhatian yang lebih daripada hanya sekedar memenuhi tugas, sehingga dampak ekonomi kreatif melalui pemberdayaan perempuan didesa Sambiroto mempunyai nilai yang lebih disbanding dengan desa-desa lain. Munculnya berbagai KUB (Kelompok Usaha Bersama) di berbagai Kecamatan terutama di wilayah pantura, hal ini merupakan indikator tercapainya pemberdayaan perempuan.

Saran

Dengan melihat adanya sumberdaya manusia produktif inilah seharusnya pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten bergandengan tangan untuk memajukan potensi daerah dengan memberdayakan perempuan, buka hanya sekedar memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, namun lebih mengarah kepada memberdayakan dalam arti yang sesungguhnya, sehingga fungsi-fungsi dari keberagaman penduduk nelayan atau daerah pesisir akan kelihatan manfaatnya...

DAFTAR PUSTAKA

- Fedriansyah, A. M. (2008). Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kecamatan Tugu, Semarang. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harold L. Wilensky, (1965). "The Problems and Prospects of the Welfare State" dalam *Industrial Society and Social Welfare*. ed. Wilensky and Lebeaux. . New York : The Free Press.
- Kusnadi (2015). *Ekonomi Koprasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi UI.
- Setyawati, Yuli. (2005). Pola Komukasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak Pada Keluarga Jawa). *Jurnal IlmuKomunikasi* Volume 2, Nomor 1, Juni 2005:67<http://arsip.uui.ac.id/files/2012/08/05.2-bab-2103.pdf> (tanggal akses 21Mei 2013).
- Suryana, Y & Bayu, K. (2010). *Kewirausahaan, Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

PENGARUH MODAL MANUSIA DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA YANG DIMEDIASI OLEH KOMPETENSI ORGANISASI

Winarno¹
Sri Wahyuni Widiastuti²

***Abstract: Effect of Human Capital and Organizational Learning on the performance mediated by the Organization Competence.** This study aims at examining and analyzing: The Influences of Human Capital and Organizational Learning on Organizational Performance Mediated by Organizational Competence. The object and sample of this study were the Private Higher Education Institutions in Kopertis V Yogyakarta. This study used a survey approach with cross sectional design. The technique for collecting the samples was total sampling or census. The respondents in this study were the Private Higher Education Institutions having at least 50% accredited study programs. The testing model was Structural Equation Modeling (SEM) using Partial Least Square (PLS) method. The results show that: (1) Intellectual capital is the most important indicator of human capital in increasing organizational performance that is reflected in the improvement of learning system, (2) Personal skills are the most important indicators of organizational learning in improving organizational performance as reflected by the improvement in the learning system, (3) The quality of education and teaching is the most important indicator of the organizational competence in improving organizational performance which is reflected by the learning system improvement; Organizational competence as the mediating variable of the influence of human capital on organizational performance is partial, (4) The quality of education and teaching as the most important indicator of the organizational competence is capable of mediating the influence of organizational learning on organizational performance. Organizational competence as the mediating variable of the influence of organizational learning on organizational performance is partial, and (5) Human capital serves as more dominant factor in improving organizational performance than the organizational learning.*

Abstrak: Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja yang Dimediasi oleh Kompetensi Organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: Pengaruh Human Capital dan Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dimediasi oleh Kompetensi Organisasi. Objek dan sampel penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di Kopertis V Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan rancangan cross sectional. Teknik pengumpulan sampel adalah total sampling atau sensus. Responden dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki sedikitnya 50% program studi yang terakreditasi. Model pengujian adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modal intelektual adalah

1 Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: winarno_feupn@yahoo.com

2 Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

indikator yang paling penting dari modal manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi yang tercermin dalam perbaikan sistem pembelajaran, (2) keterampilan pribadi adalah indikator yang paling penting dari pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi sebagai tercermin dari peningkatan dalam sistem pembelajaran, (3) Kualitas pendidikan dan pengajaran adalah indikator yang paling penting dari kompetensi organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi yang tercermin oleh peningkatan sistem pembelajaran; Kompetensi organisasi sebagai variabel mediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi adalah parsial, (4) Kualitas pendidikan dan pengajaran sebagai indikator yang paling penting dari kompetensi organisasi yang mampu menengahi pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi. Kompetensi organisasi sebagai variabel mediasi pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi adalah parsial, dan (5) Modal manusia berfungsi sebagai faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kinerja organisasi dari organisasi belajar.

Kata Kunci: Human Capital, Learning Organisasi, Kompetensi Organisasi, dan Kinerja Organisasi.

PENDAHULUAN

Organisasi akan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan memiliki kinerja superior apabila organisasi mempunyai kompetensi (Barney, 1991). Kompetensi organisasi meliputi semua aset-aset strategis baik yang berwujud (*tangible assets*) seperti: *physical capital*, *financial capital* dan *structural capital*, maupun yang tidak berwujud (*intangible assets*) seperti: *human capital*, *organizational reputation* dan *managerial capacity*) (Prahalad dan Hamel, 1990; Rumelt, 1991; Barney, 1991; dan Pateraf, 1993).

Sumber daya tak berwujud (*intangible assets*) dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap organisasi dibanding dengan sumber daya berwujud (Amit dan Schoemaker, 1993; Barney, 1991; dan Conner, 2002). Perguruan tinggi yang memiliki aset tak berwujud khususnya kualitas modal manusia merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja superior. Karena dengan modal manusia yang berkualitas, maka kompetensi organisasi akan meningkat yang berdampak pada peningkatan daya saing organisasi.

Penelitian di Universitas Cambridge menemukan bahwa modal manusia (modal intelektual, modal sosial, modal organisasi dan pengetahuan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Stiles and Kulvisaechana, 2004). Bukti empiris yang lain dilakukan penelitian pada 34 universitas di Eropa (Jerman, Spanyol, Perancis, Swedia dan Inggris).menemukan menunjukkan bahwa modal manusia (pendidikan, ketrampilan dan kompetensi) berpengaruh signifikan terhadap kinerja baik pada universitas negeri maupun swasta (Hansson *et al.*, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh: (1) modal manusia terhadap kinerja organisasi, (2) pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi, (3) modal manusia terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh kompetensi organisasi, (4) pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh kompetensi organisasi.

Menurut Stockely (2003) bahwa *human capital* adalah: *The term human capital is recognition that people in organization and business are importance and essential assets who contribute to development and growth, an similar way as physical assets such us machine and money. The collective attitude, skills and abilities of people contribute to organizational performance and productivity. Any expenditure in training, development, health and support is an investment not just an expense.*

Edvinson dan Malone (1997) mendefinisikan: *human capital is individual knowledge, experience, capability, skills, creativity, innovativeness*. *Knowledge* merupakan pengetahuan mengenai teks akademik yang diperoleh melalui pendidikan, dan *skills* merupakan kemampuan untuk bekerja untuk memenuhi kemampuan praktikal. Pengetahuan dan ketrampilan tidak datang secara alami, tetapi perguruan tinggi harus secara sengaja meningkatkan hal tersebut melalui investasi pada modal manusia.

Sementara itu (Ross, *at al.*, 1997; Goleman, 1997; Fukuyama, 1995; Stoltz, 1997; Lennick & Kiel, 1995) dalam Ancok (2002) mengemukakan bahwa modal manusia secara komprehensif meliputi: (1) modal intelektual, (2) modal emosional, (3) modal sosial, (4) modal ketabahan, dan (5) modal moral. Oleh karena itu dalam penelitian ini dimensi *modal capital* yang akan digunakan adalah dari ke lima dimensi tersebut digunakan sebagai indikator *human capital*. Perguruan tinggi yang mencetak para pioneer pembangunan bangsa ini harus mengembangkan modal manusia yang menyangkut:

- a) Modal intelektual (*intellectual capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan kemauan dan kemampuan berfikir untuk memikirkan sesuatu yang baru.
- b) Modal emosional (*emotional capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan sikap positif dalam organisasi dalam menghadapi perubahan.
- c) Modal social (*social capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan kerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai keberhasilan.
- d) Modal ketabahan (*adversity capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan sikap tabah dalam menghadapi berbagai tantangan.
- e) Modal moral (*morality capital*), dimana perguruan tinggi mengembangkan citra baik bagi organisasi.

Organisasi yang melakukan pembelajaran organisasi adalah organisasi yang memiliki keahlian dalam menciptakan, mengambil, dan mentransfer pengetahuan, serta memodifikasi perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman barunya. Pembelajaran organisasi menolak stabilitas dengan cara terus menerus melakukan evaluasi diri dan eksperimenasi. Baldwin *et al.* (1997) menyatakan bahwa anggota organisasi dari semua tingkatan, tidak hanya manajemen puncak, terus melakukan pengamatan lingkungan dalam upaya memperoleh informasi penting, perubahan strategi dan program yang diperlukan untuk memperoleh keunggulan dari perubahan lingkungan, dan bekerja dengan metode, prosedur, dan teknik evaluasi yang terus menerus diperbaiki. Organisasi yang bersedia untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari pengalaman-pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukannya (Wheelen and Hunger, 2002). Agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dan berkinerja tinggi dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, organisasi harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya (Marquardt, 1996).

Dimensi pengukuran pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka studi ini menggunakan 6 (enam) dimensi pembelajaran organisasi yang dibangun oleh Marquardt (1996:30), yakni.

- a. Sistem berpikir, yakni kerangka konseptual seseorang yang digunakan untuk membuat pola yang lebih jelas, dan untuk membantunya melihat bagaimana mengubah mereka secara efektif.
- b. Model mental, yakni asumsi-asumsi yang melekat secara mendalam tentang bagaimana pengaruh pemahaman terhadap dunia luar dan bagaimana seseorang mengambil tindakan. Misalnya, bagaimana dampak model mental atau image belajar atau bekerja atau patriotisme terhadap perilaku seseorang dan bagaimana seseorang bertindak pada situasi dimana konsep-konsep tersebut terjadi.
- c. Keahlian personal, mengindikasikan kecakapan atau keahlian tingkat tinggi. Hal ini menuntut komitmen jangka panjang untuk terus belajar sehingga dapat membangun keahlian serta

- mencurahkan kecakapan tersebut dalam organisasi.
- d. Kerjasama tim, yakni keahlian yang difokuskan pada proses menyatukan dan membangun kapasitas tim untuk menciptakan pembelajaran dan menghasilkan anggota-anggota yang benar-benar diharapkan.
 - e. Keahlian membagi visi bersama, yaitu keahlian agar setiap anggota organisasi memusatkan segala usahanya pada satu visi yang membangun berkembangnya komitmen sejati.
 - f. Dialog, yakni kemampuan untuk mendengar, berbagi dan komunikasi tingkat tinggi diantara anggota organisasi. Keterampilan ini menuntut kebebasan dan kreativitas mengeksplorasi isu-isu, kemampuan untuk saling mendengar secara mendalam, dan menanggukhkan pandangannya sendiri.

Kompetensi organisasi merupakan kemampuan mengorganisir pekerjaan dan menyampaikan nilai; kompetensi dapat meliputi komunikasi, keterlibatan dan komitmen yang besar untuk bekerja sepanjang batas-batas organisasi (Pralhad *and* Hamel, 1990; Kogut *and* Zander, 1992). Kompetensi juga dapat dirasakan sebagai aset-aset perantara yang diturunkan perusahaan untuk meningkatkan produktifitas sumberdayanya, seperti fleksibilitas strategi dan perlindungan terhadap produk dan jasa-jasa akhir perusahaan (Amit *and* Schoemaker, 1993).

Kompetensi suatu perguruan tinggi dalam penelitian ini tercermin dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan falsafah yang diamanatkan oleh pemerintah bagi institusi perguruan tinggi, yaitu: 1) Kualitas pendidikan dan 2) Kualitas Penelitian, dan 3) Kualitas pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian atas tingkat kinerja suatu perguruan tinggi dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan yang terlebih dahulu telah ditetapkan, dari ke 3 bidang kegiatan tersebut.

Reukert., *at al.* (1985) mendefinisikan kinerja organisasi adalah efektivitas yang mencakup tercapainya tujuan organisasi, efisiensi yang mempertimbangkan hubungan antara input dan output yang diperlukan untuk mencapai output, dan adaptasi yang merefleksikan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan (dalam Homburg, *et al.*, 1999). Kinerja suatu organisasi mencerminkan seberapa efektif produk/jasa yang dihasilkan dan bagaimana organisasi dapat menyampaikan kepada pelanggan. Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi bertugas merancang, menghasilkan dan meneruskan melalui pelayanan-pelayanan (Mathis dan Jackson, 2001), oleh karena itu salah satu sasaran Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah menciptakan kegiatan yang memberikan kontribusi tercapainya *superior performance*.

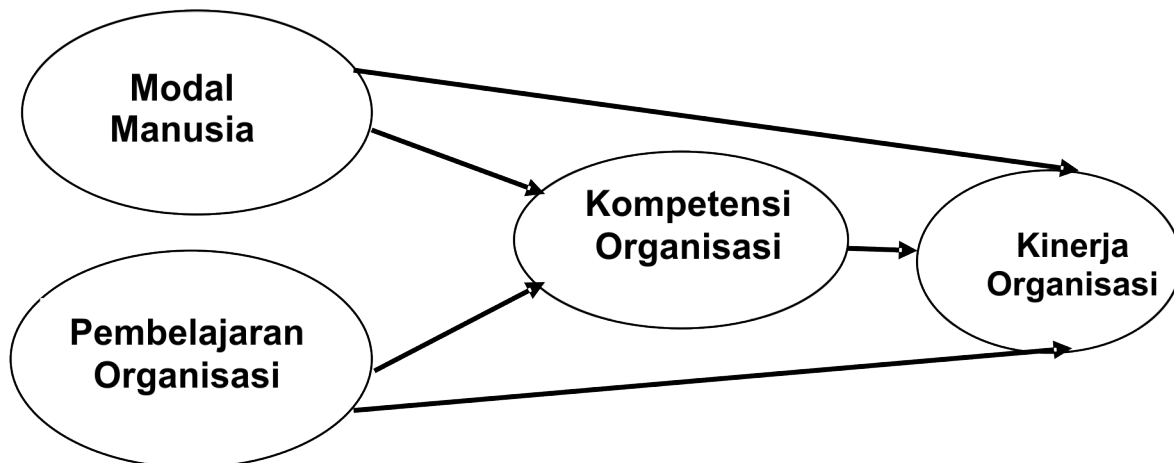
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program- programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang mencakup 15 standar akreditasi, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Kemahasiswaan, 3. Sumber daya manusia, 4. Kurikulum, 5. Prasarana dan Sarana, 6. Pendanaan, 7. Tata pamong (*governance*), 8. Sistem pengelolaan, 9. Sistem pembelajaran, 10. Suasana akademik, 11. Sistem informasi, 12. Sistem jaminan mutu internal, 13. Lulusan, 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 15. Program studi.

Diterminan modal manusia yang menyangkut modal intelektual, emosional/sosial dan spiritual dipandang sebagai pengaruh penentu terhadap kinerja organisasi dengan memiliki kompetensi dan selalu berinovasi, sehingga organisasi harus berinvestasi dalam peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh keunggulan bersaing dan berkinerja tinggi (Fernandes, *et al.* (2005) dan Ukenna, *et al.* (2010). Kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi (Absah, 2007 dan Abidin, 2010).

Pembelajaran organisasi (pengetahuan dan ketrampilan) dapat meningkatkan kompetensi (keunggulan bersaing) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja organisasi (ZongDai, *et al.*, (2005). Praktik sumber daya manusia melalui pembelajaran organisasi dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja (Kasim, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar: 1 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada kerangka penelitian Gambar 1, maka hipotesis yang diusulkan adalah:

- Ada pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi
- Ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi
- Ada pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh kompetensi organisasi
- Ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh kompetensi organisasi.

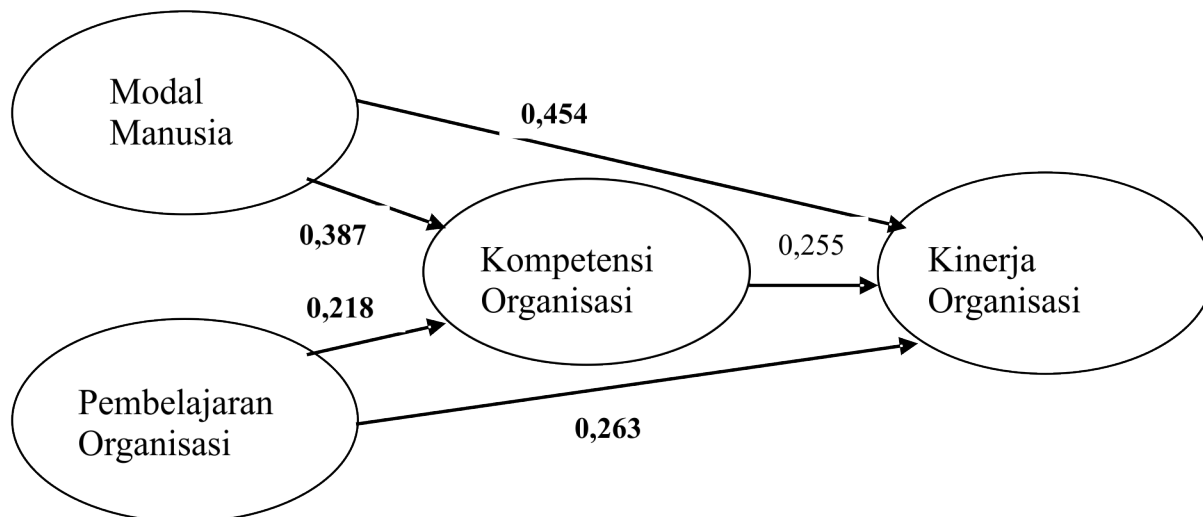
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif dengan menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis, sedangkan data yang digunakan secara umum berupa angka-angka yang dihitung melalui uji statistik (Singarimbun dan Effendi, 1995). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu bahwa sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengelompokan sampel adalah: (1) Rektor dan Wakil Rektor untuk Universitas dan Institut, (2) Direktur dan Wakil Direktur untuk Akademi dan Politeknik. Jumlah populasi sebanyak 116 PTS, dimana sampel didasarkan pada PTS yang memiliki 50% program studinya terakreditasi sebanyak 53 PTS

Metoda untuk menganalisis data sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti, maka dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Metode ini dipilih karena penelitian ini melibatkan serangkaian hubungan kausalitas di antara variabel modal manusia (human capital), budaya inovasi dan kinerja.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (*SEM*) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Seperti halnya *SEM*, analisis *PLS* meliputi dua tahap, yaitu:



Gambar 2

Model Struktural Hasil PLS

Pengujian Hipotesis

Pengujian Pengaruh Langsung

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kedua pengaruh langsung, baik pengaruh langsung modal manusia terhadap kinerja organisasi maupun pengaruh langsung pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi hasilnya adalah signifikan.

Tabel 1

Model Pengujian Pengaruh Langsung dalam *Inner Model*

Hubungan Antar Variabel	<i>Inner Weight</i>	T-Statistik	<i>P-value</i>	Keterangan
Modal Manusia → Kinerja organisasi	0.454	9.870	0.000	Signifikan
Pembelajaran Organisasi → Kinerja organisasi	0.263	6.262	0.000	Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, maka hasil pengujian model struktural dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengujian pengaruh langsung Modal Manusia terhadap Kinerja Organisasi, diperoleh nilai koefisien *inner weight* sebesar 0.454, dengan nilai T-statistik sebesar 9.870, dan p-value sebesar 0.000. Karena nilai T-statistik > 1.96, dan p-value < 0.05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara Modal Manusia terhadap Kinerja Organisasi. Koefisien *inner weight* yang dihasilkan bertanda positif, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara modal manusia dengan kinerja organisasi positif. Artinya, semakin tinggi Modal Manusia, akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kinerja Organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa semakin tinggi Modal Manusia dapat meningkatkan kinerja Organisasi terbukti.
- Pengujian pengaruh langsung Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja Organisasi,

diperoleh nilai koefisien *inner weight* sebesar 0.263, dengan nilai t-statistik sebesar 6.262, dan p-value sebesar 0.000. Karena nilai t-statistik > 1.96 , dan p-value < 0.05 , maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja Organisasi. Dengan diperoleh koefisien *inner weight* bertanda positif, mengindikasikan bahwa hubungan pembelajaran organisasi positif. Artinya, semakin tinggi Pembelajaran Organisasi, akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kinerja Organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan semakin tinggi Pembelajaran Organisasi dapat meningkatkan Kinerja Organisasi terbukti.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)

a. Uji Mediasi Pengaruh Modal Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Yang Dimediasi Kompetensi Organisasi

Tabel 2
Hasil Uji Mediasi Pengaruh Modal Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Yang Dimediasi Kompetensi Organisasi

	original sample estimate	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Modal Man -> Kinerja (a)	0.454	9.870	0.000	a = koefisien jalur pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi dengan variabel mediasi
Modal Man-> Kompetensi (c)	0.239	2.414	0.016	c= koefisien jalur pengaruh modal manusia terhadap kompetensi organisasi dengan variabel mediasi
Kompetensi -> Kinerja (d)	0.255	5.204	0.000	d = koefisien jalur pengaruh kompetensi organisasi terhadap kinerja organisasi dengan variabel mediasi
Modal Man-> Kinerja (b)	0,490	6,157	0,000	b = koefisien jalur pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi tanpa variabel mediasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2 terdapat pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi (a), pengaruh modal manusia terhadap kompetensi organisasi (c), kompetensi organisasi terhadap kinerja organisasi (d) signifikan, dan terdapat pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi tanpa variabel kompetensi organisasi (b) signifikan, dimana (a) mempunyai nilai koefisien lebih kecil (turun) dari pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi tanpa variabel kompetensi organisasi (b), maka dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi organisasi sebagai mediasi parsial (*partial mediation*) pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi. Hal ini membuktikan bahwa modal manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi secara langsung dan juga dapat melalui kompetensi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis (H3) yang menyatakan semakin tinggi Modal Manusia akan semakin tinggi Kinerja Organisasi yang dimediasi Kompetensi Organisasi terbukti.

b. Uji Mediasi Pengaruh Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Yang Dimediasi Kompetensi Organisasi

Tabel 2, menunjukkan terdapat pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi (a), pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kompetensi organisasi (c), kompetensi organisasi terhadap kinerja organisasi (d) signifikan, dan terdapat pengaruh langsung pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi tanpa variabel kompetensi organisasi (b) signifikan, dimana nilai koefisien (a) mempunyai nilai lebih kecil (turun) dari pengaruh pembelajaran organisasi tanpa variabel kompetensi organisasi terhadap kinerja organisasi (b), maka dapat dikatakan variabel kompetensi organisasi sebagai mediasi parsial (*partial mediation*) pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini membuktikan

bahwa pembelajaran organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara langsung dan juga dapat melalui kompetensi organisasi.

Tabel 3
Hasil Uji Pengaruh Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Yang Dimediasi Kompetensi Organisasi

	original sample estimate	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Pembelajaran Org. -> Kinerja (a)	0.263	6.262	0.000	a = koefisien jalur pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi dengan variabel mediasi
Pembelajaran Org. -> Kompetensi (c)	0.218	2.158	0.031	c = koefisien jalur pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kompetensi organisasi dengan variabel mediasi
Kompetensi -> Kinerja (d)	0.255	5.204	0.000	d = koefisien jalur pengaruh kompetensi organisasi terhadap kinerja organisasi dengan variabel mediasi
Pembelajaran Org. -> Kinerja (b)	0.296	4.477	0.000	b = koefisien jalur pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi tanpa variabel mediasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Khandekar *and* Sharma, 2006; Wang *and* Lo, 2003; Said, 2002; Absah, 2007; dan Therin, 2003, yang menemukan bahwa pembelajaran organisasi secara langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu mendukung penelitian Marquardt (1996) yang menemukan bahwa pembelajaran organisasi (Sistem berpikir, Model mental, Keahlian personal, Kerjasama tim, Keahlian membagi visi bersama dan Dialog/diskusi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Penelitian ini juga mendukung teori pembelajaran organisasi dari Argyris (1976) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran organisasi adalah proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan juga mendukung teori pembelajaran organisasi Senge (1990) yang mengungkapkan bahwa organisasi harus terus menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan kinerja yang diinginkan, melalui pola baru dan pengembangan pemikiran, dimana aspirasi kolektif dibebaskan, serta organisasi terus belajar bagaimana dapat menciptakan belajar bersama.

Implikasi penelitian ini terhadap organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi (PTS), maka organisasi (PTS) harus terus mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran organisasi seperti yang diungkapkan oleh Watkins *and* Marsick (1993) antara lain:

1. Menciptakan secara berkesinambungan kesempatan untuk belajar
2. Mengembangkan penyelidikan dan dialog
3. Mendorong kerjasama dan kelompok belajar
4. Membangun berbagai sistem untuk mendapatkan dan berbagi pembelajaran
5. Memberdayakan anggota organisasi menuju visi bersama, dan
6. Menghubungkan organisasi dengan lingkungannya

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Redmon, 2005; http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_-_cite_note-0 Stenberg & Slater, 1982) yang menemukan bahwa modal manusia (modal intelektual, emosional/sosial dan modal moral/spiritual) berpengaruh terhadap kompetensi organisasi. Penelitian lain yang didukung hasil penelitian ini adalah (Fernandes, *et al.* 2005 dan Ukenna, *et al.* 2010) yang menemukan bahwa . organisasi yang berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperoleh keunggulan bersaing dan berkinerja tinggi. Hasil penelitian ini juga mendukung teori modal manusia (Roos, *et al.*, 1997 dalam Ancok, 2002) dan (Pralhad dan Hamel, 1990; Rumelt, 1991; Barney, 1991; dan Pateraf,

1993) tentang *Resources Based View (RBV)* bahwa kompetensi organisasi yang dihasilkan dari integrasi asset-aset khusus perusahaan termasuk aset manusia meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa kompetensi organisasi memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, organisasi di dalam investasi di bidang sumber daya manusianya harus mampu meningkatkan kompetensi organisasinya agar dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Said (2002), hasil temuannya bahwa pembelajaran organisasi dapat meningkatkan kompetensi organisasi (kemampuan analisis pasar dan kualitas layanan) pada PTS di Indonesia. Sementara dalam penelitian ini, meskipun kompetensi organisasi mengacu pada kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, tetapi di dalamnya terkandung kemampuan perguruan tinggi dalam menganalisis pasar dan kualitas layanan baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Sedangkan Wang and Lo (2003), menemukan bahwa pembelajaran organisasi dan pemberdayaan anggota dapat meningkatkan kompetensi organisasi, dimana kompetensi organisasi menggunakan RBV yang terdiri dari: langka, bernilai, tidak mudah ditiru dan tidak mudah tergantikan, dan kompetensi organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Bagi perguruan tinggi yang dapat melaksanakan tri dharma dengan kualitas yang tinggi sudah barang tentu akan menghasilkan kompetensi yang langka, bernilai, tidak mudah ditiru dan tidak muda tergantikan. Bhatnagar (2006), penelitian di universitas negeri dan swasta di India, menemukan bahwa kompetensi organisasi meliputi yaitu pengajaran (*teaching*), penelitian (*research*), dan pelayanan (*services*) berpengaruh terhadap kinerja organisasi baik universitas negeri maupun swasta (Absah, 2007). Pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kompetensi organisasi dan diversifikasi serta berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada PTS di Sumatra Utara dan Hidayat (2008) pada PTS di Jawa Tengah, Abubakar *et al.* (2009), pada universitas di Malaysia dan Mansor *et al.* (2010) pada Bank Islam di Malaysia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu PTS di Yogyakarta harus mencari cara untuk mengembangkan pembelajaran organisasi yang dapat meningkatkan kompetensi organisasi baik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, agar mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Modal intelektual merupakan indikator terpenting dari modal manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi yang direfleksikan peningkatan sistem pembelajaran pada PTS Kopertis V Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi modal manusia (*human capital*), maka semakin tinggi kinerja organisasi. Hal ini sesuai dengan teori modal manusia (Ross *et al.*, 1997 dalam Ancok, 2002) yang mengungkapkan bahwa modal intelektual merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kinerja organisasi.
2. Keahlian personal merupakan indikator terpenting dari pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi yang direfleksikan peningkatan sistem pembelajaran pada PTS Kopertis V Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian semakin tinggi pembelajaran organisasi, maka semakin tinggi kinerja organisasi. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran organisasi (Senge, 1990) yang menyatakan bahwa dengan pembelajaran organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi.
3. Kualitas pendidikan dan pengajaran merupakan indikator terpenting dari kompetensi organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi yang direfleksikan peningkatan sistem pembelajaran pada PTS di Yogyakarta. Kompetensi organisasi terbukti mampu memediasi secara parsial pengaruh modal manusia terhadap kinerja organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi modal manusia (*human capital*) dapat meningkatkan kinerja organisasi yang dimediasi peningkatan kompetensi organisasi. Kompetensi organisasi sebagai

variabel mediasi bersifat parsial (*partial mediatioan*). Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Barney (1991) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kompetensi organisasi mampu meningkatkan kinerja organisasi.

4. Kualitas pendidikan dan pengajaran merupakan indikator terpenting dari kompetensi organisasi terbukti mampu memediasi pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi pada PTS di Yogyakarta. Dengan keahlian personal yang tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas sistem pembelajaran atau kinerja PTS. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pembelajaran organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi yang dimediasi peningkatan kompetensi organisasi. Kompetensi organisasi sebagai variabel mediasi bersifat parsial (*partial mediatioan*)
5. Modal manusia menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja organisasi pada PTS di Yogyakarta dibandingkan dengan pembelajaran organisasi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual merupakan faktor terpenting dari modal manusia, maka pimpinan perguruan tinggi sebaiknya meningkatkan modal manusia khususnya modal intelektual melalui pemberian ijin belajar atau mengikuti tugas belajar bagi para dosennya untuk studi lanjut baik S2 maupun S3, agar dapat meningkatkan kompetensi organisasi (peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran).
2. Pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh PTS di Yogyakarta belum mampu meningkatkan keahlian personal. Oleh karena itu pimpinan PTS di Yogyakarta disarankan untuk mengadakan pembelajaran organisasi yang dapat meningkatkan keahlian personal khususnya berkaitan dengan sistem pembelajaran, seperti Pekerti, Pelatihan Publikasi ilmiah, Studi Banding ke perguruan tinggi lain, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (1997). *Revitalisasi Sumber Daya Manusia dalam Era perubahan*, Kelola: Gadjah Mada University Business Review, No.8, 104-117
- Ancok, D. (1998). *Membangun Kompetensi Manusia dalam Milenium Ketiga*, *Psikologika*, No. 6, 5-17.
- Barney, J.B (1986b). Organization Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage? *Academy of Management Review*, Vol.11, pp.656-665.
- Damanpour, F. & Evan, W.M (1984) Organizational Innovation and Performance: The Problem of "Organizational Lag". *Administrative Science Quarterly*, 1984, 29(3), 392-409
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Ferdinand, A., (2002). *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Edisi 2, Semarang: BP Undip.
- Ghozali, Imam., (2006). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hansson, Johanson and Keitnerl (2004) The impact of human capital and human capital Investments on company performance, Office for Official Publications of the European Communities, 2004
- Hanssons, B (2006) Company –based determinants of training on company performance Result from an International HRM Survey, *Personnel Review*, Vol. 36 No. 2, 2007.
- Kemp, Folkeringa, Jong and Wubben (2003) Innovation and firm performance, *SCientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs*, September 2003
- Iannaccone, Laurence R, (2000) “Household Production, Human Capital, and the Economics of Religion” *Santa Clara University*, Santa Clara, CA 95053, available on internet.
- Lee, Tan and Chiu (2008) The impact of organisational culture and learning on innovation performance, *International Journal of Innovation and Learning Issue: Volume 5, Number .4 2008*
- Maditinos, Sevic, and Tsairidis (2009) Intellectual Capital and Business Performance: An Empirical study for the Greek Listed Companies, *7th International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT) 23-25 July 2009 Greenwich, London*
- Marimuthu, Arokiasamy and Ismail (2009) Human Capital Development And Its Impact On Firm Performance: Evidence From Developmenta Economics, *The Journal of International Social Research, Volume 2 / 8 Summer 2009*
- Ravichandran (2007) IT Competencies, Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of environmental Characteristics, *Submitted to CIST, Ihformation*, June 15, 2007
- Segal, Borgia and Schoenfeld, (2009) Founder human capital and small firm performance: an empirical study of founder-managed natural food stores, *Journal of Management and Marketing Research.*, 2009
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- Stiles and Kulvisaechana (2002) On The Link Between Humn Capital And Firm Performance, FEP Work Paper, No. 121 November 2002

Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. CV ALFABETA. Bandung.

Toole and Czarnitzki (2007) Exploring the relationship between scientist human capital and firm performance: The case of biomedical academic entrepreneurs, Discussion Paper No. 07-011.

Ukenna, Ijouma, Anlionwu and Olise (2010) Effect of Investment in Human Capital Development on Organizational Performance, *Office for Official Publications of the European Communities*.

Wang and Lo (2003) Customer-focused Performance and the Dynamic Model for Competences Building and Leveraging: A Resource-based View, *Journal of Management Development Vol. 22 No. 6, 2003*

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PRODUKSI PADI PADA LAHAN RAWAN KEKERINGAN DI KABUPATEN PURWOREJO

Anik Safitri¹

Suryanto²

***Abstract:** Impact of Climate Change on Rice Production in Drought Prone Land in Purworejo. This study aimed to describe the knowledge and attitudes of rice farmers in the drought-prone land Purworejo in the face of climate change and to determine the effect of land, seed, climate change, education, and experience farming on rice production in drought-prone land Purworejo. The data used is primary data is done by direct interview to the respondents and secondary data from government agencies. The sampling technique by using simple random sampling. The sample in this study is a farmer in Rendeng Village by 74 respondents. This study used a descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Based on these results, the knowledge of farmers in Rendeng Village the existence of climate change is still relatively low, because the farmers are aware of the existence of climate change by 24%. Attitude or the efforts of the most widely performed of rice farmers to reduce the negative impact of climate change is a way to change the time of planting and tillage techniques. Variable land, seeds, education and farming experience a positive effect on rice production Purworejo drought-prone land. While climate change variables negatively affect rice production in Purworejo drought-prone land.*

Abstrak: Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Padi pada Lahan Rawan Kekeringan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan dan sikap petani padi di rawan kekeringan lahan Purworejo dalam menghadapi perubahan iklim dan untuk mengetahui pengaruh tanah, benih, perubahan iklim, pendidikan, dan pengalaman pertanian pada produksi padi di rawan kekeringan mendarat Purworejo. Data yang digunakan adalah data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden dan data sekunder dari instansi pemerintah. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seorang petani di Desa Rendeng oleh 74 responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil ini, pengetahuan petani di Desa Rendeng adanya perubahan iklim masih relatif rendah, karena petani menyadari adanya perubahan iklim dengan 24%. Sikap atau upaya yang paling banyak dilakukan petani padi untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim adalah cara untuk mengubah waktu tanam dan pengolahan tanah teknik. Variabel lahan, benih, pendidikan dan pengalaman bertani efek positif pada produksi padi Purworejo tanah rawan kekeringan. Sementara variabel perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap produksi padi di Purworejo tanah rawan kekeringan.

Kata Kunci: pertanian, kekeringan, perubahan iklim.

PENDAHULUAN

1 Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, email: yanto.rimsy@gmail.com

Perubahan iklim menjadi isu lingkungan di seluruh dunia saat ini. Isu ini berhubungan dengan terjadinya pemanasan global yang dikaitkan dengan meningkatnya kandungan gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) di udara. Fenomena alam ini diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya pembangunan pertanian. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak perubahan iklim, yang ditandai dengan kejadian iklim ekstrim yang dapat menimbulkan bencana kekeringan dan banjir telah meningkat secara konsisten (Boer, et al. 2007:350).

Pada tahun 1844-1960 terjadi musim kemarau panjang yang menyebabkan bencana kekeringan yang luas, sehingga telah terjadi sebanyak 30 kali atau dengan frekuensi satu kali dalam empat tahun. Dalam periode 1961-2006, frekuensi meningkat menjadi satu kali dalam 2-3 tahun (Boer, et al. 2007:351). Fenomena El Nino mengakibatkan bencana kekeringan mencapai 75% (Boer dan Subbiah, 2005:331). Saat ini masa musim hujan dan musim kemarau mengalami pergeseran. Akibatnya, sumber daya air akan menjadi masalah, akan terjadi defisit air di sejumlah wilayah yang rata-rata curah hujannya menurun (Nurmanaf, 2006:90)

Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan atau variasi iklim. Menurunnya produktifitas pertanian yang disebabkan oleh fenomena ini pada akhirnya akan mengancam ketahanan pangan bagi manusia. Kekeringan, banjir, dan intrusi air laut merupakan salah satu contoh ancaman yang akan semakin sering dijumpai oleh petani di Indonesia. Rusaknya lingkungan dan praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan juga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis. Kejadian meledaknya serangan hama, salinitas yang semakin tinggi merupakan akibat dari ancaman tersebut (Guntoro, 2011 dan Wiryono, 2012).

Tabel 1.
Data Daerah Rawan Kekeringan Musim Tanam II
Tahun 2012 dan 2014 Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	2012		2014	
		Jumlah Desa yang Rawan Kekeringan	Luas Lahan(Ha)	Jumlah Desa yang Rawan Kekeringan	Luas Lahan(Ha)
1	Gebang	5	157	11	108
2	Bayan	3	119	16	193
3	Bagelen	11	312	1	8
4	Banyuurip	3	303	19	355
5	Butuh	3	696	1	61
6	Pituruh	3	114	-	-
7	Purworejo	6	177	12	201
8	Ngrombol	3	589	6	90
9	Kutoarjo	1	268	-	-
10	Grabag	1	691	-	-
11	Kemiri	1	31	-	-
12	Loano	3	88	4	37
13	Bener	13	330	-	-

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo Tahun 2014

Purworejo sebagai salah satu penghasil sektor pertanian termasuk memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam bidang pertanian, terutama petani kecil. Faktor yang mempengaruhi antara lain: tingkat pendidikan, kesadaran petani terhadap perubahan iklim, akses terhadap informasi mengenai pertanian yang adaptif, kemampuan adaptasi, dan akses terhadap sumber keuangan (Nhemachena, *et al.* 2008: 246).

Berdasarkan Tabel 1.1 luas wilayah daerah rawan kekeringan musim tanam II tahun 2012 dan 2014 di Kabupaten Purworejo pada tahun 2012 sebesar 3.875 ha dan pada tahun 2014 sebesar 1.053 ha. Pada tahun 2013 musim tanam II di Kabupaten Purworejo tidak mengalami bencana kekeringan. Selama tiga tahun terakhir bencana kekeringan yang paling parah terjadi di tahun 2012. Kecamatan yang mengalami rawan kekeringan pada tahun 2012 sebanyak 13 dari 16 kecamatan yang ada, sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 8 kecamatan. Kecamatan Gebang merupakan salah satu kecamatan yang mengalami bencana kekeringan, pada tahun 2014 jumlah lahan yang terdampak kekeringan seluas 108 ha. Luas lahan yang mengalami kekeringan tersebut mendekati rata-rata dari semua lahan yang terdampak, sehingga Kecamatan Gebang dapat mewakili daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan dan sikap petani padi lahan kering di Kabupaten Purworejo dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh lahan, bibit, pengaruh iklim, pendidikan dan pengalaman terhadap fungsi produksi usaha tani padi di Kabupaten Purworejo.

Soekartawi dalam Purwaningsih (2012:50) menyatakan fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel (Y) yang dijelaskan dan variabel (X) yang menjelaskan. Variabel (Y) adalah output sedangkan variabel (X) input. Analisis fungsi produksi sering dilakukan oleh para peneliti, karena mereka menginginkan informasi bagaimana sumber daya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja dan modal dapat dikelola dengan baik agar produksi maksimum dapat diperoleh. Fungsi produksi Cobb-Douglas secara umum mempunyai rumus sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = variabel yang dijelaskan

X = variabel yang menjelaskan

Pertanian adalah suatu industri yang mengorganisir faktor produksi (tanah, mineral, kapital, manajemen, tenaga kerja) untuk memproduksi dan memasarkan pangan..

Ekonomi Pertanian adalah ilmu sosial terapan yang mempelajari bagaimana manusia memilih dan menggunakan pengetahuan teknis dan sumber daya produktif yang langka (tanah, tenaga kerja, modal) untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan mendistribusikannya guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara terus-menerus.

a. Cakupan Ekonomi Pertanian

Ekonomi Pertanian mencakup analisis ekonomi mikro dan makro,

1) Ekonomi Mikro

- a) Hubungan antara faktor produksi dan hasil produksi
- b) Hubungan antara faktor-faktor produksi
- c) Hubungan antara beberapa hasil produksi
- d) Hubungan faktor produksi dan hasil-hasil pertanian
- e) Konsumsi hasil-hasil pertanian

- 2) Ekonomi Makro
 - a) Pendapatan nasional
 - b) Kesempatan kerja
 - c) Konsumsi
 - d) Investasi
 - e) Ekspor-Impor
- b. Aspek Ekonomi Pertanian

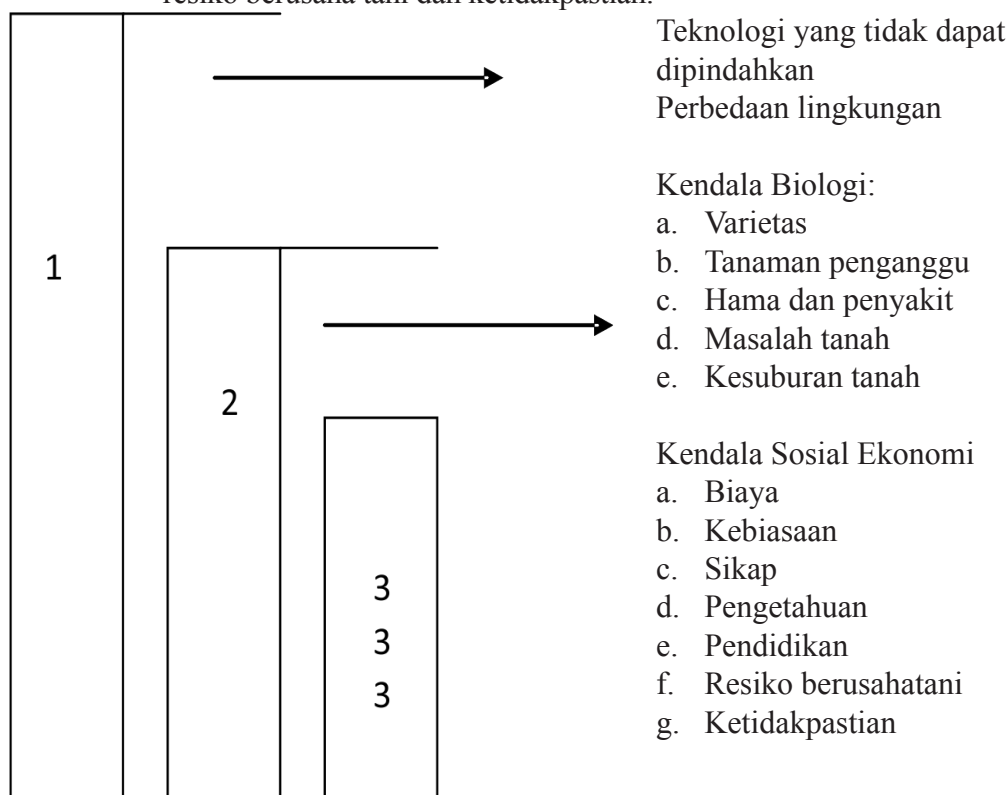
Terdapat tiga aspek penting dalam ekonomi pertanian yaitu aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

1) Aspek Produksi

Mempelajari hubungan input-output, input-input, output-output. Peranan input dari segi macam, ketersediaan, efisiensi penggunaan, merupakan hal yang penting. Faktor-faktor input tersebut dapat menyebabkan terjadinya senjang produktivitas (yield gap) antara produktivitas yang seharusnya dengan produktivitas yang dihasilkan oleh petani, digambarkan pada gambar 2.1 (Soekartawi dalam Purwaningsih, 2012:2).

Secara lebih rinci senjang produktivitas terjadi karena faktor yang sulit untuk diatasi manusia seperti adanya:

- a) Teknologi yang tidak dapat dipindahkan.
- b) Perbedaan lingkungan, misalnya iklim.
- c) Kendala biologis: varietas, tanaman pengganggu, hama dan penyakit, masalah tanah dan kesuburan tanah.
- d) Kendala sosial dan ekonomi: biaya, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pendidikan, resiko berusaha tani dan ketidakpastian.



Gambar 1. Perbedaan hasil antara Lembaga Eksperimen dan Usaha tani

Sumber: (Gomez dalam Purwaningsih, 2012:3)

2) Aspek Konsumsi

Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, jumlah penduduk, selera.

Perubahan iklim diukur berdasarkan perubahan komponen utama iklim, yaitu suhu atau temperatur, musim (hujan dan kemarau), kelembaban dan angin. Dari variabel-variabel tersebut variabel yang paling banyak dikemukakan adalah suhu dan curah hujan (BMKG, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Rendeng Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Kecamatan Gebang merupakan salah satu kecamatan yang mengalami bencana kekeringan, pada tahun 2014 jumlah lahan yang terdampak kekeringan seluas 108 ha. Luas lahan yang mengalami kekeringan tersebut mendekati rata-rata dari semua lahan yang terdampak, sehingga Kecamatan Gebang dapat mewakili daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan Gebang mempunyai 25 Desa, tetapi desa yang terdampak kekeringan sebanyak 11 desa. Desa Rendeng merupakan desa yang paling luas terdampak kekeringan, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan sebanyak 20 ha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data, mengklasifikasikan data, mengolah data dan menginterpretasikannya serta analisis deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian ini pada daerah rawan kekeringan berdasarkan pemetaan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penelitian ini responden yang diambil adalah para petani padi yang ada di Desa Rendeng. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Jumlah petani padi yang ada di desa Rendeng sebanyak 282 orang. Jumlah sampel yang diambil dengan batasan kesalahan 10 % sebanyak 74 responden, dengan harapan dapat mewakili jumlah populasi yang ada. Jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2006):

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Nilai kritis atau batas kesalahan yang diinginkan yaitu sebesar 10%

Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus slovin adalah:

$$n = \frac{282}{1 + 282 (0,1)^2} = 74 \text{ Sampel}$$

Sampel dalam penelitian ini di bedakan menjadi 2, yaitu daerah normal dan daerah rawan kekeringan. Desa Rendeng mempunyai 5 Dusun yang meliputi: Dusun Depok, Tirip, Silo, Sembir dan Krajan. Lahan pertanian yang ada di Desa Rendeng secara teknis berupa sawah irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Pada kenyataannya irigasi yang ada tidak mampu mencukupi kesediaan air di area lahan pertanian yang ada di Desa Rendeng. Irigasi ini sebagian besar hanya mampu mengairi di dusun Silo dan Tirip. Ketiga Dusun meliputi dusun Sembir, Depok dan Krajan ketika musim kemarau hanya mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan. Jumlah sampel unruk masing-masing daerah normal dan rawan kekeringan sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Sampel Menurut Klasifikasi Daerah

Klasifikasi Daerah	Presentasi	Jumlah Responden
Daerah Rawan Kekeringan	60%	44
Daerah Normal	40%	30
Total	100%	74

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan survei lapangan, dalam bentuk wawancara yang dibantu dengan daftar pertanyaan (kuesioner) dengan para petani serta pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari situs pemerintah kabupaten Purworejo seperti: Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Purworejo, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan eksploratif yaitu pendekatan yang menggali secara mendalam persoalan-persoalan yang terkait dengan tujuan penelitian.

Analisis regresi linier berganda ini berdasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas dan peneliti terdahulu. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi produksi yang ingin memperlihatkan pengaruh input yang digunakan dengan output yang diinginkan. Pentingnya pendugaan menggunakan ekonometrika (Ekonomi, Matematika, Statistika) Dalam dunia ekonomi, pendekatan Cobb-Douglas merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input.

Untuk produksi, fungsi dapat digunakan rumus :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n) \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = variabel yang dijelaskan

X = variabel yang menjelaskan

Atau

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_i X_i + \dots + \beta_n X_n$$

Y = variabel yang dijelaskan

X = variabel yang menjelaskan

α = intersep

β = koefisien regresi

α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model log-log (variable bebas dan terikat menggunakan logaritma). Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara persentase. Rumus model ini sebagai berikut:

$$\text{Log (Prod)} = \log \alpha + \log \beta_1 \text{ JB} + \beta_2 \log \text{LL} + \beta_3 \log \text{PL} + \beta_4 \log \text{PD} + \beta_5 \text{ PI} + (v_i - u_i)$$

Keterangan

Y = Fungsi Produksi

α_0 = intersept

β_1 = Koefisien

JB= Jumlah Benih

LL= Luas Lahan

PL= Pengalaman

PD = Pendidikan

PI= Daerah kering

Berdasarkan model produksi tersebut diduga:

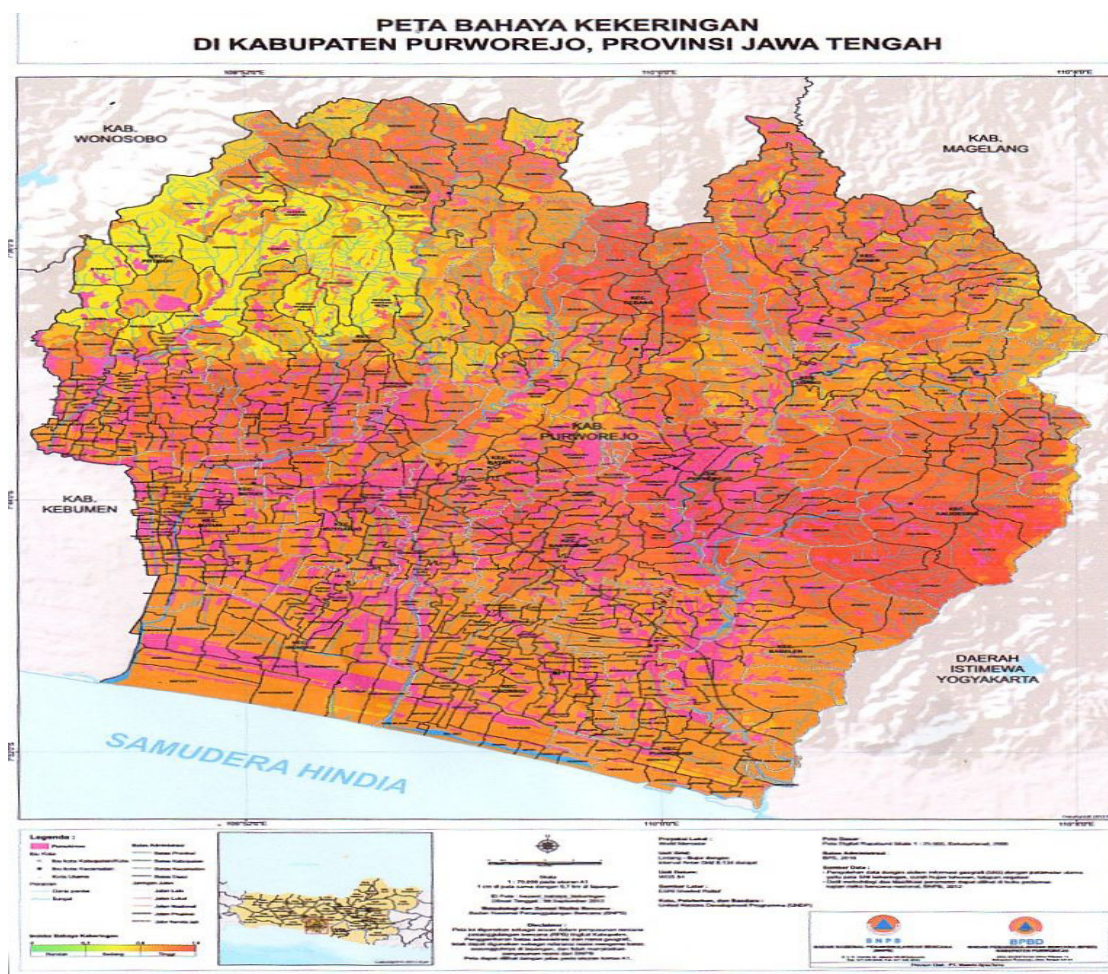
- 1) Variabel luas lahan berpengaruh secara positif terhadap jumlah produksi pertanian
- 2) Variabel bibit berpengaruh secara positif terhadap jumlah produksi pertanian
- 3) Variabel pengalamn berpengaruh secara positif terhadap jumlah produksi pertanian
- 4) Variabel pendidikan berpengaruh secara positif terhadap jumlah produksi pertanian
- 5) Variabel perubahan iklim berpengaruh secara negatif terhadap jumlah produksi pertanian

Variabel luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, umur, pendidikan, pengalaman dan keanggotaan) berpengaruh positif terhadap terhadap produksi padi lahan rawan kekeringan di Kabupaten Purworejo. Hipotesis tersebut didasarkan pada penelitian Suslinawati (2011) dan Murniati (2014). Variabel perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap terhadap produksi padi lahan rawan kekeringan di Kabupaten Purworejo. Hipotesis tersebut didasarkan pada penelitian Suslinawati (2011)..

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dalam mengidentifikasi wilayah kekeringan di Kabupaten Purworejo menggunakan alat analisis Sistem Informasi Georafis (SIG) berupa peta ancaman bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Peta ancaman bencana kekeringan ini berguna untuk menjelaskan luas lahan yang rawan kekeringan akibat dari perubahan iklim. Data yang digunakan untuk pemetaan dalam penelitian ini adalah peta digital Rupa Bumi Indonesia (RBI), peta SNI kekeringan, curah hujan tahunan, tutupan vegetasi. Peta ancaman bencana kekeringan ini dapat menjelaskan seberapa luas lahan yang rawan kekeringan.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan Karesidenan Kedu yang bersebelahan dengan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Purworejo mempunyai daerah rawan kekeringan mencakup semua wilayah yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan peta, tingkat rawan kekeringan dibedakan menjadi tiga yaitu: tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kecamatan Pituruh, Kecamatan Bruno, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Loano mempunyai tingkat rawan kekeringan sedang, sedangkan kecamatan lainnya mempunyai tingkat rawan kekeringan yang tinggi.



Gambar 2. Peta Rawan Kekeringan Kabupaten Purworejo

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014

1. Deskripsi Pengetahuan dan Sikap Petani terhadap Dampak Perubahan Iklim

Karakteristik umum responden yang ada di desa Rendeng kecamatan Gebang kabupaten Purworejo berdasarkan survey. Menurut Notoadmojo dalam Kurniawati (2012:57) faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang diantaranya adalah: Usia, tingkat pendidikan, pengalaman dan informasi. Berkaitan dengan pengetahuan seseorang, ternyata pengalaman dapat berbanding lurus dengan usia, semakin tua usia biasanya memiliki masa pengalaman yang lama juga. Pengetahuan tentang perubahan iklim petani padi di desa Rendeng lebih banyak ditentukan oleh masa pengalaman bertani. Oleh karena itu, karakteristik umum responden yang dibahas berdasarkan pada beberapa variabel yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu: masa pengalaman berusahatani dan tingkat pendidikan

a. Pengalaman Berusahatani

Responden petani sebagian besar mempunyai pengalaman bertani dalam waktu kurun 40-60 tahun yaitu sebesar 43,24% dan dalam kurun waktu 21-40 sebesar 40,54%, sedangkan pengalaman bertani dalam kurun waktu 1-20 tahun hanya sebesar 9,46% serta dalam kurun waktu 60 tahun keatas hanya sebesar 6,76%. Pada bidang pertanian jika pengetahuan bertani seorang petani diperoleh sejak kecil dari orang tuanya maka pengalaman dan pengetahuan bertaninya akan berjalan sesuai perjalanan hidupnya.

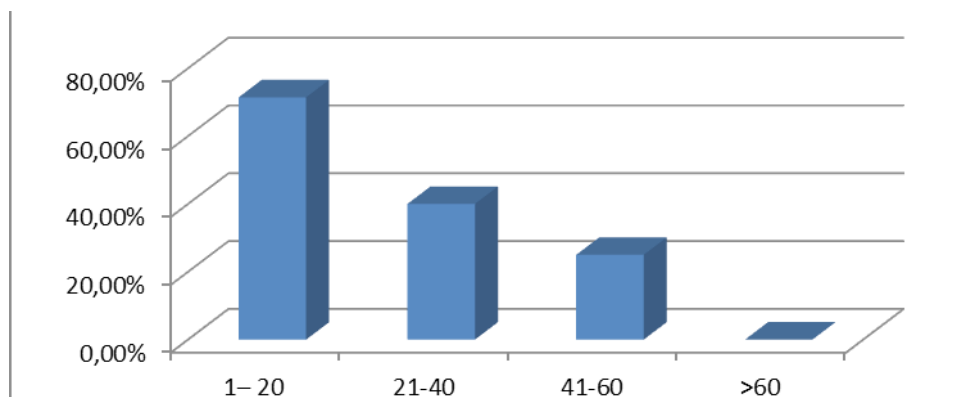
Umur sangat berpengaruh terhadap pengalaman, semakin tua atau bertambah umur maka petani juga akan semakin matang sehingga semakin kaya pengetahuan dan juga pengalaman. Pengalaman bertani warga di desa Rendeng sebagian besar berasal dari para orang tua. Mereka dididik bertani mulai dari usia muda yakni sekitar 15 tahun.

Tabel 3.
Masa Pengalaman Usaha Tani

Pengalaman Berusahatani (tahun)	Jumlah Responden(orang)	Persentase(%)
1- 20 tahun	7	9,46
21 - 40 tahun	30	40,54
41 - 60 tahun	32	43,24
> 60 tahun	5	6,76
Total	74	100

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Responden yang mengetahui tentang fenomena perubahan iklim berdasarkan masa pengalaman bertani 1-20 tahun sebanyak 9,46%; 21-40 tahun sebanyak 40,54%; 41-60 tahun sebanyak 43,24%; dan yang berpengalaman lebih dari 60 tahun sebesar 6,76%. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama pengalaman bertani responden maka pengetahuan mengenai fenomena perubahan iklimnya semakin rendah. Hal ini diduga berkaitan dengan usia, semakin tua usia maka masa pengalaman juga semakin lama dan responden akan lebih paham dengan pengetahuan lokal dan sulit untuk bisa memahami pengetahuan baru seperti pengetahuan tentang fenomena perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartasapoetra (1991) yang menyatakan bahwa petani yang berusia lanjut berumur sekitar lebih dari 50 tahun biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara bekerja dan cara hidupnya. Hal ini juga terbukti dari beberapa responden yang termasuk pada kelas dewasa tua yang mengakui bahwa mereka sulit untuk mengerti dengan istilah-istilah perubahan iklim yang sering mereka dengar selama ini.



Gambar 3. Distribusi Pengetahuan Petani Padi di Kabupaten Purworejo tentang Fenomena Perubahan Iklim berdasarkan Pengalaman Bertani

Sumber : Data Primer diolah, 2015

b. Pendidikan Formal Terakhir

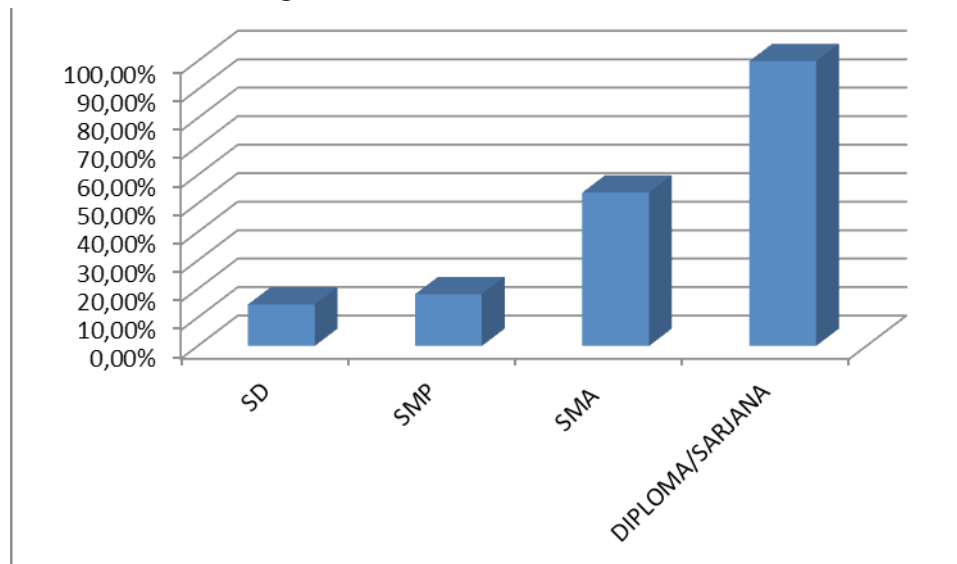
Tingkat pendidikan responden di Desa Rendeng masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya responden yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) sebanyak 64,86%. sedangkan berpendidikan SMP sebanyak 11 responden dengan persentase 14,86%. Responden petani yang berpendidikan sampai SMA sebanyak 13 responden dengan persentase sebesar 17,57 %, sedangkan responden yang lulus dari diploma/sarjana hanya sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 2,71%.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Presentasi	Jumlah Responden
SD	64,86%	48
SMP	14,86%	11
SMA	17,57%	13
Diploma/Sarjana	2,71%	2
Total	100%	74

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Responden yang mengetahui tentang fenomena perubahan iklim yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD hanya sebesar 14,58%, tamat SMP sebesar 18,18%, tamat SMA sebesar 53,85% dan tamat S1 sebesar 100%. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik pengetahuannya mengenai fenomena perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (tamam SMA dan S1) memiliki kemampuan memahami informasi baru dengan lebih baik.



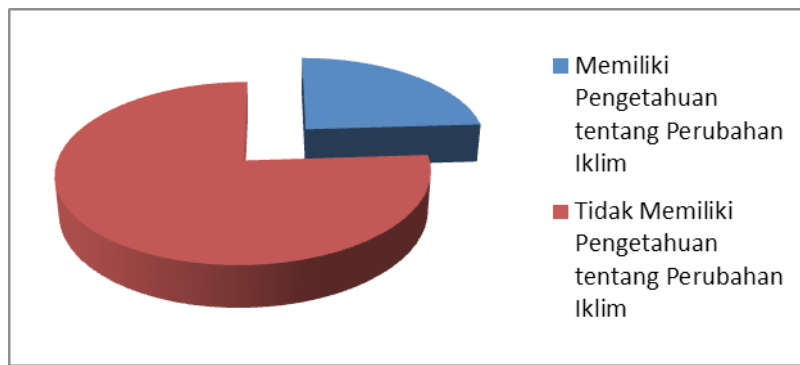
Gambar 4. Distribusi Pengetahuan Petani Padi Di Kabupaten Purworejo tentang Fenomena Perubahan Iklim berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : Data Primer diolah, 2015

c. Pengetahuan Petani tentang Fenomena Perubahan Iklim

Petani padi di Desa Rendeng telah mengetahui adanya perubahan pada kondisi iklim di Desa Rendeng. Hal tersebut juga dirasakan berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas panen, bahkan mengalami kegagalan panen sehingga menyebabkan kerugian. Meskipun

seluruh petani merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut, ternyata hanya sedikit petani (24%) yang mengetahui dan memahami tentang fenomena perubahan iklim secara umum yang merupakan isu global yang bahkan kini telah menjadi isu nasional. Sedangkan 76% petani hanya pernah mendengar istilah perubahan iklim dan merasakan dampaknya saja tanpa dapat menjelaskan definisi dan penyebabnya lebih lanjut. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan petani mengenai isu perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang perubahan iklim dari media televisi, radio, sesama petani.

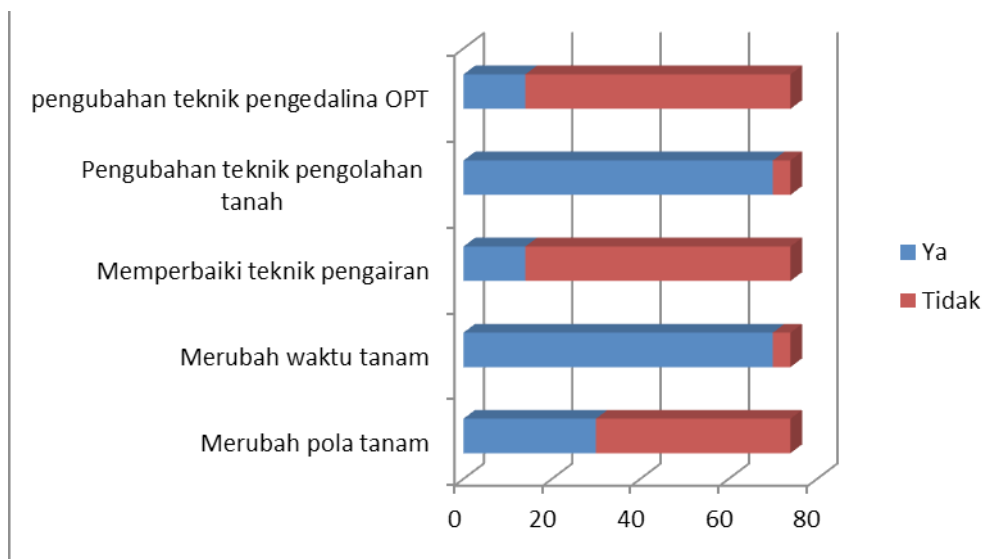


Gambar 5. Diagram persentase petani yang mengetahui fenomena perubahan iklim
 Sumber : Data Primer diolah, 2015

d. Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian Padi di Desa Rendeng

Dampak perubahan iklim terhadap hasil produksi pertanian di Desa Rendeng. Sebagian besar petani menyatakan bahwa perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap hasil produksi padi, terutama pada penurunan kualitas dan kuantitas panen, memicu meningkatnya serangan organism penggagu tanaman (OPT). Perubahan iklim juga berdampak pada kegagalan panen, hamper seluruh petani yang ada di desa Rendeng pada awal tahun 2014 mengalami kegagalan panen akibat kurangnya pasokan air.

e. Sikap dan Perilaku Petani Padi dalam menghadapi Perubahan Iklim



Gambar 5. Sikap dan Perilaku Petani Padi dalam menghadapi Perubahan Iklim
 Sumber : Data Primer diolah, 2015

Gambar 5. menunjukkan sikap yang dilakukan petani padi di Desa Rendeng dalam rangka mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Sebagian besar petani mengubah sikap dan perilaku dalam bertani dengan cara merubah pola tanam sebanyak 30 responden dari 74 responden yang di survey, dengan persentase sebesar 40,54%. Merubah waktu tanam sebanyak 70 responden dengan persentase sebesar 94,59%. Responden yang melakukan adaptasi dengan cara memperbaiki teknik pengairan sebanyak 14 responden, dengan persentase sebesar 18,92%. Responden yang melakukan pengubahan teknik pengolahan tanah sebanyak 70 responden, dengan persentase sebesar 94,59%. Responden yang melakukan pengubahan teknik pengedalina OPT sebanyak 14 responden, dengan persentase sebesar 18,92%.

2. Pengaruh lahan, bibit, pupuk, pengaruh iklim, pendidikan, dan pengalaman terhadap produksi padi di lahan rawan kekeringan Kabupaten Purworejo

Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh jumlah bibit, jumlah pupuk luas lahan, pendidikan, umur, pengalaman dan daerah lahan rawan kekeringan terhadap jumlah produksi padi di desa Rendeng kecamatan Gebang kabupaten Purworejo.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model log-log (variable bebas dan terikat menggunakan logaritma). Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara persentase. Hasil regresi ini menggunakan alat bantu program computer yaitu Eviews 6.0. Hasil regresi yang dapat dilihat sebagai berikut,

Tabel 5.

Hasil Regresi Linier Berganda dengan Metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)				
No	Nama Variabel	Koefisien	T Hitung	Prob.
1	Intercept	3,66	23,38	0,0000
2	Jumlah Bibit(JB)	0,07	1,83	0,0714
3	Luas Lahan(LL)	0,90	25,62	0,0000
4	Pengalaman(PL)	0,04	3,50	0.0008
5	Pendidikan(PD)	0,04	3,44	0.0010
6	DaerahKekeringan(DUM)	-0,09	-8,01	0.0000
R-squared		0.995157	F-statistic	2794,331
Adjusted R-squared		0.994800	Prob(F-statistik	0.0000000

Sumber : Data primer (diolah), 2015

$$\begin{aligned} \text{Log(Prod)} = & 3,66 + 0,07 \text{ Log(JB)} + 0,90 \text{ Log(LL)}_t + 0,04 \text{ Log(PL)}_t \\ & (0,0000) \quad (0,0714) \quad (0,0000) \quad (0,0008) \\ & + 0,04 \text{ (PD)} - 0,09 \text{ (PI)} + e \\ & (0,0010) \quad (0,0000) \end{aligned}$$

Keterangan :

Y = Fungsi Produksi

α_0 = intersept

β_1 = Koefisien

JB= Jumlah Benih

LL= Luas Lahan

PL= Pengalaman

PD = Pendidikan

PI= Daerah kering

e = Faktor Gangguan

Setelah melalui serangkaian uji asumsi klasik diketahui bahwa model persamaan dinyatakan bebas uji autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.

E. Interpretasi Hasil secara Ekonomi

1. Pengaruh Jumlah Bibit terhadap Produksi Padi

Variabel Jumlah Bibit menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0714 lebih kecil dari α (10%), maka hipotesis nol penelitian ditolak yang artinya pada tingkat keyakinan sebesar 90%, secara parsial jumlah bibit padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi padi di Desa Rendeng. Semakin banyak jumlah padi yang digunakan maka semakin banyak pula jumlah produksi padi karena jumlah benih dan jumlah produksi padi memiliki hubungan yang positif. Koefisien regresi jumlah bibit sebesar 0,07. Setiap penambahan 1% bibit padi, maka akan meningkatkan jumlah produksi padi sebesar 7%.

2. Pengaruh Luas Lahan terhadap Produksi Padi

Variabel luas lahan menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari α , maka hipotesis nol penelitian ditolak yang artinya pada tingkat keyakinan sebesar 95%, secara parsial luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi padi di Desa Rendeng. Semakin banyak luas lahan yang digunakan maka semakin banyak pula jumlah produksi padi, karena luas lahan dan produksi padi memiliki hubungan yang positif. Koefisien regresi luas lahan sebesar 0,91. Setiap penambahan 1% bibit padi, maka akan meningkatkan jumlah produksi padi sebesar 91%.

3. Pengaruh Pengalaman terhadap Produksi Padi

Variabel pengalaman menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0008 lebih kecil dari α , maka hipotesis nol penelitian ditolak yang artinya pada tingkat keyakinan sebesar 95%, secara parsial pengalaman yang dimiliki responden petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi padi di Desa Rendeng. Koefisien regresi jumlah bibit sebesar 0,04. Setiap pengalaman bertambah 1%, maka akan meningkatkan jumlah produksi padi sebesar 4%.

4. Pengaruh Pendidikan terhadap Produksi Padi

Variabel pendidikan menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0010 lebih kecil dari α , maka hipotesis nol penelitian ditolak yang artinya pada tingkat keyakinan sebesar 95%, secara parsial pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi padi di Desa Rendeng. Semakin banyak tinggi pendidikan yang dimiliki responden petani maka semakin banyak pula jumlah produksi padi, karena pendidikan dan produksi padi memiliki hubungan yang positif. Koefisien regresi jumlah bibit sebesar 0,04. Setiap pendidikan naik 1%, maka akan meningkatkan jumlah produksi padi sebesar 4%.

5. Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produksi Padi

Variabel perubahan iklim menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari α , maka hipotesis nol penelitian ditolak yang artinya pada tingkat keyakinan sebesar 95%, secara parsial perubahan iklim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat produksi padi di Desa Rendeng. Koefisien regresi perubahan iklim sebesar -0,09. Setiap perubahan iklim naik 1%, maka akan menurunkan jumlah produksi padi sebesar 9%.

F. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 4.17

Variabel	Perbandingan Hasil dengan Penelitian Terdahulu		
	Penelitian Terdahulu	Hipotesis	Hasil Penelitian
Jumlah Bibit Padi (JB)	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif
Luas Lahan(LL)	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif
Pengalaman(PL)	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif
Pendidikan(PD)	Berpengaruh negatif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif
Daerah Kering(PI)	Berpengaruh negatif	Berpengaruh negative	Berpengaruh negative

Variabel jumlah bibit padi, luas lahan, pengalaman dan daerah kering dari hasil penelitian memiliki pengaruh yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil penelitian yang tidak sama dengan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah variabel pendidikan. Pada penelitian ini variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah produksi padi. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki petani responden, maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis data berdasarkan deskripsi sikap dan pengetahuan petani yaitu:
 - a. Pengetahuan petani di Desa Rendeng akan adanya perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, tergolong masih rendah. Secara keseluruhan jumlah petani yang mengetahui mengenai fenomena perubahan iklim masih rendah yaitu hanya sebesar 24%.
 - b. Sikap atau upaya yang paling banyak dilakukan petani padi di Desa Rendeng dalam rangka mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim adalah dengan cara merubah waktu tanam dan teknik pengolahan tanah .
 - c. Faktor tingkat pendidikan dan kepemilikan keterampilan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Pengaruh lahan, bibit, pupuk, pengaruh iklim, pendidikan, dan pengalaman terhadap produksi padi di lahan rawan kekeringan Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada responden petani di Desa Rendeng mengenai analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di lahan rawan kekeringan maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

 - a. Jumlah bibit berpengaruh positif terhadap jumlah produksi padi Dengan demikian hipotesis mengenai jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi padi terdukung secara empiris.
 - b. Luas Lahan berpengaruh positif terhadap jumlah produksi padi Dengan demikian hipotesis mengenai luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi padi terdukung secara empiris. Semakin luas lahan yang di gunakan untuk bercocok tanam, maka jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat.
 - c. Pengalaman berpengaruh positif terhadap jumlah produksi padi Dengan demikian hipotesis mengenai pengalaman berpengaruh terhadap jumlah produksi padi terdukung secara empiris. Semakin lama pengalaman dalam bertani, maka jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat.
 - d. Pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah produksi padi Dengan demikian hipotesis mengenai pendidikan berpengaruh terhadap jumlah produksi padi terdukung secara empiris. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki para petani responden, maka jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat.

- e. Perubahan Iklim berpengaruh negatif terhadap jumlah produksi padi
Dengan demikian hipotesis mengenai perubahan iklim berpengaruh terhadap jumlah produksi padi terdukung secara empiris. Lahan yang tergolong rawan kekeringan mengakibatkan terjadinya jumlah penurunan jumlah produksi padi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyuluhan tentang perubahan iklim di bidang pertanian perlu di tingkatkan lagi, karena pengetahuan petani akan adanya perubahan iklim ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait masih sedikit dan kesadaran petani untuk mengikuti penyuluhan masih rendah. Hal itu terbukti banyaknya petani yang menjadi anggota pasif dalam kelompoknya. Oleh sebab itu pemerintah daerah dan dinas pertanian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para petani dalam mengikuti penyuluhan serta pihak terkait dalam melakukan penyuluhan dan program berkaitan dengan produksi pertanian dilaksanakan rutin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim berpengaruh negatif terhadap jumlah produksi, yang artinya perubahan iklim berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian padi di lahan rawan kekeringan. Hasil survey yang dilakukan terhadap para petani menunjukkan bahwa seluruh petani yang ada di Desa Rendeng belum terjangkau asuransi pertanian. Peneliti berharap pemerintah segera mensosialisasikan dan melaksanakan program asuransi pertanian. Asuransi pertanian diharapkan dapat memperkecil kecemasan petani akan resiko kerugian bahkan gagal panen yang dialami petani yang disebabkan hama dan bencana alam seperti: kekeringan dan banjir . Dengan adanya asuransi pertanian diharapkan petani mampu menggali potensi dan menemukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan produksi

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buono dan A. Rakhman. 2011. Penyusunan Indeks Asuransi Iklim Untuk Pengelolaan Risiko Iklim Bagi Petani Berbasis Usaha Tani Padi. Laporan Penelitian Kerja sama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T). Bogor.
- Apata T.G. Effects of Global Climate Change on Nigerian Agriculture: An Empirical Analysis. *CBN Journal of Applied Statistics*. Vol 2. No 1. Hal: 31-50
- BMKG.2011. Perubahan Iklim dan Dampaknya Di Indonesia.Melalui :<www.bmkg.go.id> [03/01/ 2015].
- Boer, R. and A.R. Subbiah. 2005. Agriculture drought in Indonesia. P. 330-344 InV. S. Boken, A.P. Cracknell, and R.L. Heathcote (Eds.). *Monitoring and Predicting Agricultural Drought: A global study*. Oxford Univ. Press.
- Boer, R.et al. 2007. Indonesia Country Report: Climate Variability and Climate Change and Their Implications, Government of Indonesia, Jakarta.
- Colli, T.J; P. Rao; J.O.Donnel an G. Batesse.2005.An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis Second edition. Springer Science and Bussines media Inc. New York .
- Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo. 2014. Data Lahan Pertanian yang Rawan Kekeringan. Dinas Pertanian dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Purworejo.
- Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo. 2014. Data Wilayah Berdampak Kekeringn di Kabupaten Purworejo. Dinas SDA dan ESDM Kabuupaten Purworejo.
- Efendi, Muchtar. 2012. Kajian Tingkat Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi Berbasis Daerah Aliran Sungai. Semarang. . [Tesis] Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Festus M. Epetimehin. 2011. Agricultural Insurance in Nigeria and its Impact . *International Journal of Current Research* Vol. 3.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Grothmann, T. dan Anthony Patt. 2003. Adaptive Capacity And Human Cognition. Prepared for presentation at the Open Meeting of the Global Environmental Change Research Community, Montreal, Canada, 16-18 October, 2003.Canada.
- Gujarati, Damodar N. 2003. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.

- Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C 2009. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Guntoro, Suprio. 2011. *Saatnya Menerapkan Pertanian Tekno-Ekologis*. AgroMedia Pustaka. Jakarta.
- Handoko, I. dan H. Hardjomidjojo. 2008. *Global Warming, Climate Change and Impacts to Food and Agriculture*. Paper presented at a Seminar on “*Climate Change Scenarios and Its Implication on Ecosystem and Biodiversity, Food Security and Health*”, Penang, Malaysia, 23-24 June 2009.
- Nirdayana K, Priminingtyas, D.N dan Hadi, H.S . 2011. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Magga (Studi Kasus Di Desa Pohsngit Leres, Kec Sumberasih , Kab Probolinggo). *Habitat*. Vol .22. No.2. Hal: 145-173.
- KLH. 2007. *Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kurniawati, Fitri. 2012. *Pengetahuan dan Adaptasi Petani Sayuran Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus: Desa Cibodas, Kecamatan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat*. [Tesis] Program Pascasarjana Universita Padjajaran.
- Murniati K , Mulyo J.H , Irham , dan Hartono Slamet. 2014. “Efisiensi Teknis Usaha Tani Padi Organik Lahan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*. Vol. 14. No.1. Hal :31-38.
- Nhemachena, Charles , and Hasan Rashid. 2008. *Micro Level Analysis of Farmers’ Adaptation to Climate Change in Southern Africa*. IFRI. Washington DC.
- Nurmanaf, S.A.R., 2006. *Untuk Usahatani Padi di Indonesia Strategic Development of Agricultural Insurance on Rice Farming in Indonesia*. , pp.89–104.
- PEACE. 2007. *Indonesia and Climate Charge: Current Status and Policies*.
- Purwaningsih, Yunastiti; Sutomo. 2011. *Ekonomi Pertanian*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Siti Aisyah Tri. 2007. *Modul Laboratorium Ekonometrika*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Schmidt, F.H. and Ferguson, J.H., 1951. *Rainfall Types Based on Wet and Dry Period for Indonesian With Wester New Guinea*. Kementerian Perhubungan Djawatan Meteorologi and Geofisika. Versi 2. No. 42. Jakarta.
- Soekartawi. 1990. *Teori Ekonomi Produksi*. Rajawali Pes. Jakarta.
- Surmaini, E., Eleonora R., dan Irsal Las. 2011. *Upaya Sektor pertanian Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. *Jurnal Litbang Pertanian*, Edisi 30(1); 1-7.

- Suslinawati. 2011. Pendugaan Fungsi Produksi Usaha Tani Padi Lahan Pasang Surut (Kasus pada Sentra yang Berpotensi Terdampak oleh Perubahan Iklim). Media Sains. Vol. 3. No.1. Hal 9-18.
- Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meterologi, Klimatologi dan Geofisika.
- UNDP Indonesia, 2007.*Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnya?*.UNDP Indonesian Country Office. Jakarta
- Vukina,Li, Holthausen.1996. Hedging with Crop Yield Futures: A Mean Variance Analysis.American Journal of Agriculture Economics. Volume 78. No 4.
- Wiryono. 2012. Pengantar Ilmu Lingkungan. Badan Penerbitan Fakultas Pertanian UNIB. Bengkulu.
- Yuniarti, Ade. 2009. Hubungan Iklim (Curah Hujan, Kelembaban, dan Suhu Udara) dengan Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2004-2008. [Skripsi] Program Sarjana Universitas Indonesia.
- _____ . 2009. Purworejo dalam Angka, BPS Kabupaten Purworejo

EVALUASI ANGGARAN DAERAH BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

Hari Kusuma Satria Negara¹

***Abstract: Evaluation of the Performance-Based Regional Budget in Financial Management (A Case Study of the City Government of Yogyakarta).** This research to evaluate based on performance in financial management. This research study case in Yogyakarta Government in financial year 2009, 2010 and 2010. This reseacr evaluate the budget about economic, efficiency and effectiveness of financial management. Research methdology ini this reseacrh use The Federation des Expert Compotable Europens or FEE. Teh result showed that Government of Yogyakarta in financial manegeant has been an economic, efficient and effective.*

Abstrak: Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta). Penelitian ini untuk mengevaluasi berdasarkan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Ini studi kasus penelitian di Yogyakarta Pemerintah pada tahun buku 2009, 2010 dan 2010. reseacr ini mengevaluasi anggaran about ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian methdology Penelitian ini menggunakan Federasi Ahli Compotable Europens atau FEE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan telah menjadi ekonomi, efisien dan efektif.

Kata Kunci: Ekonomi, efisien, efektif, FEE.

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma Dan Susanto, 2010).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcomes). Penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Menurut Mahsun (2006) pemerintah melalui menteri dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Begitu pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2008 tentang” Pedoman

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: harikusuma_sn@yahoo.co.id

Pengelolaan Keuangan Daerah” yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* serta pembangunan yang berkeadilan dan merata dalam tata kelola pemerintah daerah. Dari undang-undang tersebut sistem anggaran yang dipakai adalah *performance budgeting system* (sistem anggaran kinerja) yang memperhatikan fungsi dari masing-masing unit kerja serta pengelompokan kegiatannya serta menekankan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang mencakup pendapatan pembelanjaan serta pembiayaan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran Publik berisi rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran / belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*). Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*)
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
- d. Merevisi standard biaya atas target anggaran untuk tahun berikutnya

Safar (2003), mendefinisikan kinerja instansi pemerintahan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka memiliki keberhasilan atau kegagalan pelaksanaankegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa *Performance budget* pada dasarnya adalah sistim penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan Sumber Daya dan Dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dalam pengawasan atas kinerja. Pendekatan ini juga mengutamakan penentuan dan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen, yaitu :

- a. Ekonomi

Pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisiensi

Pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ditetapkannya Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma Dan Susanto, 2010).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*). Penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Menurut Mahsun (2006) pemerintah melalui menteri dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

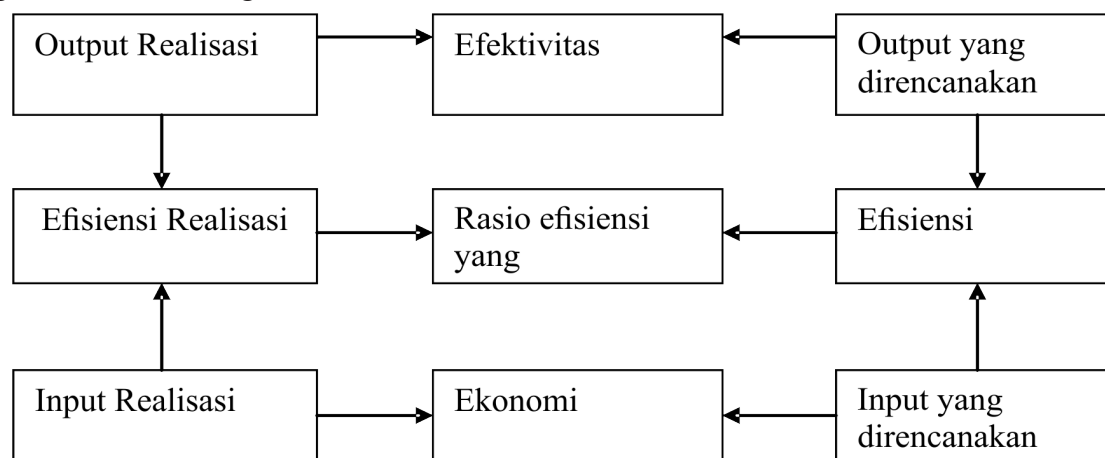
Begitu pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2008 tentang” Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* serta pembangunan yang berkeadilan dan merata dalam tata kelola pemerintah daerah. Dari undang-undang tersebut sistem anggaran yang dipakai adalah *performance budgeting system* (sistem anggaran kinerja) yang memperhatikan fungsi dari masing-masing unit kerja serta pengelompokan kegiatannya serta menekankan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang mencakup pendapatan pembelanjaan serta pembiayaan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan metodologi deskriptif, yaitu membuat deskriptif sistematis faktual dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Saifuddin, 2007). Penelitian deskriptif juga sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan alat analisis model FEE (*The Federation des Expert Comptable Europens*). Proses manifestasi dalam teknik perhitungan *value for money*

(ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) yakni skor *value for money* dihitung berdasarkan ada tidaknya perbaikan kinerja aktual dibandingkan dengan rencananya. Sedangkan teknik yang dipakai untuk menyusun ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah pendekatan FEE. Model FEE merupakan model pengukuran kinerja yang mendasarkan pada analisis varian sebagai tergambar melalui diagram berikut ini:



Gambar 1
Model FEE

a. Menghitung rasio ekonomi

Angka ini di peroleh dengan membandingkan *input* realisasian (realisasi anggaran belanja dengan input yang di rencanakan (anggaran belanja). Sehingga rasionya makin baik tingkat keekonomisan pada tingkat kualitas input tertentu dengan standard biaya yang wajar (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Membuat simpulan tentang berapa jauh pencapaian kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan unit kinerja, yakni dengan cara mentransformasikan ke dalam peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1.
Pencapaian Kinerja Ekonomi

Rasio Ekonomi	Makna	Skor Ekonomi
>100%	Ekonomis	4
85% - 100%	Cukup Ekonomis	3
65%-84%	Kurang Ekonomis	2
<65%	Tidak Ekonomis	1

Sumber : Mahmudi (2010)

b. Menghitung Rasio Efisiensi

Langkah kedua dengan mengukur pencapaian efisiensi dengan pendekatan FEE (model FEE mengukur *value for money* berdasarkan analisis varian) yakni dengan membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi yang di rencanakan. Efisiensi yang dihitung pada model ini adalah efisiensi dana (efisiensi teknis atau efisiensi alokatif) dan produktivitas karyawan. Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari

pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

Menghitung rasio efisiensi yang direncanakan. Rasio ini menghitung dengan membagi input yang direncanakan (anggaran belanja) dengan *output* yang direncanakan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Rencana} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Output Rencana}}$$

Menghitung rasio efisiensi realisasi (*actual*). Rasio ini menghitung dengan mambagi input realisasian (realisasi belanja) dengan *output* realisasian (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Realisasi} = \frac{\text{Input Realisasi}}{\text{Output Realisasi}}$$

Mencari rasio efisiensi. Angka ini diperoleh dengan mambandingkan rasio efisiensi yang direncanakan, sehingga makin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktifitas karena realisasi biaya per unit *output* lebih rendah dari perencanaan biaya per unit *output* lebih rendah dari rencana biaya per unit *output*, pada tingkat kualitas *output* tertentu(Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Efisiensi Realisasi}}{\text{Efisiensi Rencana}} \times 100\%$$

Memberikan skor terhadap rasio peningkatan efisiensi (skor rasio efisiensi). Skor efisiensi ini diberikan sebagai dasar apakah realisasi aktivitas yang dilakukan oleh Pemda menunjukkan adanya perbaikan tingkat efisiensi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya (aspek pembelajaran atau pertumbuhan). Semakin kecil rasio, semakin efisiensi suatu kegiatan semakin besar skor rasio efisiensi pada tingkat kualitas *output* tertentu (tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas *output* yang direncanakan dengan kualitas realisasinya).

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Efisien	
Rasio efisiensi	Skor
>100%	1
100%	2
90% - 99%	3
<90%	4

Sumber : (Mahmudi, 2010).

Dalam pencapaian kinerja efisiensi kemudian ditransformasikan ke dalam peningkatan sebagai berikut:

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja Efisien		
Kinerja Efisiensi Teknik/Alokatif	Makna	Skor Efisiensi
>100	Sangat Efisiensi	5
85-99	Efisiensi	4
66-84	Cukup Efisiensi	3
50-64	Kurang Efisiensi	2
< 50	Tidak Efisiensi	1

Sumber : (Mahmudi, 2010).

Menghitung Rasio Efektivitas

Langkah ketiga yaitu dengan mengalihkan pencapaian kinerja efektivitas dengan pendekatan FEE yaitu membandingkan antara *output* realisasian dengan *output* yang direncanakan.

Indikator efektivitas per kegiatan dihitung dengan teknik sebagai berikut:

Menghitung rasio efektivitas dengan formula *output* realisasian bagi *output* yang direncanakan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Output Realisasi}}{\text{Output Rencana}} \times 100\%$$

Memberikan skor terhadap rasio efektivitas (skor rasio efektivitas).

Skor efektivitas diberikan atas dasar apakah aktivitas yang dilakukan oleh Pemda menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dari rencana yang telah dibuat sebelumnya (aspek pembelajaran/pertumbuhan), dengan asumsi tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas *output* aktual dengan kualitas *output* yang direncanakan. Semakin besar rasio, semakin efektif suatu kegiatan, semakin besar skor rasio efektivitas.

Tabel 4.
Pencapaian Kinerja Efektivitas

Rasio Efektivitas	Skor
<65%	1
65%-84%	2
85%-99%	3
>100%	4

Sumber : (Mahmudi, 2010).

Dalam pencapaian kinerja efektivitas dapat ditransformasikan kedalam peringkatan sebagai berikut:

Tabel 5.
Pencapaian Kinerja Efektivitas

Kinerja Efektivitas	Makna	Skor Efektivitas
>100	Sangat efektif	5
85-99	Efektif	4
65-84	Cekup efektif	3
50-64	Kurang efektif	2
< 50	Tidak efektif	1

Sumber : (Mahmudi, 2010).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan di capai. Untuk mendukung kebijakan ini, perlu di bangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan

publik yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*).

Berdasarkan Laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2009, 2010 dan 2011 maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 6
Rekap Pendapatan dan Belanja 2009,2010,2011

Keterangan	2009		2010		2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	145.446.398.106	161.473.838.209	175.872.008.293	179.423.640.057	203.838.217.886	228.870.559.645
Pendapatan Transfer	569.117.156.969	574.257.953.157	622.281.028.692	614.973.004.594	676.871.497.996	686.260.682.997
Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	14.257.225.000	14.257.225.000	19.899.280.000	21.099.280.000	37.272.382.849	36.550.190.000
Total Pendapatan	728.820.780.075	749.989.016.366	818.052.316.985	815.495.924.651	917.982.098.731	951.681.432.642
Belanja Operasi	753.429.913.544	695.351.653.000	838.451.286.203	784.516.524.448	919.003.398.259	871.414.704.666
Belanja Modal	94.586.338.685	86.735.745.635	75.721.924.549	54.040.432.205	67.784.718.381	59.151.111.077
Belanja tdk Terduga	12.958.513.622	1.764.294.123	2.880.959.428	1.309.524.008	4.000.000.000	1.452.691.600
Total Belanja	860.974.765.851	783.851.692.758	917.054.170.180	839.866.480.661	990.788.116.640	932.018.507.343

Tabel 6 menunjukkan Pendapatan dan Belanja serta anggaran dan realisasi untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. Dimana setiap tahun menunjukkan peningkatan nilai mulai dari 2009, 2010 hingga 2011. Pada penelitian berikut ini akan dinilai apakah selama 3 tahun terakhir ini pemerintah Kota Yogyakarta telah ekonomis, efisien dan efektif didalam melaksanakan roda pemerintahan.

a. Menghitung Indikator Ekonomi TA 2009, 2010, dan 2011

Indikator pertama yang dijadikan pengukuran adalah faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi ini akan menjadi acuan utama apakah yang dilakukan Pemerintah Kota telah termasuk ekonomis didalam mengelola pemerintahan

Tabel 7
Perhitungan Nilai ekonomi

Pencapaian Nilai Ekonomi	Input Rencana	Input Realisasi	Rasio	Skor Ekonomi
2009	860,974,765,851	783,851,692,758	110%	4
2010	917,054,170,180	839,866,480,661	109%	4
2011	990,788,116,640	932,018,507,343	106%	4
Rata-rata	922,939,017,557	851,912,226,921	108%	4

Pada tabel 7 dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011 memiliki nilai ekonomi dengan rasio 108%. Setelah dilakukan penghitungan skor maka nilai rata-rata skor akan di nilai dengan tabel penilaian keekonomian

Tabel 8
Skor Indikator Ekonomi

Hasil Skor Indikator Ekonomi TA 2009-TA 2011	Rasio Ekonomi	Makna	Skor Ekonomi	Keterangan
√	>100%	Ekonomis	4	Ternyata hasil rata-rata indikator ekonomi adalah 108% dan menempati rasio ekonomi >100% yang memiliki skor 4 yang bermakna ekonomis
	85%-100%	Cukup Ekonomis	3	
	65%-84%	Kurang Ekonomis	3	
	<65%	Tidak Ekonomis	2	

Pada penelitian ini telah dilakukan evaluasi atas keekonomisan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah ekonomis. Berdasarkan Skor indikator ekonomi untuk nilai rata-rata Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009, 2010 dan 2011. Berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai 108% yang berarti memiliki makna bahwa rata-rata selama tiga tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta Ekonomis dalam pengelolaan pemerintahan. Hal senada juga disampaikan oleh Mardiasmo (2002) bahwa dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan keekonomian setiap daerah. Dalam Undang No 32 Tahun 2004, juga telah disampaikan dengan otonomi daerah akan meningkatkan perekonomian suatu daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan warga.

b. Menghitung Indikator Efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009-2011

Indikator kedua yang akan dilakukan perhitungan oleh peneliti adalah mengenai tingkat efisiensi sebuah Pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Penilaian efisiensi ini dilakukan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan menilai input dan output baik untuk anggaran dan juga realisasi.

Penelitian ini telah melakukan perhitungan rasio efisiensi rencana dan efisiensi realisasi yang kemudian dilakukan perhitungan mengenai rasio efisiensi. Adapun hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9
Perhitungan Nilai Efisiensi

Efisiensi	Perhitungan Nilai Efisiensi		
	Rasio Efisiensi Rencana	Rasio Efisiensi Realisasi	Rasio Efisiensi
2009	118%	105%	88%
2010	112%	103%	92%
2011	108%	98%	91%
Rata-rata	113%	102%	90%

Perhitungan nilai rasio efisiensi Pemerintahan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 memiliki nilai rata-rata rasio 90%. Nilai rata-rata rasio efisiensi pada tabel indikator berikut ini.

Tabel 10
Indikator Efisiensi

Hasil Skor Indikator Efisiensi TA 2009-TA 2011	Rasio Efisiensi	Skor	Kinerja Efisiensi	Makna	Skor	Keterangan
√	>100%	1	>100	Sangat Efisiensi	5	Hasil rata-rata skor indikator efisiensi adalah 90%. Dimana hasil itu menunjukkan pada peringkat 4 dengan makna efisiensi
	100%	2	85-99	Efisiensi	4	
	90%-99%	3	65-64	Cukup Efisiensi	3	
	<90%	4	50-64	Kurang Efisiensi	2	
			<50	Tidak Efisiensi	1	

Pada tabel 10 diatas telah dilakukan pengklasifikasian atas nilai dimana indikator efisiensi Pemerintah Kota Tahun anggaran 2009,2010 dan 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta efisien dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa pada proses kegiatan operasional pada produk/hasil kerja yang telah dilakukan dapat di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*), serta dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang di gunakan untuk membiayai pembangunan dan

aktifitas pemerintah daerah yang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan sehingga pencapaian sasaran yang optimal. Sehingga pencapaian ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi supaya menghasilkan kinerja yang sangat efisien.

c. Menghitung Indikator Efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009-2011

Penilaian yang ketiga adalah penilaian efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011. Pengukuran yang efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan atau menilai rasio antara output rencana dan output realisasi.

Tabel 11
Perhitungan Rasio Efektivitas

Efektivitas	Output Rencana	Output Realisasi	Rasio
2009	728,820,780,075	749,989,016,366	103%
2010	818,052,316,985	815,495,924,651	100%
2011	917,982,098,731	951,681,432,642	104%
Rata-rata	821,618,398,597	839,055,457,886	102%

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan nilai rata-rata sebesar 102%. Nilai rasio 102% akan kita nilai berdasarkan skor indikator efektivitas, berikut tabel indikator pada tabel 12 dibawah ini

Tabel 12
Indikator Nilai Efektivitas

Hasil Skor Indikator Efektivitas TA 2009-TA 2011	Kinerja Efektivitas	Makna	Skor	Keterangan
√	>100	Sangat Efektif	5	Hasil Skor menunjukkan nilai 102%, yang bermakna sangat efektif
	85-95	Efektif	4	
	65-84	Cukup Efektif	3	
	50-64	Kurang Efektif	2	
	<50	Tidak Efektiv	1	

Pada tabel 12 diatas menunjukkan bahwa skor rasio efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 sebesar 102% termasuk dalam kategori sangat efektif. Nilai sangat efektif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan pemerintahan sangat efektif dalam pengelolaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan (studi kasus pemerintah kota Yogyakarta) pada tahun 2009,2010 dan 2011. Penelitian ini melakukan pengujian nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan pada nilai pada indikator ekonomis sebesar 108% yang bermakna bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ekonomis. Nilai ekonomis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mensejahterakan warganya. Hasil pengujian yang kedua dalam melakukan perhitungan atas nilai efisiensi. Indikator efisiensi menunjukkan nilai 90%, yang berarti pemerintah Kota Yogyakarta efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Namun dalam penelitian ini ataupun penelitian yang lainnya belum ada yang menilai seberapa efisien pemerintah Kota Yogyakarta dalam penggunaan sumber daya

manusianya. Pengujian ketiga yang menguji mengenai nilai efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 menghasilkan skor rasio sebesar 102% yang berarti lebih dari 100% yang berarti sangat efektif. Pengelolaan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta selama 3 tahun terakhir sangat efektif. Berdasarkan hasil ketiga pengujian menggunakan FEE ini dimana Pemerintah Kota Yogyakarta yang menunjukkan nilai ekonomis, efisien dan sangat efektif berarti Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengelolaan keuangan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Bisma, IDewa Gde; H. Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
- Cipta, H. (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi dipublikasikan, Universitas Andalas, Sumatera Utara.
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). *Pelaksana Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta: Grava media.
- Safar, M. Nasir, Dkk.. (2003). *Prosinding Seminar Nasional*. Yogyakarta: Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta Uad Press.
- Saifuddin, Azwar. (2007). *Metode Penelitian, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Heny. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 3003 sampai dengan TA 2007*. Mataram: Staf Pengajar Fakultas Ekonomi IKIP Mataram
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bisma, IDewa Gde; H. Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
- Cipta, H. (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah*

Kabupaten Tanah Datar). Skripsi dipublikasikan, Universitas Andalas, Sumatera Utara.

Damayanti, Theresia Woro. (2004). *Pelaksana Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mahsun, Moh. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.

Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta: Grava media.

Safar, M. Nasir, Dkk.. (2003). *Prosinding Seminar Nasional*. Yogyakarta: Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta Uad Press.

Saifuddin, Azwar. (2007). *Metode Penelitian, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Susanto, Heny. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 3003 sampai dengan TA 2007*. Mataram: Staf Pengajar Fakultas Ekonomi IKIP Mataram.